



POLITIK LN & PERAN NKRI DI DUNIA

Laporan Riset Pustaka Dr.Jan Hoesada.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2
KEBIJAKAN POLITIK LN NKRI	3
SEJARAH POLITIK LN NKRI	5
GERAKAN NIR-ALIANSI NEGARA-NEGARA DI DUNIA	12
SEJARAH KINERJA LN NKRI	13
PERAN NKRI PADA G20	20
PERAN NKRI PADA ASOSIASI ASEAN	25
PERAN NKRI PADA FORUM APEC	29
MENGAMATI PERKEMBANGAN BRICS	31
TENTANG KELOMPOK TUJUH (G7)	33
IKHWAL NATO & CSTO	36
HUBUNGAN G7 DAN NATO	41
KETERLIBATAN NKRI PADA OPEC	41
PERAN NKRI PADA UNI AFRIKA	42
KEGIATAN LN NKRI DENGAN UNI EROPA	46
NEGARA PESEMAKMURAN INGGRIS	58
TENTANG OKI	60
KERJASAMA BILATERAL DAN MULTILATERAL	68
PENUTUP	107

1. PENDAHULUAN

Pada awalnya penulis meriset hanya tentang ikhwal BRICS sebagai sebuah studi-mandiri, kemudian terpaksa meluas kepada organisasi-internasional lain, karena ternyata terkait BRICS.

Makalah berdasar kutipan berbagai sumber , disajikan terutama sebagai tambahan materi pengetahuan umum yang terkasih para siswa/mahasiswa berjurusan yang terkait judul makalah.

Penulis mohon maaf apabila terdapat organisasi internasional tertentu yang tak teriset, hadirin sidang-pembaca di mohon melengkapi sumber-sumber tersebut dengan sumber lain , terutama berbagai sumber berseberangan dan sumber lebih otentik , sambil memaafkan kedangkalan makalah ini.

Agak sulit memisahkan kegiatan politik dan kegiatan ekonomi negara-negara di muka-bumi. Sebagai misal, terdapat korelasi positif sebagian sikap/aktivitas G7 , NATO terhadap nilai dianut PBB. Pada hemat penulis , BRICS belum sempurna terformat , masih dalam tahap pertumbuhan mencari nilai-di anut, misi, visi, strategi jangka-panjang terpilih. NKRI menganut politik bebas-aktif bersama sekitar 120 negara lain. Pada tataran OPEC, keanggotaan NKRI tergantung pada keuntungan-kerugian keikutsertaan sebagai kumpulan negara penghasil migas.

Nibras Nada Nailufar , menyajikan artikel berjudul *Perbedaan G20, G7, dan G8* , sumber KOMPAS.com, antara lain menyatakan bahwa terdapat beberapa organisasi yang menghimpun berbagai negara, antara lain PBB dan G20 di mana Indonesia juga jadi anggota di dalamnya. G7 atau *Group of Seven* terbentuk karena kepentingan *politik*, berlatar belakang krisis minyak di tahun 1970 cq harga minyak mahal dan mengakibatkan perekonomian dunia stagnan. Para pemimpin negara Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat bertemu untuk mencari jalan-keluar, sementara negara-negara Eropa diwakili oleh *European Council dan European Comission* hadir dalam pertemuan-pertemuan G7. Presiden Trump ingin Rusia dimasukkan kembali jadi anggota G7 G8 dan G20. Pada 1998, Rusia bergabung sehingga G7 menjadi G8. Namun keberadaan Rusia tak lama, Rusia dikeluarkan dari G8 setelah menganeksasi Krimea pada 2014. Terdapat berbagai organisasi supranasional berbasis geografis seperti Uni Eropa atau basis sara tertentu bertujuan mulia.

Nikita Rosa - detikEdu , 2022, menyajikan artikel berjudul *Kisah Putin Aneksasi Krimea, Sejarah dan Reaksi Dunia*, sumber Detikpedia, antara lain mengungkapkan bahwa konflik Ukraina dengan Rusia akhirnya sampai puncaknya. Presiden Vladimir Putin mengambil keputusan untuk meluncurkan invasi skala penuh ke kota-kota penting di Ukraina. Invasi ini mengingatkan peristiwa aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea yang diakui bagian dari Ukraina delapan tahun yang lalu. Krimea merupakan wilayah otonom yang mayoritas penduduknya beretnis Rusia. Saat itu, daerah ini "diambil" oleh Rusia dengan dalih membela kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia. BBC melaporkan, Putin memutuskan langkah itu setelah Viktor Yanukovych, Presiden Ukraina yang pro-Rusia digulingkan. Aneksasi Krimea terjadi hanya dalam beberapa hari. Pada 22-23 Februari, Putin, mengadakan rapat untuk mengembalikan Krimea ke Rusia. Krimea memang sempat menjadi bagian Rusia selama 170 tahun. Saat aneksasi tahun 2014, Rusia mengirimkan kekuatan militernya untuk mengadakan referendum. Dilansir dari petinggi Rusia dan sumber-sumber media Krimea, bahwa 95% penduduk memilih reunifikasi dengan Rusia, hanya saja hingga saat ini,

kebenaran referendum masih dipertanyakan oleh komunitas internasional. Mayoritas negara di dunia mengecam tindakan Rusia, bahwa pencaplokan ini bertentangan dengan Memorandum Budapest 1994 mengenai kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina yang telah ditandatangani Rusia.

Pada suatu rapat dewan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) 2014, Amerika Serikat mengusulkan komitmen kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina. Namun, Rusia masih menganggap bahwa tindakan mereka adalah benar. Hingga Februari 2021, Amerika kembali menegaskan komitmennya untuk berpihak pada Ukraina dalam rapat dewan PBB. Inggris Raya memiliki reaksi yang berbeda dengan Amerika, berupaya memboikot Olimpiade Musim Dingin di Sochi, Rusia. Perdana Menteri Inggris Davin Cameron mengatakan bahwa tindakan Rusia adalah bentuk serangan ke negara berdaulat dan perampasan tanah tanpa menghormati hukum negara atau hukum internasional. Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu menyatakan simpatinya pada situasi di Ukraina. Indonesia mendorong PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Ukraina. Marty juga mengusulkan agar PBB mengirimkan utusan khusus kepada Sekretaris Jenderal untuk daerah yang terkena dampak.

Inilah pendahuluan tentang G20. G20 beranggotakan 20 negara yang mewakili 85 persen perekonomian dunia. Jika G8 dan G7 secara eksklusif pada awalnya beranggota hanya negara-negara maju. G20 juga beranggotakan negara berkembang, antara lain Indonesia. G20 terbentuk sebagai forum perkonomian pada 1999, setahun setelah G7, pada awalnya G20 hanya berada di tingkat menteri. Pada 2009, G20 ditetapkan sebagai pengganti G8, dan G20 dikembangkan menjadi tingkat kepala negara. Negara-negara diwakili oleh kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentral. Anggota G20 yakni: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

2. KEBIJAKAN POLITIK LN NKRI

Annisa Medina Sari, 2023, menyajikan artikel berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia : Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Landasannya*, sumber Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, antara lain mengungkapkan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainn, guna mencapai tujuan nasional NKRI. **Indonesia menganut prinsip bebas aktif, yang mengandung arti kebijakan luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, berpegang teguh pada prinsip dan pendirian, serta rasional dan fleksibel dalam pendekatan.**

Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah (1) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, (2) Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, (3) Meningkatkan perdamaian internasional dan mencapai syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (4) Meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita Pancasila.

Prinsip politik luar negeri Indonesia yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah bebas-aktif, yang berarti bahwa Indonesia tidak mengadopsi politik netral dalam hubungannya dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan

sikap dan kebijaksanaan terhadap isu-isu internasional tanpa mengikat diri pada satu kekuatan dunia tertentu. Dengan prinsip bebas-aktif tersebut, Indonesia secara aktif terlibat dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan berbagai permasalahan dunia

Politik LN bertujuan mencapai ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia berusaha untuk berperan aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan mengatasi masalah-masalah global.

Landasan politik luar negeri Indonesia terdiri dari:

- Landasan Idiil

Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang menjadi panduan dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik luar negeri. Dalam konteks politik luar negeri, **Pancasila mengedepankan beberapa nilai penting, seperti kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial, dan persaudaraan internasional.**

- Landasan Konstitusional

Undang – Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa dan **ikut melaksanakan ketertiban dunia** yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

- Landasan Operasional

Landasan operasional politik luar negeri Indonesia bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman, dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintahan pada masa tertentu. Meskipun landasan ideologis dan konstitusional tetap dipertahankan, **cara pelaksanaan dan fokus kebijakan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi global, nasional, dan tuntutan zaman**, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip UUD 1945.

Politik Luar Negeri Indonesia adalah serangkaian kebijakan dan langkah yang dilakukan untuk mengelola hubungan dengan negara lain. Dengan prinsip bebas-aktif, Indonesia berperan aktif dalam mencapai perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Landasan ideologis berdasar Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sementara landasan operasional dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebijakan pemerintahan.

NKRI adalah sebuah negara yang memilih berpolitik LN Bebas Aktif, **sebagai sebuah negara yang mempromosikan agenda *Non-Block*, mendorong perdamaian dunia dan pembangunan kesejahteraan-bersama semua bangsa/negara di bawah berbagai agenda PBB.**

3. SEJARAH POLITIK LN NKRI

Topan Yuniarto, 2022, menyajikan artikel berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia: Profil, Sejarah, dan Aktualitas*, sumber PT Kompas Media Nusantara, antara lain mengungkapkan bahwa artikel *The Study of Foreign Policy in International Relations* oleh Alieu Bojang, mengutip definisi politik luar negeri George Modelski sebagai “sistem aktivitas yang dikembangkan untuk mengubah perilaku negara lain dan menyesuaikan aktivitas mereka sendiri dengan lingkungan internasional”. Menurut Modelski, **politik luar negeri fokus pada perihal usaha negara untuk mengubah perilaku negara-negara lain selaras dengan kepentingan nasional.**

Sementara itu, pengertian akan politik luar negeri Indonesia secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 2 UU 37/1999 tentang Hubungan LN, mendefinisikan politik LN sebagai; **“Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintahan Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.**

Salah satu butir penting yang dapat dipahami adalah bahwa politik luar negeri inheren dengan kepentingan nasional sebuah negara, untuk “mencapai tujuan nasional”. Melalui politik luar negeri, suatu negara mengartikulasikan kepentingan nasionalnya terhadap dunia internasional. Dalam artikel "Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim", Indrawati & Nugroho menuliskan bahwa **politik luar negeri adalah perilaku/kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional yang ditujukan keluar**. Oleh karenanya, tiap negara memiliki rumusan politik luar yang berbeda bergantung pada kepentingan nasionalnya masing-masing. Ben Perkasa Drajat, dalam buku *Demokratisasi dan Otonomi: Mencegah Disintegrasi Bangsa*, menuliskan bahwa **“kebijakan luar negeri (foreign policy) adalah perpanjangan kebijakan dalam negeri (domestic policy)”.**

Dalam rumusan politik luar negerinya, Indonesia sendiri mengacu pada tiga landasan fondasional – landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional.

- Pertama, landasan ideal mengacu pada Pancasila. Dengan demikian, sikap dan **kebijakan politik luar negeri Indonesia harus mampu mencerminkan jiwa Pancasila** sebagai ideologi negara. Menurut Mohammad Hatta, seperti ditulis oleh Alami dalam buku *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, menyatakan Pancasila dipandang tak hanya sebagai panduan objektif kehidupan bernegara secara nasional, melainkan juga sebagai dasar kelangsungan politik internasional Indonesia.
- Kedua, landasan konstitusional mengacu pada UUD 1945. Hal ini telah tertuliskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berisi tujuan dari kemerdekaan Indonesia dalam perannya terhadap dunia, yaitu: **“... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia ...”**
- Ketiga, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menegaskan bahwa Pasal 2 pada Undang-Undang tersebut menjelaskan GBHN sebagai “suatu landasan

pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia”. Berbeda dengan kedua landasan lainnya, **landasan operasional politik luar negeri Indonesia bersifat dinamis mengikuti kebijakan dan urgensi yang ditetapkan pada masing-masing pemerintahan yang sedang berjalan.**

- Diluar ketiga landasan politik luar negeri tersebut, Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 1999 juga menegaskan tidak dapat dipisahkannya pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dengan konsepsi terhadap Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional sendiri didefinisikan sebagai sebuah kondisi kehidupan bangsa Indonesia dengan mengacu pada Wawasan Nusantara. Tujuan pelaksanaannya sendiri adalah demi mewujudkan daya tangkal dan daya tahan dalam interaksi pada konteks waktu dan lingkungan tertentu. Penjagaan ini perlu diwujudkan demi “... menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila”.
- “Bebas-aktif” sebagai Prinsip Politik Luar Negeri. Pasal 3 UU Nomor 37 Tahun 1999 menekankan bahwa politik luar negeri “bebas-aktif” bukanlah sebuah sikap politik netral, melainkan menjadi satu **posisi politik otonom mandiri**. “Bebas” memiliki arti bahwa dalam melaksanakan politik luar negerinya, Indonesia memiliki kebebasan untuk menjalin kerja sama dengan negara atau ikatan internasional tertentu tanpa keterikatan. **Dalam soal permasalahan atau fenomena internasional, Indonesia juga bebas untuk menentukan sikap dan kebijakan tanpa pengaruh kekuatan manapun.** Sementara “aktif” merujuk pada sikap Indonesia untuk terlibat aktif dalam segala permasalahan maupun kerja sama internasional demi tercapainya tujuan kemerdekaan nasional, sesuai alinea empat Pembukaan UUD 1945 – ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dari prinsip politik luar negeri “bebas-aktif” sendiri telah diutarakan pertama kali oleh Sutan Sjahrir pada tahun 1947 di *Inter Asia Relations Conference*, New Delhi. Dalam kesempatan tersebut, Sjahrir menyoroti bagaimana dunia internasional pada masa itu seolah memaksa semua negara untuk memilih keberpihakan pada dua blok besar yang saling bertarung secara politis maupun ideologis, Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan aliran liberal-kapitalis dan Blok Timur dipimpin Uni Soviet dengan paham komunis-sosialisnya. Sjahrir sendiri mengistilahkan konflik ini antara blok Anglo-Saxon dan blok Soviet Rusia yang memaksa keberpihakan negara-negara lain. Sjahrir menyoroti bahwa **sikap yang sejati yang benar adalah “menolak untuk dipaksa” dan mencari sikap internasional sendiri. Secara lebih konkret, sikap ini haruslah sesuai dengan sistem negara sendiri dan tidak bermusuhan dengan tujuan nasional negara.** Keberpihakan atas salah satu blok memang menggiurkan pada masa itu, secara khusus bagi negara yang baru merdeka semacam Indonesia. Sebabnya, negara-negara tersebut masih memerlukan modal pembangunan untuk masyarakat dan infrastruktur nasionalnya. Keberpihakan terhadap negara-negara besar menjadi jalan besar untuk perolehan modal tersebut. Oleh karenanya, prinsip ini mendapatkan tantangan besar untuk pelaksanaannya di kancah internasional. Pada 2 September 1948, Mohammad Hatta menegaskan kembali prinsip “bebas-aktif” dalam pidatonya di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), berlatar belakang pertarungan dua blok besar pada masa itu, Blok Barat dan Blok Timur, yang mendorong pelibatan negara-negara lain untuk mengambil sikap keberpihakan terhadap salah satu blok. Hatta menawarkan sikap independen dari konflik politik internasional tersebut. Ia berpendapat bahwa seharusnya **Indonesia dapat menentukan sikap sendiri dan mencegah ikut terseret dikotomi pilihan pro-**

Rusia ataupun pro-Amerika. Dalam pidato tersebut Hatta mengatakan, “Garis politik Indonesia tidak dapat digantungkan kepada politik negara lain, yang mengejar kepentingan sendiri” (dikutip Haryanto dalam artikel "Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran"). **Pidato yang kelak dikenal dengan judul “Mendayung di antara Dua Karang” tersebut menjadi tonggak besar bagi pengenalan “bebas-aktif” terhadap dunia internasional – memunculkan konsep Non-Blok.** Sementara sikap “bebas” merujuk pada kebebasan Indonesia dalam memilih sikap internasional dan terbebas dari segala keberpihakan atas determinasi politik dan ideologi kedua blok, sikap “aktif” secara konkret merujuk pada sikap Indonesia untuk secara aktif dan konstruktif terlibat dalam kemerdekaan di dunia. Dalam artikel berjudul Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang ditulis Wisnumurti disoroti bahwa prinsip “aktif” juga berangkat dari pengalaman historis dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. **Sikap anti penjajahan menjadi salah satu karakter utama politik luar negeri Indonesia,** yang pada kemudian muncul dalam **alinea pertama Pembukaan UUD 1945, yang berisi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”** Pada kelanjutannya, prinsip ini terbukti tidak hanya merupakan sebuah karakter operasional yang bersifat normatif, tetapi juga merupakan sebuah prinsip yang ideal bagi Indonesia (Todung Mulya Lubis dalam buku *Demokratisasi dan Otonomi: Mencegah Disintegrasi Bangsa*). Oleh karenanya, prinsip “bebas-aktif” secara konsisten diwariskan dalam tiap estafet kepemimpinan negara – hanya penafsirannya yang kemudian mengalami penyesuaian terhadap kecenderungan arah pemerintahan politik yang sedang berlangsung dan kepentingan nasional yang aktual. Dengan kemampuan adaptasi ini, Abdurrahman Mohammad Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, menyebutkan bahwa “bebas-aktif” masih relevan hingga saat ini dan akan terus bertahan di tengah perubahan dunia.

Intisari Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

Indonesia telah menjadi sebuah negara berlegitimasi selama kurun waktu 77 tahun lamanya. Dalam periode tersebut, Indonesia telah mengalami berbagai pergantian kepala negara sebanyak tujuh kali dengan pembagian waktu ke dalam tiga periodisasi pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi). Dalam proses panjang tersebut, politik luar negeri Indonesia juga telah mengalami dinamika yang panjang. Namun, ketiga landasan dan prinsip “bebas-aktif” tetap menjadi fondasi yang dipertahankan oleh tiap estafet kepemimpinan – tentu juga dengan pemaknaan dan penyesuaian yang terus diadaptasi

- **Orde Lama (1945--1966)**

Hadirnya Soekarno dan Hatta sebagai dwi tunggal dalam perjuangan bangsa Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Indonesia dalam perpolitikan luar negeri Indonesia. Masa-masa awal kemerdekaan juga adalah periode penting sebagai determinan untuk menentukan karakter politik luar negeri Indonesia. Pada masa Orde Lama ini, “bebas-aktif” sungguh-sungguh dimaknai sebagai prinsip kebebasan dari penjajahan dan keberpihakan pada blok manapun serta aktif dalam upaya perdamaian dunia.

Michael Leifer, seperti dikutip dalam artikel "Politik Luar Negeri Republik Indonesia Masa Lampau, Kini, dan Masa Depan: Suatu Tinjauan dan Saran Kedepan", menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia memperoleh bentuk awalnya dari usaha-usaha mendapatkan

pengakuan kemerdekaan oleh publik internasional. Dinamika dan perjuangan politik luar negeri Indonesia pada awal kemerdekaan justru melahirkan nasionalisme ekonomi yang lebih kuat dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya – bahkan hingga sekarang.

Pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Soekarno menyadari sungguh urgensi akan kehadiran Kementerian Luar Negeri. Oleh karenanya, dua hari setelah proklamasi dibentuklah Kementerian Luar Negeri dengan Ahmad Subardjo, salah satu pejuang dan tokoh proklamasi, diangkat sebagai menteri luar negeri pertama. Kementerian Luar Negeri pun menjadi salah satu kementerian paling pertama yang didirikan. Pada April, 1946 Indonesia mengirimkan misi diplomatik pertamanya ke Belanda untuk berunding dengan pihak Sekutu dan Belanda.

Dalam periode usia muda negara Indonesia tersebut, Kementerian Luar Negeri memiliki dua tugas khusus (Kemlu.go.id, 2021). Yang pertama, adalah untuk “Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas”. Tujuan dari tugas ini adalah agar Indonesia segera memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaannya. Kedua, adalah “melakukan perundingan dan membuat persetujuan”. Pada masa-masa awal kemerdekaan tersebut, tujuan utama politik luar negeri Indonesia adalah menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke publik internasional dan memperoleh pengakuan *de facto* atas kemerdekaan itu sendiri.

Kedua tugas tersebut dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri melalui diplomasi sebagai jalan utama. Hasilnya, pada 1947 Indonesia berhasil melangsungkan perundingan dengan Belanda dalam Perundingan Linggarjati. Dalam perundingan tersebut, wilayah Indonesia baru memperoleh pengakuan atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia membuahkan Perjanjian Renville pada 1948 yang membuahkan pengakuan atas wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Pada 1949, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Indonesia memperoleh pengakuan atas kemerdekaannya, namun dengan Irian Barat yang belum dilepaskan Belanda. Akibatnya, *status quo* Irian Barat untuk sementara ditangguhkan. Melalui semangat perjuangan dan diplomasi, Indonesia pada akhirnya dapat meraih dukungan dan solidaritas luas dari masyarakat internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1950, Indonesia bergabung dengan PBB – menunjukkan Indonesia telah diakui sebagai negara merdeka.

Pada Agustus, 1960, Soekarno dalam pidato tahunan di Istana Merdeka mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pemutusan ini dilakukan setelah tindakan Belanda mengirimkan kapal induk Karel Doorman untuk memperkuat pertahanan di Irian Barat. Tindakan ini dipandang Soekarno sebagai suatu tindakan agresif perihal Irian Barat dan bahwa KMB belum tuntas menyelesaikan hubungan kolonial antara kedua negara.

Thee Kian Wie dalam buku *Dialog Dengan Sejarah: Soekarno Seratus Tahun*, mencatat bahwa keengganan Belanda menyerahkan Irian Barat dipandang Soekarno sebagai belum selesainya revolusi nasional dan bahwa revolusi tersebut harus diteruskan hingga Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Oleh karenanya, kembalinya Irian Barat pun menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Pada 15 Agustus 1962 melalui Perjanjian New York, Belanda sepakat menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat.

Pada akhir pemerintahan Orde Lama, Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB. Hal ini bertolak dari diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Padahal, Soekarno telah menyampaikan peringatan untuk menolak penolakan atas

diterimanya Malaysia. Soekarno melihat potensi ancaman yang diberikan oleh kemerdekaan Malaysia – di mana pada kemudiannya hal ini terwujud dengan keinginan Federasi Malaysia untuk memasukkan Borneo Utara sebagai bagian dari negara mereka.

- **Orde Baru (1966-1998)**

Dalam pergantian pemerintahan ke Orde Baru, makna prinsip “bebas” ditarik lebih umum pada tataran ketidakberpihakan dengan kekuatan-kekuatan dunia dan aktif dalam kerja sama multilateral dan bilateral. Pada masa ini, kebijakan politik luar negeri Indonesia begitu berbeda di bawah pemerintahan Soeharto. Salah satu perbedaan yang begitu mencolok adalah kembalinya Indonesia dalam organisasi PBB dan juga terlibat aktif dalam pendirian ASEAN.

Pada periode ini, Soeharto menempatkan Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam 30 tahun periode kekuasaannya, politik luar negeri Indonesia dititikberatkan pada stabilitas ekonomi nasional. Prinsip “bebas-aktif” pun diterjemahkan dengan sasaran peminjaman utang internasional dan promosi ekspor secara khusus sektor nonmigas. Konsep *free market economy* pun menjadi tafsiran pokok bagi kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia. Deregulasi dan pemudahan atas partisipasi internasional bagi dinamika nasional menjadi semakin jamak terjadi.

Selain stabilitas ekonomi, politik luar negeri pada era Orde Baru juga berdiri pada kepentingan untuk memperkuat politik-keamanan nasional sebagaimana. Dalam orientasi ini, pada tahun 1967 Indonesia mulai aktif dalam perannya untuk pembentukan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Hanya saja, dalam masa tersebut Indonesia mengalami penurunan kondisi ekonomi sehingga tidak dapat melanjutkan partisipasinya secara aktif. Selain itu, rasa percaya yang kurang antarnegara juga menghambat pertumbuhan ASEAN.

Pada masa perkembangan kedua ASEAN pada tahun 1976, Indonesia kembali mulai terlibat aktif. Dalam masa ini, Soeharto menilai bahwa Indonesia telah mencapai stabilitas di bidang ekonomi dan keamanan nasional. Dengan perannya yang determinan, KTT pertama ASEAN dilaksanakan di Bali. Dalam pertemuan ini dihasilkan *Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat*.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru ini, terjadi peristiwa internasional yang begitu merubah dikotomi perpolitikan global. Peristiwa tersebut adalah keruntuhan Tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara kecil. Akibatnya, determinasi komunis Soviet menjadi berkurang dan dikotomi blok-blok adidaya menjadi pudar. Namun secara bersamaan, muncul beragam situasi dunia internasional dalam berbagai dimensi. Dinamika politik internasional yang begitu cepat ini mendorong Indonesia untuk harus menyesuaikan prinsip “bebas-aktif” operasionalnya.

Selain itu, politik luar negeri Indonesia lain yang patut dicatat pada masa ini adalah partisipasi Indonesia dalam penyelesaian konflik antara Kamboja dan Vietnam pada Januari, 1979. Dalam konflik tersebut, Kamboja mengalami pendudukan oleh Vietnam yang juga berdampak pada digulingkannya rezim Khmer Merah. Indonesia hadir menerapkan prinsip “aktif” dengan menginisiasi penyelesaian konflik dengan melakukan *shuttle diplomacy* antara kedua negara.

Indonesia pun mengundang pihak-pihak yang bertikai dan terkait untuk hadir pada *Jakarta Informal Meeting* atau JIM. JIM berhasil dilaksanakan pertama kali pada Juli 1988 dan

Februari 1989. Dalam kesempatan tersebut, Ali Alatas sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu sekaligus *Co-Chairman* JIM memimpin penyelesaian Kamboja dan Vietnam hingga tahap gencatan senjata kedua belah pihak dan penarikan pasukan Vietnam. Pada akhirnya, konflik ini tuntas dengan pengukuhan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB dan pembentukan *United Nation Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) untuk mengisi kekosongan pemerintahan Kamboja pada masa itu.

- **Era Reformasi (1998-sekarang)**

Dalam masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati pemaknaan atas “bebas-aktif” tidak banyak berubah – di mana bebas dimaknai sebagai ketidakterikatan pada ideologi negara lain dan tetap aktif dalam kerja sama internasional. Pascakeruntuhan 1998, Habibie sebagai presiden pengganti kembali mengintensifkan usaha untuk memperoleh bantuan dari negara-negara maju dan dukungan IMF bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini diupayakan oleh Ali Alatas yang masih menjadi Menteri Luar Negeri dengan meningkatkan diplomasi ekonomi seperti peningkatan ekspor ke luar negeri, menarik masuknya investor-investor asing, dan promosi bagi untuk menarik wisatawan asing.

Catatan penting dalam politik luar negeri Indonesia pada masa Habibie (Mei, 1998 – Oktober, 1999) adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Berangkat dari masukan yang diberikan oleh Perdana Menteri Australia John Howard, Habibie memutuskan diadakannya referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Dalam referendum tersebut, rakyat Timtim diberikan opsi untuk mendukung otonomi khusus (yang berarti tetap menjadi bagian Indonesia) atau menolak otonomi khusus. Dengan pengawasan PBB, hasil dari referendum menunjukkan angka 78,5% (344.580 suara) rakyat Timtim menolak otonomi khusus dan 21,5% (94.388 suara) mendukung otonomi khusus. Dengan hasil tersebut, PBB memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Timtim dengan nama Timur Leste pada tanggal 22 Mei 2002.

Dalam masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gusdur (Oktober, 1999 – Juli, 2001), tidak banyak dinamika politik luar negeri yang terjadi dan berhasil. Dalam periode ini, Indonesia sempat mengajukan pembentukan persekutuan tiga negara: Indonesia, Cina, India. Tujuannya pada saat itu adalah menandingi hegemoni ekonomi Jepang di Asia Tenggara. Selain itu, juga muncul gagasan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Meski begitu, kedua wacana ini tidak berhasil tercapai. Meski begitu, patut dicatat bahwa dalam periode ini, Indonesia mengusulkan kepada ASEAN untuk menerima Timur Leste dan Papua Nugini sebagai anggota.

Pada era kepemimpinan Megawati (Oktober, 2001 – Oktober 2004) muncul strategi politik luar negeri Indonesia. Bentuk diplomasi yang ditempuh pun ditujukan menghindari permusuhan. Selain itu, peristiwa 11 September 2001 juga memberikan pengaruh, di mana Indonesia dengan bantuan kucuran dana dari Amerika Serikat secara aktif menyuarakan perang atas terorisme dalam wadah internasional.

Prinsip politik luar negeri “bebas-aktif” mengalami pergeseran makna pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. **Dalam masa ini, muncul istilah “*Sailing in the Turbulance Ocean*” atau berlayar di samudera yang bergejolak – menggambarkan bahwa pada konteks saat ini, prinsip “bebas-aktif” tidak lagi menjadi jawaban atas perjalanan politik luar negeri Indonesia yang tadinya hanya terhalang oleh dua karang besar. Dalam konteks aktual masa tersebut, dianggap bahwa tantangan luar negeri**

yang terjadi justru bisa muncul dari segala arah, dimana aktor-aktor internasional saling berkompetisi menciptakan transisi sekutu-lawan yang begitu cepat.

Selain itu, juga muncul semboyan *“thousand friends zero enemy”* sebagai strategi politik luar negeri Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuan utama dari slogan ini adalah menghindari konflik-konflik internasional yang terjadi. Dalam dunia yang semakin dekat, saling ketergantungan antar-negara menjadi hal lazim. Oleh karenanya, slogan ini akan menjadi dasar penerapan prinsip “aktif” dengan Indonesia hadir menjaga hubungan baik bilateral antarnegara. Dalam periode ini, Indonesia juga berusaha menjaga peran pentingnya dalam konteks perpolitikan di Asia Tenggara. Pada tahun 2011, Indonesia sempat terpilih sebagai Ketua ASEAN dan menjadikan “keseimbangan dinamis” sebagai tujuan utama penciptaan kondisi ideal di kawasan Asia Tenggara.

- Dalam era Joko Widodo, prinsip “bebas-aktif” masih menjadi pedoman dalam rumusan politik luar negeri Indonesia. Makna “bebas” diterapkan dalam visi Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian nasional. Sementara karakter “aktif” direalisasikan dalam usaha pencapaian kemandirian nasional atas sikap kerja gotong-royong yang positif dan konstruktif. Agenda politik luar negeri Joko Widodo sendiri, dalam periode pertama pemerintahannya, disosialisasikan dalam **Nawa Cita atau Sembilan Agenda Prioritas. Dalam bidang luar negeri, tertera “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.”**
- Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 2024

Pada 29 Oktober 2019, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi menyampaikan kepada media prioritas politik luar negeri Indonesia periode 2019--2024. Retno menekankan terlebih dahulu akan warisan amanah politik luar negeri Indonesia dengan mengutip alinea empat Pembukaan UUD 1945 dan menekankan pelaksanaannya dalam koridor “bebas-aktif”. Lebih lanjut, Retno menjabarkan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam “Prioritas 4+1” yang merupakan ejawantah Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

- Prioritas pertama, adalah untuk penguatan pada sektor diplomasi ekonomi. Urgensi tersebut bertolak dari prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai ekonomi terbesar keempat berdasarkan *purchasing power parity*. Untuk menempuh ini, Indonesia akan melaksanakan (1) penguatan pasar nasional, (2) penguatan pada perundingan ekonomi, (3) promosi investasi, (4) mendorong ekonomi berbasis revolusi 4.0, dan (5) mempertahankan hampiran diplomasi sebagai jalan pencapaian kepentingan strategis ekonomi Indonesia.
- Prioritas kedua pada diplomasi perlindungan. Diplomasi perlindungan menjadi wujud usaha negara memberikan proteksi terhadap warga negaranya di luar negeri. Upaya yang dilakukan adalah dengan kerja sama intensif dengan Kedutaan, pembuatan portal daring sebagai basis data WNI di luar negeri, dan edukasi terhadap perdagangan manusia
- Prioritas ketiga pada diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Prioritas ketiga ditujukan untuk menjaga wilayah Indonesia, secara khusus batas-batas negara.

- Prioritas keempat mengacu pada kontribusi aktif Indonesia di politik luar negeri kawasan maupun global.
- Hingga 2020, Indonesia masih memiliki kedudukan sebagai Dewan Keamanan PBB.
- Pada tahun yang sama, Indonesia mengetuai *Foreign Policy and Global Health* (FPGH) dan mengangkat tema *Affordable Health Care*.
- Pada tahun 2020 hingga 2022, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM PBB. Oleh karenanya, perlindungan HAM dan penguatan kemitraan untuk Rencana Aksi Nasional HAM akan menjadi prioritas Indonesia.
- Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya Indonesia berkesempatan menjadi presidensi bagi konferensi G20. infrastruktur diplomasi yang kuat. Sebagai forum kerja sama ekonomi internasional, kesempatan ini dimanfaatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia dalam dan pasca masa pandemi Covid-19. Sebagai presidensi, Indonesia memiliki kapasitas untuk menuntun arah agenda pembahasan G20 pada kepentingan ekonomi nasional. Amanah ini adalah sebuah kebanggaan mengingat Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20, dan mampu menjadi presidensi.
- Pada 2023, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN.
- Prioritas plus satu merujuk pada **penguatan infrastruktur diplomasi Indonesia**. Di dalamnya akan termasuk juga: “Reformasi Birokrasi; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Pembangunan Infrastruktur Fisik Diplomasi; Penguatan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika; dan Transformasi Digital”, seperti tercatat dalam Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia 2019-2024 oleh Menteri Retno. Hal yang terakhir disebutkan adalah penting untuk menjaga aktualitas diplomasi Indonesia pada era digital.
- Permasalahan global antara lain adalah
 - a. Isu *Rakheine State*,
 - b. konflik di Afghanistan,
 - c. perundingan Laut Cina Selatan,
 - d. kondisi pandemi global,
 - e. invasi Rusia ke Ukraina

4. GERAKAN NIR-ALIANSI NEGARA-NEGARA DI DUNIA

Sumber Wikipedia menyajikan artikel *Non-Aligned Movement*, antara lain mengungkapkan bahwa *Non-Aligned Movement* (NAM) adalah sebuah forum bukan-aliansi-resmi 120 negara yang terkait dengan atau berseberangan dengan berbagai jenis kumpulan kekuatan (power block) atau / aliansi-resmi negara-negara tertentu, misalnya Pakta Warsawa dan NATO.

Gerakan Nir-Aliansi (*Non-Aligned Movement*) dibentuk tahun 1961 di Yugoslavia melalui inisiatif Presiden Yugoslavia; Josip Broz Tito, Perdana Menteri India; Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir; Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana; Kwame Nkrumah, dan Presiden RI; Soekarno, berdasar Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, dengan tujuan versi Fidel Castro pada *Havana Declaration of 1979*; Gerakan Nir-Aliansi dibentuk untuk menjamin kemerdekaan nasional tiap-bangsa, integritas teritorial dan keamanan negara nir-aliansi dalam perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme dan rasisme, dan semua bentuk serangan negara-asing atau blok-politik kumpulan-negara tertentu, penjajahan, pendudukan, dominasi, campur-tangan atau hegemoni.

Negara nir-aliansi mencakupi dua-pertiga anggota PBB atau 55% populasi dunia, terutama negara-negara dalam rumpun negara berkembang.

Sejarah mencatat, Gerakan Nir-Aliansi meraih kinerja-terbaik tahun 1950-1960, dimana kebijakan internasional nir-aliansi menghasilkan dekolonialisasi, pelucutan-senjata, oposisi terhadap rasisme dan politik apartheid Afrika-Selatan, dengan kebebasan berteman dekat & bekerjasama dengan AS, Rusia dan/atau RRC, sejak akhir perang dingin 1991 menjadi lebih terfokus pada hubungan multilateral berkesatuan di antara negara-negara berkembang terumata pada tataran Selatan-Global (*Global South*).

5. SEJARAH KINERJA LN NKRI

Tika Vidya Utami, 2022, menyajikan artikel berjudul *4 Forum Kerja Sama Internasional yang Diikuti Indonesia, Begini Sejarahnya*, sumber Okezone, antara lain menyatakan bahwa kerja sama internasional di mana Indonesia aktif di dalamnya adalah sebagai berikut.

a. PBB

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) merupakan salah satu organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Indonesia juga berperan aktif di dalamnya.

PBB secara resmi didirikan pada 24 Oktober 1945. Adapun tujuan didirikannya PBB adalah mewujudkan perdamaian dunia serta kerja sama negara anggota PBB.

Lima tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada September 1950. Peran Indonesia di PBB antara lain dengan mengirimkan pasukan Garuda ke daerah konflik hingga menjadi pelopor gerakan non-blok.



Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB pada 1974.

b. G20

G20 merupakan kerja sama multilateral yang terdiri 19 negara serta Uni Eropa. G20 didirikan pada 1999 dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan global yang berkelanjutan, inklusif, kuat, serta seimbang.

Indonesia menjadi anggota G20 sejak terbentuknya G20 pada 1999. Diketahui, Indonesia adalah satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara.

Di tingkat G20, Indonesia sering membawa kepentingan yang dihadapi negara berkembang pada forum G20. Pada G20 2022, untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20.

c. ASEAN

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah organisasi internasional yang beranggota negara-negara di Asia Tenggara.

Istilah asosiasi harap dibedakan dengan istilah federasi. ASEAN adalah sebuah asosiasi negara-negara Asia Tenggara tertentu, AS adalah sebuah negara berbentuk Federasi (federal

state) membawahi provinsi, negara (negara bagian?) , wilayah regional yang masing-masing berkepemerintahan-mandiri.

Penggunaan **istilah asosiasi** terlihat pada berbagai nomenklatur lazim digunakan di muka-bumi seperti ; Country Association, Trade association, Community association, Cooperative association, Savings association, Limited cooperative association, Business association, Homeowners association, Master association, Owners Association, Member Association, Cooperating country national professional association, Health planning region, Bona fide association recognised trade union or staff association, Indigenous Peoples Planning Framework local planning authority, Major Country Hispanic American , Urban Coordinating Council , Empowerment Neighborhood Person-centered planning Cooperating country , Home Country Indigenous Peoples Plan international carriage, College board .

Pada ranah publik, istilah asosiasi (mis.Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Asosiasi Notaris, Asosiasi Pedagang Pasar Baru) baur dengan berbagai (1) istilah institut (mis.Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang **berbentuk-hukum asosiasi** menurut UU AP), (2) istilah persatuan (mis, Persatuan Guru RI, Persatuan Orang-Tua Murid) , (3) istilah organisasi (mis.Organisasi Ekstra Kurikuler/OSIS, Ormas) , dan (4) istilah ikatan (IDI, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Adu Domba Indonesia (IAI) Cianjur, Ikatan Notaris, dll), dan (5) LSM. Sebagai studi kasus, untuk profesi Notaris, sejarah mencatat berbagai organisasi seperti PERNORI (Persatuan Notaris Reformasi Indonesia) , HNI (Himpunan Notaris) dan ANI (Asosiasi Notaris Indonesia) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Sumber *Legal Dictionary* menyajikan artikel berjudul *Association Definition and Legal Meaning* , antara lain menjelaskan bahwa kata-benda asosiasi bermakna badan komersial atau non-komersial yang didirikan sekelompok individu/badan secara formal/hukum/tradisi atau secara informal karena latar-belakang, sebab, kegiatan, tujuan / kepentingan yang sama , asosiasi dapat mengambil bentuk sebuah organisasi-sosial apapun misalnya perkumpulan sepak-bola. Istilah hukum serupa dengan asosiasi adalah korporasi/perseroan terbatas, kerekanan/partnership, dan koperasi.

Puja Mondal, menyajikan artikel berjudul *Association: Definition, Characteristics and Relationship with other Concepts*, pada pokoknya mengungkapkan bahwa berbagai organisasi kemasyarakatan non-pemerintahan (NGO) dibentuk untuk mencapai kepentingan-bersama dan/atau tujuan/kemaslahatan yang-sama setiap anggotanya, yang biasanya tak-dapat dilakukan sendiri-sendiri , yang lebih efektif kalau aksi dilakukan bersama-sama dan/atau dalam-bentuk kerja-sama antar-anggota, dengan keanggotaan bersifat bebas masuk dan bebas-keluar sebagai anggota.

Indonesia merupakan salah satu pendiri Asosiasi ASEAN, pada awalnya Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Pada 8 Agustus 1967, ASEAN secara resmi di dirikan di Bangkok, Thailand.

Pada tingkat ASEAN, Indonesia berperan dalam membantu menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Pada 1988, Indonesia turut mendamaikan Perang Kamboja dan mengajukan gagasan ASC (*Asean Security Community*). ASC merupakan komunitas keamanan melalui komunitas politik-keamanan ASEAN. Indonesia terpilih menjadi Ketua Asosiasi ASEAN periode tahun 2023.

d. APEC

APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) merupakan forum kerja sama antara 21 negara di bidang ekonomi untuk wilayah Asia Pasifik. Didirikan pada 1989, APEC bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik.

Indonesia sebagai negara anggota APEC terlibat aktif di dalamnya. Diketahui, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KKT APEC pada tahun 1994 dan 2013.

Devi Ari Rahmadani, 2023, menyajikan artikel berjudul *5 Peran Indonesia dalam APEC*, antara lain mengungkapkan bahwa tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik dengan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan yang masuk dalam anggota APEC.

APEC dibentuk untuk meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas ekonomi anggota APEC, tertuang pada dokumen visi jangka Panjang APEC Putrajaya Vision 2040 tersepakati tahun 2020. Adapun tujuan atau visi yang ingin dicapai pada tahun 2040 adalah sebagai berikut: "*Our vision is an open, dynamic, resilient and peaceful Asia-Pacific community by 2040, for the prosperity of all our people and future generations.*"

Peran Indonesia dalam APEC adalah sebagai mitra kebijakan ekonomi sesama anggota APEC, mendorong pembangunan, perdagangan dan investasi kewilayahan APEC nan-berkeadilan, berkelanjutan terfokus pada berbagai isu-khusus seperti isu ketahanan pangan, isu kelautan, dan isu peran perempuan dalam perekonomian, pencetus gagasan mewujudkan forum konsultasi APEC yang jujur, adil, bebas, dan saling membantu, tanpa peduli perbedaan tingkat kemajuan ekonomi tiap bangsa, perumus *Bogor Declaration* dan *Bogor Goals* yang ditetapkan pada 15 November 1994 cq larangan pembentukan blok perdagangan tertutup, APEC mewujudkan sistem perdagangan bebas yang saling menguntungkan, pendorong terbentuknya ECOTECH (*Economic and Technical Cooperation*). ECOTECH merupakan rancangan sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi senjangan-sosial melalui pembangunan kapasitas SDM negara anggota APEC.

Berbagai Sekjen PBB banyak sekali memberi pujian bagi NKRI dan kinerja pimpinan negara NKRI dalam ikut membangun kesejahteraan dunia. Wikipedia menyajikan artikel berjudul *Daftar tanda penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa*, antara lain mengungkapkan bahwa di bawah ini medali penghargaan yang dikeluarkan PBB untuk anggota militer, polisi atau sipil yang turut dengan misi perdamaian. Nama penghargaan yang ditandai * di belakangnya menunjukkan keikutsertaan Indonesia.

1. MINUGUA
2. MINURCA
3. MINURSO
4. MONUC
5. ONUC*
6. ONUCA
7. ONUMOZ*
8. ONUSAL
9. UNAMET / UNTAET
10. UNAMIC*
11. UNAMIR
12. UNAVEM

13. UNDOF
14. UNEF
15. UNEF II*
16. UNFICYP
17. UNIFIL
18. UNIMOG*
19. UNIKOM*
20. UNHQ
21. UNMEE
22. UNMIBH*
23. UNMIH / UNSMIH / UNTMIH / MIPONUH / MICAH
24. UNMIK
25. UNMOGIP
26. UNMOP*
27. UNMOT*
28. UNOMIG*
29. UNOMIL
30. UNOMSIL / UNAMSIL*
31. UNOMUR
32. UNOSOM*
33. UNPREDEP*
34. UNPROFOR*
35. UNPSG*
36. UNSSM
37. UNTAC*
38. UNTAES*
39. UNTAG*
40. UNTEA
41. UNTSO
42. UNYOM

Fahri Zulfikar - detikEdu , 2022, menyajikan artikel berjudul *4 Peran Indonesia dalam PBB & Hubungan Internasional*, antara lain menyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) merupakan organisasi internasional yang didirikan oleh empat negara besar, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan RRT. PBB memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kerja sama antarnegara anggota. PBB berdiri secara resmi pada 24 Oktober 1945 dan bermarkas besar di New York, Amerika Serikat.

Mengutip buku IPS TERPADU oleh Sri Pujiastuti, dan kawan-kawan, Indonesia menjadi anggota PBB sejak 28 September 1950 dan merupakan anggota ke-60. Pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebagai protes atas masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada 28 September 1966, Indonesia pun kembali menjadi anggota PBB.

Adapun peran Indonesia dalam PBB antara lain:

A. Peran Indonesia dalam PBB

Mengutip buku IPS TERPADU oleh Sri Pujiastuti, dan kawan-kawan, Indonesia menjadi anggota PBB sejak 28 September 1950 dan merupakan anggota ke-60.

1. Indonesia ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia
2. Indonesia mengirim pasukan Garuda ke daerah-daerah konflik, seperti Timur Tengah (1957) Vietnam (1973), Bosnia (1993-1995), dan Libanon (2006).
3. Indonesia mengirim Mohammad Roem sebagai ketua delegasi RI pertama dalam Sidang Umum PBB
4. Indonesia juga merasakan peran PBB dalam mengusahakan kemerdekaan Indonesia. Peran PBB itu terlihat dalam pembentukan KTN (Komisi Tiga Negara) yang mengawasi Perjanjian Renville, mengutus UNCI (United Nations Commissions on Indonesia) dalam menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, mengirim pasukan UNSF (*United Nations Security Forces*) untuk menjaga keamanan wilayah Irian Barat ketika penyelesaian masalah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda berlangsung.

B. Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional

Selain peran dalam PBB, Indonesia juga memiliki peran dalam hubungan internasional. Berikut peran Indonesia dikutip dari buku 'Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas XI' oleh Tim Ganesha Operation.

1. Mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara lain yang menjalin kerja sama dengan Indonesia.
2. Mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota *Association of SouthEast Asian Nations* (ASEAN).
3. Mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area (AFTA) di kawasan negara anggota ASEAN.
4. Peran Indonesia lainnya dalam perdamaian dunia dalam bentuk hubungan internasional yakni turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari dan ke luar Indonesia.

Sebagai kelengkapan informasi, penulis memilih sumber sebagai berikut. Siti Nue Aeni, 2022, menyajikan artikel berjudul *Peran Indonesia dalam PBB untuk Mewujudkan Perdamaian Dunia*, antara lain mengungkapkan bahwa peran Indonesia dalam PBB untuk mewujudkan perdamaian dunia menjadi bukti penerapan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1950 tepatnya tanggal 28 September. Walaupun pernah keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. Penyebab Indonesia keluar dari keanggotaan PBB yaitu sebagai protes diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Satu tahun kemudian tepatnya pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB hingga saat ini.

Dalam buku "PPKn Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK" diterangkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam organisasi dunia ini disepakati oleh seluruh negara anggota pada saat ini. PBB dan Indonesia memang memiliki kedekatan emosional dan sejarah yang cukup panjang. PBB secara konsisten mendukung Indonesia menjadi negara merdeka, berdaulat, dan mandiri. PBB turut membantu Indonesia pada era revolusi fisik seperti saat Agresi Militer

Belanda 1. PBB juga membentuk Komisi Tiga Negara yang berhasil membawa Indonesia – Belanda ke Perundingan Renville. Saat terjadi Agresi Militer Belanda 2, PBB membentuk UNCI yang berhasil mempertemukan Indonesia – Belanda dalam Perundingan Roem Royen.

Peran Indonesia di PBB sebagai anggota PBB, Indonesia juga tergabung dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, yaitu

- Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC),
- Organisasi Buruh Internasional (ILO),
- Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

Selain tergabung dalam beberapa organisasi dunia, peran Indonesia dalam PBB antara lain

- Mengirimkan Pasukan Garuda Indonesia diketahui sudah sejak lama mengirimkan kontingen Garuda untuk turut serta dalam perdamaian dunia. Pasukan Garuda mengembang misi perdamaian PBB di beberapa negara yang sedang mengalami konflik.
- Pelopor Gerakan Non Blok (GNB) Gerakan Non Blok adalah organisasi dunia yang di dalamnya berisikan negara-negara yang tidak beraliansi atau berpihak kepada kekuatan besar apapun. Dengan kata lain, Gerakan Non Blok merupakan perkumpulan negara yang bersikap netral. Indonesia menjadi salah satu pelopor gerakan ini. Gerakan Non Blok berupaya meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin antara Blok Barat dan Timur.
- Mensponsori Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting (JIM I) bulan Juli 1988 Peran Indonesia dalam PBB juga turut aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting (JIM I) ada bulan Juli 1988. Kegiatan ini berhasil menemukan penyelesaian konflik di Kamboja yaitu penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Dalam kegiatan ini juga mengupayakan pencegahan rezim Pol Pot yang sudah banyak membantai rakyat Kamboja.
- Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak empat kali. Periode pertama pada 1974 – 1975. Periode kedua tahun 1995 – 1996. Dan periode ketiga pada tahun 2007 – 2009. Periode keempat pada 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Selama menjadi anggota tidak tetap DK, Indonesia berperan menengahi, menjembatani, dan membentuk konsensus di antara para anggota Dewan Keamanan PBB dan negara anggota PBB lainnya.
- Menjadi Anggota Dewan HAM Selain menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya. Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM pada tahun 2006, kemudian terpilih lagi untuk periode 2007 – 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Dalam jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 37, Maret 2019, disebutkan ada empat fokus Indonesia dalam menjalankan tugas keanggotaannya, yaitu
 - a. Berupaya memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan cara meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk kontribusi kaum wanita.
 - b. Berupaya meningkatkan sinergi antara DK PBB dan organisasi di kawasan Asia Pasifik dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.
 - c. Mendorong kemitraan global untuk mencapai sinergi penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Khususnya agenda Sustainable Development Goals (SDGs) PBB 2030

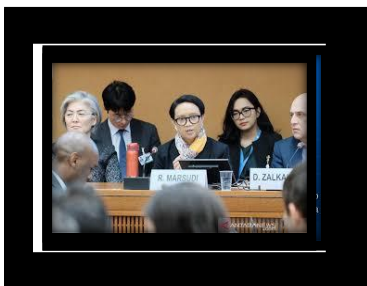
- d. Mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk mengurangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme. Indonesia juga menekan fokus dan atensi politik luas negerinya terhadap isu Palestina.

Sebagai tambahan informasi, Penulis memilih sumber sebagai berikut. Rosi Oktari, 2020, menyajikan artikel berjudul *Peran Indonesia Kini di Kancah Internasional*, Sumber Indonesiabaik.id, mengungkapkan antara lain bahwa peran Indonesia di dunia internasional melalui PBB secara terhormat sudah menempatkan Indonesia dalam beberapa peran penting. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ke-60 pada 28 September 1950. Sejak pertama bergabung Indonesia telah banyak berkontribusi bagi PBB beserta program-programnya. Sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian), Dewan HAM PBB, Dewan Keamanan PBB dan lainnya.

Beberapa peran penting yang masih berjalan di antaranya;

1. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) - (2021-2023)

Indonesia memperoleh 186 suara dari total 190 suara. Selain Indonesia, Jepang (185 suara) dan Kepulauan Solomon (187 suara) juga terpilih mewakili Kelompok Asia-Pasifik.



Kemenangan Indonesia terpilih menjadi anggota ECOSOC memberikan komitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendorong upaya pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2030. Indonesia akan terus berupaya meningkatkan peran dalam pembahasan isu-isu strategis terutama pada Badan-Badan

Khusus di bawah ECOSOC di antaranya FAO, WHO, IMO, ICAO, dan IAEA.

Terpilihnya Indonesia saat ini merupakan yang ke-12 menjadi anggota ECOSOC setelah terakhir pada periode 2012-2014. Sebelumnya Indonesia menempati posisi tersebut pada periode 1956-1958; 1969-1971; 1974-1975; 1979-1981; 1984-1986; 1989-1991; 1994-1996; 1999-2001; 2004-2006; dan 2007-2009.

2. Dewan HAM PBB - (2020-2022)

Indonesia berhasil memperoleh dukungan suara dari 174 negara dan terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Terpilihnya Indonesia merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM global tidak hanya di tingkat global, melainkan juga di tingkat regional dan nasional. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak empat kali; pada periode 2006-2007 selaku *founding member*. Kemudian Indonesia terpilih kembali untuk masa jabatan 2007-2010, 2011-2014, kemudian 2015-2017 sebelum terpilih lagi pada tahun ini.

3. Dewan Keamanan PBB - (2019-2020)

Menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Indonesia telah memenuhi janji kampanyenya untuk menjadi a true partner for world peace dengan mengedepankan pendekatan konstruktif dan menjadi penghubung negara-negara anggota DK dalam isu-isu yang sensitif. Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukanlah hal baru baru Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

6. PERAN NKRI PADA G20

Konferensi Tingkat Tinggi G20 New Delhi 2023 adalah pertemuan kedelapan belas yang akan datang dari Kelompok Dua Puluh, pertemuan puncak yang dijadwalkan berlangsung di Pragati Maidan, New Delhi pada tahun 2023. Kepresidenan India dimulai pada 1 Desember 2022, menjelang KTT pada kuartal keempat tahun 2023.

Peranan NKRI sebagai pimpinan-berkala/ketua-berkala G20 adalah sebagai berikut. Muhamad Rizkiana Gumilang , 2022, menyajikan artikel berjudul *Manfaat Presidensi G20 Bagi Indonesia* , sumber Depkeu, antara lain mengungkapkan bahwa Forum G20 merupakan forum antar negara yang terbentuk ketika krisis ekonomi melanda dunia pada tahun 1999. Saat pembentukannya yang pertama forum tersebut bernama G7. Dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Tujuan utama dibentuknya G20 adalah untuk menemukan solusi bersama atas kondisi ekonomi global. Forum G20 merepresentasikan 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 2/3 populasi dunia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya forum ini dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun sejak 2008, G20 menghadirkan Kepala Negara dalam KTT dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Anggota G20 terdiri negara-negara dari berbagai kawasan di dunia, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brazil, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa.

Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariat atau ketua tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota, yang berganti setiap tahun. Dalam menjaga fungsi koordinasi dalam kesinambungan rencana strategis, terdapat Anggota Troika G20 yang terdiri dari Indonesia sebagai negara presidensi berjalan, Italia sebagai negara presidensi sebelumnya, dan India sebagai negara presidensi berikutnya. Sebagaimana ditetapkan pada Riyadh Summit 2020, Indonesia akan memegang presidensi G20 pada 2022, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma (30-31 Oktober 2021). Di tahun 2022 untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20. Dalam forum ini Indonesia adalah satu-satunya wakil dari ASEAN, menjadi satu dari sembilan negara berkembang, serta menjadi negara anggota dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan tema besar Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu "*Recover Together, Recover Stronger*". Melalui tema tersebut, Indonesia mengajak seluruh negara di dunia untuk saling bahu-membahu, mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Tema tersebut kemudian diturunkan ke dalam berbagai agenda atau isu dalam dua jalur yakni *jalur sherpa* dan *jalur keuangan*. Dalam jalur keuangan yang dipimpin oleh Kementerian keuangan dan Bank Indonesia, Presidensi G20 Indonesia membawa enam agenda prioritas, yaitu

- Exit Strategi (jalan keluar) untuk mendukung pemulihan yang adil,
- Pembahasan *scarring effect* (dampak pandemi) untuk mengamankan pertumbuhan masa depan,
- Sistem Pembayaran di Era Digital, Keuangan Berkelanjutan, Inklusi Keuangan: Digital & UKM, dan
- Perpajakan Internasional.
- Membahas sepuluh agenda warisan yang merupakan isu global dari Presidensi G20 sebelumnya.

Secara nasional NKRI, terdapat tiga agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia yaitu:

- i) Arsitektur kesehatan global;
- ii) Transformasi ekonomi digital;
- iii) Transisi energi.

Dalam agenda keuangan yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Presidensi G20 Indonesia akan membawakan enam agenda prioritas, yakni *exit strategy* untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan *scarring effect* untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia 2022 diarahkan untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan G20. Apabila diklasifikasikan terdapat dua manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia, yaitu:

1. Manfaat Strategis
 - a. G20 merupakan forum strategis untuk membahas isu-isu global: Kesehatanglobal, stabilitas keuangan, climate change.
 - b. Showcasing usaha pemulihan ekonomi Indonesia dalam masa pandemic Covid-19.
 - c. Showcasing peran Indonesia sebagai pemimpin pertemuan yang akan mendukung terbentuknya kebijakan global.
2. Manfaat Langsung
 - a. Meningkatkan devisa dari kunjungan delegasi ke Indonesia.
 - b. Menghidupkan sektor pariwisata/hospitality.
 - c. Mendukung peningkatan konsumsi domestik.
 - d. Mengoptimalkan peran UMKM.
 - e. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Demi kesuksesan penyelenggaraan forum G20 di Indonesia, diharapkan seluruh warga Indonesia peduli dan turut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang berhasil dirumuskan dalam pertemuan tersebut.

Indonesia bermaksud menunjukkan *leadership* sekaligus memanfaatkan peluang bahwa peningkatan perekonomian dengan arah transisi energi, artinya memprioritaskan investasi-

investasi baru yang lebih ramah lingkungan sekaligus menjadi pemimpin bagi rencana perubahan tersebut di dunia.

Situs Kementerian Sekretariat Negara NKRI, 2017, menyajikan artikel berjudul *Presiden Jokowi Ingatkan Komitmen Pemimpin Negara G20 Agenda 2030*, antara lain mengungkapkan bahwa

- Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Indonesia menyampaikan komitmen tinggi dalam pelaksanaan Agenda 2030, di dalam negeri dengan Peraturan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional bagi implementasi SDGs.
- Indonesia menggunakan forum PBB untuk melaporkan implementasi Agenda 2030 melalui Voluntary National Review.
- Presiden juga menyampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Indonesia akan menjadi bagian dari solusi dengan melakukan berbagai langkah antisipasi perubahan iklim antara lain dengan
 - a. Memperpanjang moratorium pembukaan lahan baru,
 - b. Membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memperbaiki dua juta hektar gambut dalam lima tahun,
 - c. Memperkuat upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
 - d. Indonesia juga melakukan pengurangan sampah dengan konsep *reduce-reuse-recycle* sebesar 30 persen pada tahun 2025 dan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (*marine plastic debris*) sebesar 70 persen hingga tahun 2025.
 - e. Dalam proses transisi energi, Indonesia berkomitmen memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan meningkatkan penggunaan *biofuels* dengan tetap berkomitmen pada mitigasi perubahan iklim.
 - f. Penegakan agar negara-negara G20, tidak boleh mundur dari komitmen Agenda 2030 yakni tentang pengendalian perubahan iklim dan transisi energi.
 - g. Untuk tema 'perdagangan bebas dan pertumbuhan', dibutuhkan reformasi pajak, mendukung upaya OECD dan negara G20 dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), memfasilitasi Automatic Exchange of Information (AEOI), dan mengimplementasi Multilateral Instrument (MLI). AEOI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat. Indonesia baru menyelesaikan program *tax amnesty* sebagai bagian reformasi perpajakan.

Situs Departemen Keuangan menyajikan artikel berjudul *G20 Blueprint for Scaling Up InfraTech Financing and Development Diterbitkan untuk Mendukung Implementasi Agenda InfraTech*, antara lain mengungkapkan bahwa G20 mendukung Blueprint G20 untuk meningkatkan Pembiayaan dan Pengembangan InfraTech. Blueprint tersebut dikembangkan untuk memungkinkan sektor publik dan swasta untuk berkolaborasi dan meningkatkan investasi ke InfraTech sebagai integrasi teknologi digital dan non-digital dengan infrastruktur fisik untuk menghasilkan aset yang efisien, terhubung, dan tangguh. Memanfaatkan solusi teknologi inovatif di seluruh siklus hidup infrastruktur dapat memobilisasi modal swasta. InfraTech memiliki potensi yang jelas untuk mencapai prioritas infrastruktur jangka panjang dengan

1) meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, meningkatkan nilai ekonomi, sosial & lingkungan, dan membentuk kembali permintaan infrastruktur, dan menciptakan pasar baru;

2) mendukung Peta Jalan G20 2018 untuk Infrastruktur sebagai Kelas Aset dengan menyediakan data yang disempurnakan, alat serta memfasilitasi kemampuan investor untuk membuat keputusan yang tepat; dan

3) memungkinkan jalur transisi infrastruktur.

Blueprint tersebut menguraikan serangkaian tindakan berbasis bukti, sukarela, tidak mengikat untuk mempromosikan enam elemen dalam Agenda InfraTech G20, dengan tujuan untuk memungkinkan sektor publik dan swasta berkolaborasi dan meningkatkan investasi ke dalam InfraTech.

Empat pilar (Kebijakan, Komersial, Teknologi, Keuangan) disorot sebagai area peluang untuk memajukan upaya G20 dalam meningkatkan investasi InfraTech. Untuk mendukung pengembangan Cetak Biru ini, Global Infrastructure Hub (GI Hub) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menyiapkan *Stocktake of Approaches on Scaling up InfraTech*. Inventarisasi menyajikan studi kasus yang mencakupi fokus nasional dan internasional untuk solusi Infratech yang mungkin dapat direplikasi. G20 menyampaikan terima kasih kepada GI Hub dan AIIB atas dukungan mereka dalam mengembangkan Cetak Biru dan inputnya.

Desliana Maulipaksi, dalam Situs Kemendikbudristek, 2022, menyajikan artikel berjudul *Negara G20 Sepakati Empat Agenda Prioritas Pendidikan yang Diangkat*



Kemendikbudristek, antara lain mengungkapkan bahwa Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Pendidikan G20 atau *First G20 Education Working Group (EdWG) Meeting* berakhir pada Jumat (18/3/2022) di Yogyakarta, dengan hasil komitmen-bersama untuk mendukung empat agenda prioritas bidang pendidikan yang diangkat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan diharapkan dapat menjadi solusi bersama untuk bangkit dari situasi pandemi.

Keempat agenda tersebut adalah

- Pendidikan Berkualitas untuk Semua,
- Teknologi Digital dalam Pendidikan,
- Solidaritas dan Kemitraan, serta
- Masa Depan Dunia Kerja Pasca Covid-19.

Konferensi Pers *First G20 Education Working Group Meeting*, Jumat (18/3/2022) mengungkapkan

- Pertama, Pendidikan Berkualitas untuk Semua. Salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 adalah memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- Kedua, Teknologi Digital dalam Pendidikan. Pemerataan akses terhadap teknologi digital merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan berkualitas universal. Selain mendukung pencapaian akademik, perangkat teknologi digital yang inovatif perlu diciptakan untuk mendorong interaksi siswa-guru yang

lebih baik, meningkatkan kesejahteraan, dan merangsang perkembangan sosial emosional.

- Ketiga, Solidaritas dan Kemitraan. Pandemi Covid-19 telah menyadarkan semua negara, terutama tentang perlunya membangun kembali sistem pendidikan yang tangguh. Dukungan untuk komunitas belajar selama pandemi sebagian besar dibangun di atas solidaritas. Keempat, Masa Depan Pekerjaan Pasca Covid-19. Sifat pekerjaan kini telah mengalami perubahan mendasar, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Kemajuan teknologi digital dan hiperkonektivitas yang ada telah menciptakan bentuk baru kerja jarak jauh dan kolaborasi. Pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi perlu ditransformasikan untuk dapat menjawab tantangan perubahan tersebut. Komitmen peningkatan pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi pun memiliki peran untuk mempromosikan akses inklusif ke pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Kementerian Perdagangan berfokus pada

- *Koherensi kebijakan antara perdagangan, investasi, dan industri untuk mendukung keberhasilan SDGs, sebagai jalan terbaik untuk menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, dan tantangan dewasa ini.*
- Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), peran sistem perdagangan multilateral untuk akselerasi pencapaian SDGs, kemudian respons perdagangan, investasi dan industri terhadap pandemi dan arsitektur kesehatan global.
- Isu perdagangan digital dan rantai nilai global berkelanjutan, mendorong investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global, serta industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui Industri 4.0.
- G20 perlu menjaga kontribusi integral pada sistem perdagangan multilateral untuk mendukung SDGs. *Perdagangan antarnegara dapat mendukung upaya memerangi kemiskinan dan fokus pada tujuan-tujuan iklim (climate goals), G20 diharapkan berkontribusi terhadap perbaikan rezim perdagangan untuk kepentingan semua negara dan mendukung pencapaian SDGs.*
- Terkait arsitektur kesehatan global, forum diskusi mendorong peran sektor perdagangan, investasi, dan industri untuk memperkuat kapasitas produksi, manufaktur, dan distribusi vaksin. G20 perlu menunjukkan kemampuannya mengatasi hambatan-hambatan utama bagi kesetaraan akses vaksin COVID-19, produk-produk esensial, serta transfer teknologi.
- Anggota G20 juga diharapkan berkolaborasi untuk memastikan perdagangan digital yang inklusif dan mampu menjembatani kesenjangan digital, termasuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terintegrasi dengan rantai nilai global. *Masa depan rantai nilai global akan bergantung pada seberapa efektif negara-negara memanfaatkan peluang-peluang baru yang tercipta dari pemanfaatan teknologi dan perdagangan digital.*
- Indonesia mendorong kolaborasi transisi energi bagi investasi yang berkelanjutan. Upaya ini ditempuh melalui pengembangan energi terbarukan dan hilirisasi industri.
- Sementara itu, dalam kerangka transformasi digital, kerja sama antara anggota G20 difokuskan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya peluang Industri G20 sebagai dukungan bagi industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia , 2021, menyajikan artikel berjudul *Menteri LHK: G20 Menjadi Katalis Global Pencapaian SDGs dan Pemulihan Lingkungan*, antara lain mengungkapkan bahwa

- Negara-negara G20 berserikat untuk menyelesaikan tantangan-tantangan lingkungan secara seimbang dan holistik, sambil membangun dunia pasca pandemi yang lebih tangguh dan inklusif berdasarkan keadaan dan prioritas kebangsaan masing-masing.
- G20 dapat menjadi katalis yang mempercepat pemulihan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik
- Indonesia tidak hanya mengajak, namun juga telah mengimplementasikan ambisi yang sangat kuat dalam upaya mencapai SDG melalui aksi-aksi yang sudah memperlihatkan hasil dalam perlindungan sumber daya alam nasional NKRI. Data statistik menunjukkan laju deforestasi Indonesia pernah mencapai 3,5 juta hektar per tahun antara tahun 1996 dan 2000, lalu turun menjadi 0,44 juta pada 2019 dan semakin berkurang menjadi 0,115 juta hektar pada tahun 2020. NKRI membuat program memperbaiki lahan terdegradasi dengan mempercepat upaya rehabilitasi dengan target pada tahun 2030 dapat tercapai net zero land degradation. Indonesia berhasil merehabilitasi lahan kritis secara signifikan, antara lain selama 5 tahun terakhir, seluas 1,42 juta hektar telah dipulihkan dan tambahan target 600 ribu hektar mangrove hingga tahun 2024, NKRI mengatur ekosistem karbon biru melalui peningkatan pengelolaan Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.
- Dari aspek siklus-ekonomi Indonesia telah mendorong pengembangan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, serta mendorong perusahaan manufaktur untuk meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah.
- Dalam upaya mewujudkan kota berkelanjutan, Indonesia sudah efektif melaksanakan Roadmap Nasional Ekonomi Sirkular 2020-2024, dan meluncurkan Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengelolaan Sampah di seluruh Indonesia periode 2017-2025, dengan target 100% sampah dikelola dengan baik pada tahun 2025, yaitu 30% dikurangi dan 70% dikelola secara sistematis.
- Di sisi pembiayaan, ia menyebutkan jika Indonesia telah mengembangkan Roadmap “Keuangan Berkelanjutan 2025”. Selanjutnya selama 3 (tiga) tahun belakangan, Indonesia telah memperkenalkan instrumen keuangan inovatif untuk alam, ekonomi, dan masyarakat, seperti Sukuk Hijau, SDG Bond dan Sukuk SDG. Demikian juga keuangan campuran SDG Indonesia One, untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi SDG dan pemulihan bencana di Indonesia.

7. PERAN NKRI PADA ASOSIASI ASEAN

NKRI diangkat menjadi pemimpin Forum ASEAN tahun 2023. Tiga isu utama yang diusung Indonesia sebagai presidensi dalam KTT G20 2022 adalah transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.

Situs Menkoinfo, 2023, menyajikan artikel berjudul **Isu Prioritas G20 Dibawa ke Keketuaan ASEAN 2023**, antara lain mengungkapkan bahwa per 1 Januari 2023, Indonesia secara efektif akan memulai kepemimpinannya di ASEAN. Selama tahun kepemimpinan, Indonesia akan menindaklanjuti tiga isu prioritas di G20. Hal ini menunjukkan bahwa misi global untuk pulih bersama, pulih lebih kuat tidak terbatas dengan berakhirnya Presidensi G20.

Sumber BI, 2023, menyajikan artikel berjudul ASEAN Indonesia 2023, antara lain mengungkapkan bahwa ASEAN merupakan singkatan dari *The Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand (ASEAN 5) melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Oleh sebab itu, 8 Agustus diperingati sebagai Hari ASEAN (*ASEAN Day*).

Hingga 2021, ASEAN beranggotakan 10 anggota dengan anggota Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pada akhir KTT ASEAN 2022, Timor Leste disepakati secara prinsip menjadi anggota ASEAN kesebelas.

Indonesia telah berperan sebagai Ketua Berkala ASEAN secara resmi selama tiga kali (1976, 2003, 2011) dan menghasilkan capaian-capaian yang mendorong kemajuan ASEAN. Hasil yang dicapai pada KTT Keketuaan ASEAN sebelumnya di antaranya dituangkan dalam

- a.) Bali Concord I yang menyepakati dibentuknya ASEAN Secretariat di Jakarta dengan Sekretaris pertama dari Indonesia serta Program Aksi yang mencakup kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan penerangan, keamanan, dan peningkatan mekanisme ASEAN;
- b.) Bali Concord II yang berkontribusi pada konsep komunitas ASEAN dengan tiga pilar, serta
- c.) Bali Concord III yang memberikan sumbangsih disepakatinya peta jalan Masyarakat ASEAN pada 2015 dengan 3 Pilar (termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN), serta peran kerja sama di bidang politik keamanan kawasan, dan pengembangan ekonomi (termasuk ekonomi Asia Pasifik/RCEP).

Tema adalah “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*”

“*ASEAN Matters*” bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. ASEAN berperan penting tidak hanya bagi negara di dalam kawasan, tetapi juga bagi dunia. Baik berperan sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan.

Pada tahun 2023, Indonesia juga terfokus pada **upaya memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan**. Sebagai Ketua Asosiasi 2023, Indonesia juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Indonesia bertekad mengawal menuju ASEAN 2045, yang perlu senantiasa lebih adaptif, responsif, dan kompetitif. Semua itu harus diperjuangkan dengan cara “*ASEAN way*” yang sejalan dengan semangat kerja sama dan implementasi prinsip Piagam ASEAN.

“*Epicentrum of Growth*” bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Untuk itu, Indonesia sebagai Ketua memiliki tujuan untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi ASEAN hampir selalu berada di atas rata-rata dunia. Sementara untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan, kerja sama di ASEAN akan terus ditingkatkan, khususnya di **bidang ketahanan pangan**,

ketahanan energi, kesehatan, dan stabilisasi keuangan. Sudah saatnya ASEAN menegaskan kembali perannya sebagai pusat atau “episentrum pertumbuhan”.

Logo ASEAN Indonesia 2023 secara keseluruhan menggambarkan bola dunia sebagai representasi wadah negara-negara ASEAN dalam sebuah kesatuan yang bergerak bersama dan optimis ke arah pertumbuhan yang lebih baik dan membawa dampak positif, baik secara internal untuk kawasan maupun eksternal untuk dunia.

Peran, Kontribusi, dan Manfaat Asosiasi ASEAN adalah sebagai berikut.

- **Optik Domestik**

1. Melanjutkan keberhasilan dalam Presidensi G20 2022, Indonesia melanjutkan kembali kepemimpinan global (*global leadership*) untuk menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 dalam menjalankan perannya sebagai bagian masyarakat dunia secara bebas aktif di dalam forum regional dan dunia.
2. Indonesia memiliki peran strategis dalam wilayah ASEAN dengan potensi sumber dayanya yang mencakup jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia dan terbesar di ASEAN, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ASEAN, populasi muslim terbesar di dunia dan ASEAN, serta ekonomi terbesar di ASEAN (2021) dan salah satu dari 20 ekonomi besar dunia dalam G20, sehingga perlu memainkan peran penting di tingkat regional dan dunia.
3. Indonesia dapat menjadi etalase kepemimpinan di ASEAN dan mendorong tindakan nyata dari ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko regional dan global, seperti pemulihan pandemi, dampak perubahan iklim, disrupsi digital dan dampaknya, dampak konflik geopolitik dunia, dan juga upaya membantu negara yang menghadapi kerentanan ekonomi.
4. Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi baik di level daerah maupun nasional.
5. Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dapat mendorong promosi destinasi wisata dan produk/industri dalam negeri yang memiliki potensi keunggulan kompetitif bagi Indonesia.
6. Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dapat mendorong lebih banyak investasi dan perdagangan di sektor-sektor strategis di Indonesia.
7. Di sisi lain, Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dapat menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN, sehingga Indonesia dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju.
8. Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 juga dapat meningkatkan kerja sama di bidang pembangunan dan percepatan pemajuan ekonomi, antara lain, perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pendidikan.
9. Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dapat menjadi wadah bagi Indonesia dalam menyuarakan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional.

- **Optik Regional dan Global**

1. Melanjutkan keberhasilan dalam Presidensi G20 2022, Indonesia melanjutkan kembali peran kepemimpinan global (*global leadership*) dalam menjalankan perannya

sebagai bagian masyarakat dunia secara bebas aktif di dalam forum regional dan dunia, yang juga sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.

2. Indonesia memiliki peran strategis dalam wilayah ASEAN dengan potensi sumber dayanya yang mencakup jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia dan terbesar di ASEAN, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ASEAN, populasi muslim terbesar di dunia dan ASEAN, serta ekonomi terbesar di ASEAN (2021) dan salah satu dari 20 ekonomi besar dunia dalam G20, sehingga perlu memainkan peran penting di tingkat regional dan dunia.
3. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia telah berkontribusi signifikan dalam mengembangkan kawasan ASEAN secara strategis. Di antaranya, Indonesia telah menginisiasi pembahasan Masyarakat ASEAN 2015 melalui Bali Concord II dan III yang menjadi dasar bagi ASEAN dalam mengimplementasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (ASEAN Economic Community/AEC) 2015 sebagai bagian 3 pilarnya, serta gagasan RCEP dalam rangka meningkatkan peran strategis ASEAN pada level global.
4. Sebagai hasil dari hasil kesepakatan KTT dalam Bali Concord I, Indonesia menjadi tuan rumah bagi kantor ASEAN Secretariat (ASEC) dan sekaligus menempatkan pejabatnya sebagai Sekretaris ASEAN yang pertama. Untuk itu, Indonesia (Jakarta) dapat berperan strategis sebagai *Diplomatic Capital of Indo-Pacific* melalui keberadaan ASEAN Headquarters (ASEAN Secretariat/(ASEC), dimana Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta berada di antara dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) yang memberikan posisi strategis dari segi politik maupun ekonomi dan perdagangan internasional.



5. Ekonomi ASEAN 2021 (10 negara) merupakan ekonomi terbesar kelima di dunia, sehingga peran ASEAN menjadi strategis sebagai salah satu wilayah ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dunia.

6. Di tahun 2023 ini, pertumbuhan perekonomian global masih menunjukkan sinyal pelemahan seiring tantangan ekonomi global yang masih membayangi. Oleh karena itu, Indonesia bersama dengan negara anggota ASEAN perlu mengambil langkah kolektif dalam memperkuat kolaborasi dan kerja sama melalui 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs): *Recovery-Rebuilding, Digital Economy & Sustainability*. Peran ASEAN sangatlah penting dalam mengatasi tantangan ekonomi yang ada, dan melalui penguatan kerja sama dalam kerangka 3 PEDs tersebut, ASEAN diharapkan dapat melangkah bersama sebagai Epicentrum of Growth guna menghadapi berbagai tantangan, risiko dan masalah dunia bersama.
7. Untuk mewujudkan 3 Pilar Priorities Economic Deliverables, ASEAN akan melakukan langkah-langkah utama sebagai berikut:
 - a. *Recovery-Rebuilding*: ASEAN bertujuan untuk mengeksplorasi Policy Mix yang terkalibrasi, direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, juga demi memitigasi risiko seperti inflasi dan volatilitas aliran modal. ASEAN akan membahas kerangka analisis yang sistematis dengan mengeksplorasi implementasi IMF *Integrated Policy Framework (IPF)* dan BI *Macro-Financial Stability (MFSF)*. ASEAN juga akan menjajaki strategi diversifikasi mata uang dengan eksplorasi transaksi mata uang lokal, atau biasa disebut Local Currency Transaction (LCT) Framework. Selain itu, sistem perbankan juga harus diperkuat melalui kebijakan makroprudensial dan integrasi kerangka

perbankan demi meningkatkan stabilitas makroekonomi dan keuangan di ASEAN. Reformasi struktural di negara-negara ASEAN juga perlu diteruskan didorong, khususnya melalui hilirisasi industri dan mengatasi ketahanan pangan.

- b. *Digital Economy*: Untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kapasitas masing-masing dalam memformulasikan strategi edukasi finansial secara nasional dan meningkatkan interkoneksi sistem pembayaran regional. Dengan adanya *Regional Payment Connectivity* (RPC) Initiative yang lebih luas, ekonomi dan keuangan digital ASEAN dapat terintegrasi dan merepresentasikan ASEAN pada dunia melalui implementasi *G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments*. Selain itu, peningkatan inklusi keuangan digital juga dapat dilakukan melalui *Digital Financial Inclusion Festival* dan implementasi *Guideline to Strengthen Digital Financial Literacy in ASEAN*. Terkait isu *Central Bank Digital Currency* (CBDC), aset kripto dan keamanan siber, perlu adanya penguatan kolaborasi Bank Sentral dan Otoritas Moneter dari segi regulasi dan pengawasan dari potensi risiko yang dapat ditimbulkan.
- c. *Sustainability*: Sebagai kawasan yang paling terdampak oleh bencana alam dan risiko terkait iklim, ASEAN perlu merapatkan barisan guna mempersiapkan dan mengarah ke tujuan yang sama dalam kaitan transisi menuju ekonomi hijau, diantaranya melalui penyusunan *ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance* dan *Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk*. ASEAN secara kolektif harus melangkah bersama untuk mewujudkan skema sustainable financing dalam rangka mencapai 2030 Sustainable Development Goals dan target net-zero. Pada momen Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 ini, Bank Indonesia juga akan menginisiasi *Central Bank Policy Discussion* untuk integrasi ESG pada formulasi kebijakan dan proses bisnis bank sentral.

8. PERAN NKRI PADA FORUM APEC

Tujuan utama APEC adalah sebagai berikut. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas Ekonomi anggota. Untuk itu, telah ditetapkan suatu target "*the Bogor Goals*", sebagai hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994 dengan komitmen sebagai berikut: "... *with the industrialized economies achieving the goal of free and open trade and investment no later than the year 2010 and developing economies no later than the year 2020.*" Setiap negara anggota memiliki *focal point* pada masing-masing pilar kerja sama guna mendorong kerja sama efektif di masing-masing pilar serta mastikan bahwa berbagai pandangan dan kepentingan tercermin sepenuhnya dalam program kerja organisasi IOR-ARC. Sementara itu, mekanisme kelembagaan kerjasama dilakukan melalui pertemuan *Council of Ministers* (COM) yang diselenggarakan setahun sekali dan *Committee of Senior Officials* (CSO) yang diselenggarakan dua kali dalam satu tahun.

Prinsip Kerja Sama APEC adalah sebagai berikut. Kerja sama di APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip yaitu:

- *Consensus*, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 Ekonomi Anggota.
- *Voluntary and non-binding* yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat.
- *Concerted unilateralism*, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap Ekonomi, tanpa syarat resiprositas.
- *Differentiated time frame* yaitu bahwa setiap Ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu

Prinsip-prinsip tersebut terbukti telah membuat anggota APEC melaksanakan komitmen secara lebih efektif. Fleksibilitas yang diberikan memberikan ruang kepada anggota APEC yang beragam kapasitasnya, untuk berimprovisasi, melakukan uji coba, dan mengembangkan pelatihan bersama secara bertahap hingga memenuhi kesepakatan yang diinginkan.

Sumber lain mengungkapkan peran NKRI pada APEC, sebagai berikut. Nahma, 2020, menyajikan artikel berjudul *Jelaskan peran Indonesia dalam Asia Pacific Economic Cooperation APEC*, sumber Brainly, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

- **NKRI sebagai Ketua APEC Periode 1994**

Indonesia merupakan pemimpin APEC selama setahun dalam periode 1994. Peran ini



mengizinkan Indonesia untuk lebih banyak berpartisipasi dan mempengaruhi arah kebijakan di dalam APEC. Salah satu alasan mengapa Indonesia dipercaya menjadi pemimpin APEC pada periode 1994 adalah kemampuan Indonesia untuk bertahan di tengah krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di antara negara-negara di

kawasan Asia Pasifik.

- **NKRI sebagai Tuan Rumah Konferensi Tingkat Tinggi APEC 1994**

Pada tanggal 15 November 1994, Indonesia yang merupakan pemimpin APEC terpilih menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 1994. Kota yang terpilih menjadi lokasi KTT ini adalah kota Bogor, yaitu lebih tepatnya di Istana Kepresidenan Bogor.

- **NKRI sebagai Perumus *Bogor Declaration* dan *Bogor Goals***

Pada KTT APEC di Amerika, masih belum ada kepastian mengenai Putaran Uruguay, yaitu suatu kesepakatan mengenai arus perdagangan bebas antar negara. hingga, pada KTT APEC 15 November 1994 ditetapkanlah *Bogor Declaration* dan *Bogor Goals*. *Bogor Declaration* atau Deklarasi Bogor berisi tekad para pemimpin ekonomi APEC yang secara tegas menentang pembentukan blok perdagangan tertutup dan bertekad untuk mewujudkan suatu sistem perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Pasifik.

- **NKRI sebagai pendorong terbentuknya ECOTECH (Economic dan Technical Cooperation)**

Pada KTT APEC 15 November 1994, Indonesia mendorong terbentuknya ECOTECH di dalam dunia kerja sama ekonomi Asia Pasifik. ECOTECH merupakan suatu rancangan sistem ekonomi yang dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik yang berkelanjutan dan merata agar kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggota APEC berkurang dengan melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan institusi suatu negara anggota.

- **NKRI ikut serta mewujudkan budaya APEC.**

NKRI ikut mewujudkan melalui forum konsultasi APEC yang jujur, adil, dan bebas serta saling membantu tanpa membedakan tingkat kemajuan bangsa.

APEC memiliki tiga pengamat (observer), yaitu ASEAN Secretariat, Pacific Economic Cooperation Council (PECC), dan Pacific Islands Forum (PIF) Secretariat.

9. MENGAMATI PERKEMBANGAN BRICS

NKRI berpegang pada politik LN bebas-aktif dan menjadi promotor gerakan non-blok , sehingga penulis berpendapat tidak mungkin kabinet melanggar hukum positif cq UU politik bebas-aktif NKRI , dengan ikut-serta sebagai anggota resmi BRICS.

Dewasa ini BRICS masih sedang tumbuh membentuk jatidiri, dewasa ini kegiatan BRICS adalah pertemuan berkala tanpa misi, target, tujuan dan strategi spesifik , namun tiba-tiba membangun lembaga New Development Bank sebagai alternatif bantuan World Bank dan IMF.

Shofi ayudana, 2023, menerjemahkan sumber Reuters, pada makalah berjudul *Lebih dari 40 negara tertarik gabung BRICS* . Rencana percepatan penambahan anggota BRICS akan menjadi agenda utama dalam KTT perkumpulan yang dibentuk untuk mengimbangi dominasi Barat yang dipimpin oleh AS. Lebih dari 40 negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan kelompok negara-negara berkembang BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Selain dari 22 negara yang telah secara resmi meminta untuk bergabung, terdapat sejumlah yang sama berbagai negara yang secara informal menyatakan minat untuk menjadi anggota BRICS . Argentina, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Komoro, Gabon dan Kazakhstan telah mengutarakan minatnya untuk bergabung ke dalam organisasi tersebut.

Sejarah kelahiran BRICS sebagai berikut. Astrid Pange, 2023, menyajikan artikel berjudul *A new world order? BRICS nations offer alternative to West*, sumber Deutsche Welle, antara lain mengungkapkan bahwa Negara negara BRICS terdiri atas Brasilia, Russia, India , RRC dan Africa Selatan sebagai wakil Global Selatan (Global South) , sebagai alternatif G7. Pada awalnya, akronim BRIC (Brazil, Russia, India and China) diptakan Jim O'Neill pada tahun 2001 tatkala ia menjadi chief economist of the multinational investment bank, Goldman Sachs . Empat negara tersebut pertama kali berjumpa pada tahun 2009 di Yekaterinburg , Russia, pada tahun 2010 , Afsel dundang masuk gurp, sehingga akronim berubah menjadi BRICKS. Pada tahun 2014, BRICS membentuk New Development Bank , sebagai alternatif World Bank dan IMF , ber-inti Paket Cadangan Kontijen (*Contingent Reserve Arrangement*) untuk membantu negara-anggota kesulitan bayar-kewajiban. Pada tahun 2021, Egypt, the United Arab Emirates, Uruguay and Bangladesh ikut serta dengan investasi lebih kecil dari

setoran awal pendirian bank tersebut. South African Foreign Minister Naledi Pandor menyatakan bahwa surat minat bergabung dengan BRICS mencapai 12 negara, antara lain .Saudi Arabia , United Arab Emirates, Egypt, Algeria, Argentina, Mexico and Nigeria. PDB RRC sebesar USD 6 Triliun pada tahun 2010 , menjadi USD 18 Triliun pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi India's dari GDP \$1.7 trillion menjadi \$3.1 trillion. Anggota BRICS tak ikut serta dalam perang Rusia- Ukraina. G7 adalah forum-informal dibentuk 1975 dengan Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Kanada AS dan Uni Eropa (EU).

Ramalan perkembangan BRICS antara lain sebagai berikut. Mathew Bishop, 2022, menyajikan artikel berjudul *The BRICS countries: where next and what impact on the global economy?*, antara lain mengungkapkan bahwa sejak tahun 2000 , negara-negara pendiri BRICS mengalami pertumbuhan berbeda , sehingga sumbangan BRICS para tataran geopolitik-ekonomi masih berupa tanda-tanya. Pada dua dekade BRICS, hanya RRC berpertumbuhan-ekonomi luar-biasa, Brasilia mengalami pertumbuhan melambat masih berjuang meningkatkan derajat industrialisasi , kemajuan industrialisasi Rusia pasca-komunisme masih lambat, PDB Rusia sekitar setengah PDB Inggris. Terdapat tren peminatan meningkat untuk menjadi anggota BRICS, menimbulkan kecemasan berbebagai pemerintahan negara Barat.

Tertengarai bahwa



- Pada awalnya BRICS merupakan kumpulan ‘*rising powers*’, pudar dengan tambahan anggota baru negara bukan ‘*rising power*’.
- Besar perekonomian India sekitar seperlima RRC, sumbangan pada PDB Global menyusut.
- Tertengarai bahwa PDB RRC lebih dari dua kali dibanding seluruh jumlah PDB 4 negara BRICS lain; PDB RRC hampir USD 18 Triliun, PDB Brasilia USD 1,6 Triliun, Russia USD 1,8 Triliun, India USD 3.2 Triliun, PDB Afsel USD 400 Triliun. Walau USD 18 Triliun PDB RRC lebih kecil dibanding PDB AS USD 23 Triliun, perekonomian RRC ber paritas-daya-beli (*purchasing power parity* atau PPP) terbesar di muka bumi.
- Saudi Arabia bersistem otoritarian berkemakmuran hanya berbasis ekonomi-fosil , beraliansi dengan AS untuk bidang-keamanan, melakukan investasi ke LN , masih pada tahap modernisasi ekonomi-sosial-politik nan-lambat dan belum siap masuk era ekonomi-nonkarbon , mulai membangun aliansi ekonomi dengan RRC sambil menyadari dampaknya pada perubahan dukungan internasional & AS. Saudi Arabia makin memilih sistem makin berbasis demokrasi , modernisasi tata sosial dan mendorong emansipasi/kesetaraan gender.
- Sebagai bakalan anggota BRICS, Argentina berinflasi dan ber-utang tinggi, berpertumbuhan PDB amat bergelombang berlatar krisis keuangan 2001, mencoba ekspansi-ekonomi cq perbesaran volume ekspor era 2000-2010.
- Keanggotaan baru merupakan tambahan mobilisasi kekuatan BRICS berdasar jumlah anggota (dan jumlah populasi seluruh anggota) untuk memperkuat posisi daya-saing & daya-diplomasi dan memperbesar legitimasi serikat itu terhadap aliansi-lain , merupakan tambahan kekuatan untuk merealisasi peluang, bahkan mungkin membuka berbagai peluang baru bagi negara anggota BRICS.
- BRICS mungkin belum akli baliq. Bagi O’Neil (2021) , BRICS sekadar pertemuan bersama , sebuah organisasi yang belum terlembaga secara mendalam pada (1) aspek

misi, visi, ideologi-pemersatu tentang (2) peran BRICS & tiap-anggota dalam tataran global & regional, antara lain karena (1) besar/tingkat-perekonomian dan kinerja-raih-perekonomian dan trayektori tiap-negara amat-beragam, (2) motif/tujuan keikut-sertaan ber beda-beda, (3) kebulatan-tekad dan tingkat keterbukaan politik/ekonomi tiap negara terhadap Global & BRICS berbeda-beda, berlatar belakang (a) tingkat-kesetiaan pada *aliansi yang diikuti sekarang cq program ditengah-jalan yang tak-dapat dibatalkan*, (b) kecemasan negara-negara Barat cq AS & Uni-Eropa, serta aliansi-lain cq G7 akan kristalisasi diluar aktivitas perekonomian dan intervensi tertentu ke negara-negara di luar BRICS.

- Perang Russia-Ukraina makin menegaskan pisah - batas Timur dan Barat, berpotensi berdampak pada lembaga-keuangan (Bienkov, 2022), kebangkitan BRICS berpotensi Barat menjadi kurang-liberal (Hopewell, 2017), sebaliknya dalam tekanan-countervailing, Timur menjadi lebih-liberal (Bishop & Murray-Evans, 2020), terdapat potensi kebutuhan agenda RRT & India sebagai kekuatan Global-Selatan untuk beraliansi dengan kekuatan Global-Utara (Cooper, 2021) terkait kondisi-alamiah saling-ketergantungan dalam sistem-rantai-nilai global (Bishop & Payne, 2021 a) dalam (a) iklim keterbukaan-global, (b) tren-global pelonggaran/penurunan pemerintahan otoritarian-autarkis yang makin tak relevan-zaman, dan (c) trend atau gejala harmonisasi / eksistensi bersama globalisasi dan deglobalisasi cq menjaga keunikan-bangsa & daya-saing-bangsa, misalnya harmonisasi strategi BRICS dengan strategi ASEAN, strategi G 7 dan strategi G20, (d) menyebabkan rekalisasi-berkesinambungan tujuan & kepentingan nasional, regional dan global (Grey, 2019) cq redefinisi skala-keekonomian & pemodelan-ulang / revitalisasi / peremajaan sistem-ekonomi, sistem-pasar dan sistem-produksi tiap-negara dalam perubahan tatanan-rantai-nilai global dan sistem-jaringan nan-dinamis, menimbulkan kebutuhan (a) jenis/ kaliber pimpinan negara, (b) kabinet tiap-negara dan (c) strategi-pembangunan-berkesinambungan yang makin inkonvensional.

9.TENTANG KELOMPOK TUJUH (G7)

Yuli Nerhanisah, 2023, menyajikan artikel berjudul *Pertemuan Bilateral Indonesia di KTT G7*, sumber Indonesiabaik.id, antara lain mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan negara anggota dan mitra G7 di sela-sela perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang dilangsungkan di Hiroshima, Jepang.

G7 beranggota negara-negara maju yang meliputi Amerika Serikat, Italia, Inggris, Prancis, Jepang, Kanada, dan Jerman. Indonesia hadir di KTT G7 Jepang karena Indonesia terpilih sebagai Ketua KTT ASEAN ke-42 yang akan diselenggarakan tahun 2023, disamping sebelumnya telah berhasil dalam menyelenggarakan Presidensi G20. Dalam beberapa tahun terakhir, G7 yang makin-gaul mengundang wakil-wakil negara berkembang untuk hadir dan bersuara. Jerman selaku negara Presidensi G7 mengundang beberapa negara untuk hadir, yaitu Indonesia, Afrika Selatan, Argentina, India, dan Senegal mewakili suara negara-negara berkembang.

Walau Indonesia bukan anggota NATO, dalam KTT G7, Indonesia yang diwakili Presiden RI Joko Widodo, dengan hampiran politik LN bebas-aktif, NKRI berjaya melakukan sejumlah pertemuan penting bagi NKRI, diantaranya melakukan pertemuan bilateral dengan IMF dan sejumlah negara, yakni Jepang, Inggris, Kanada, Brazil, Cook Islands, dan Australia.

Isi dari hasil pertemuannya, diantaranya:

1. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida

- Peningkatan kemitraan dagang
- Percepatan pembangunan MRT di Indonesia

2. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak

- Realisasi komitmen Inggris dalam beberapa proyek energi terbarukan di Indonesia
- Penegasan bahwa kebijakan diskriminatif dalam perdagangan harus dihindari

3. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau

- Realisasi investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Percepatan pengembangan bandara hijau di Kalimantan Utara

4. Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva

- Kemitraan di bidang kehutanan
- Peningkatan kerja sama peternakan dan pengadaan daging bagi Indonesia



5. Perdana Menteri Kepulauan Cook, Mark Brown

- Ajakan untuk bersatu menghadapi isu kelautan dan perubahan iklim
- Peningkatan kerja sama dalam berbagai sektor

6. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy

- Kesiapan Indonesia menjadi jembatan perdamaian Ukraina-Rusia
- Bantuan kemanusiaan untuk Ukraina

7. Presiden Republik Korea, Yoon Suk Yeol

- Mengenai 18 proposal proyek yang diajukan Indonesia kepada Korea Selatan
- Penambahan kuota dan perluasan bidang kerja bagi pekerja Indonesia di Korea Selatan

8. Presiden Prancis, Emmanuel Macron

- Investasi pada beberapa sektor strategis
- Rencana *joint venture* dalam bidang pertahanan dan alat utama sistem senjata (alutsista) .

Sumber Dinas Perikanan Kabupaten Tegal , 2023, menyajikan artikel berjudul *Hadiri G7 Environmental Ministerial Meeting, Indonesia Tekankan Pentingnya Perlindungan Terumbu Karang*, antara lain mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari delapan negara outreach yang hadir dalam G7 (*Group of Seven*) Environmental Ministerial Meeting yang diselenggarakan di Metz, Prancis pada 5-6 Mei 2019. Keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan ini karena dianggap memiliki peranan penting dalam pengelolaan lingkungan

hidup. Hal itu selaras dengan tema keketuaan yang diusung oleh Prancis, yaitu *“fighting inequalities by protecting biodiversity and climate”*. Setiap tahun, para menteri lingkungan-hidup dari masing-masing anggota bertemu untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan internasional dengan mengundang negara-negara outreach. *Grup of Seven* atau G7 adalah sebuah grup tujuh negara-negara besar dengan laju pertumbuhan ekonomi pesat. Negara-negara anggota G7 terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Uni Eropa juga diwakili di G7. Pada kesempatan tersebut, Indonesia sebagai salah satu *co-chair International Coral Reefs Initiative (ICRI)* mewakili Monako dan Australia, bersama dengan Sekretariat ICRI, menyampaikan paparan arti penting terumbu karang dan peran strategis ICRI dalam perlindungan dan konservasi terumbu karang dunia. Indonesia juga menyampaikan capaian dan rencana ke depan dibawah keketuaan Bersama Indonesia, Monako dan Australia, serta kemitraan unik antara pemerintah, organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat dalam melindungi secara berkelanjutan terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya. Inisiatif pemajuan kerjasama ICRI mendapat dukungan dari negara-negara anggota G7 (Kanada, Jerman, Prancis, Jepang dan Amerika Serikat) serta negara-negara outreach (Norwegia, India, Mesir, Inggris, Fiji dan Meksiko), Kanada dan Jerman menyampaikan keinginannya untuk bergabung menjadi anggota ICRI. G7 mengapresiasi keketuaan Indonesia pada ICRI sebagai bukti nyata keberpihakan Indonesia dalam memerangi ketimpangan dunia melalui upaya nyata perlindungan terhadap kerusakan keanekaragaman-hayati dan perubahan iklim. Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, turut mengapresiasi langkah negara-negara anggota G7 untuk bergabung dalam keanggotaan ICRI. Menurutnya, hal itu dapat memperluas kerja sama dan menjadi kekuatan baru bagi upaya pelestarian dan perlindungan terumbu karang secara global. Pertemuan tingkat menteri yang dilaksanakan selama dua hari tersebut telah menyepakati beberapa hal. Diantaranya, mendukung upaya menetapkan target baru pengelolaan terumbu karang dalam kerangka perlindungan keanekaragaman hayati global pasca 2020, serta mendorong identifikasi & inovasi pembiayaan untuk konservasi terumbu karang.

Sumber Kaltim Pos, 2023, menyajikan artikel berjudul *Jokowi Undang Negara-Negara G7 Investasi di IKN*, antara lain mengungkapkan bahwa selain KTT G7, Jokowi juga menghadiri sejumlah *side event*, antara lain pagelaran yang di gagas oleh Amerika Serikat, *Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII)*. PGII merupakan kolaborasi yang dibentuk oleh G7 untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan di Bali sebelumnya. Dalam pertemuan yang dihadiri 6 anggota G7 (Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Italia, dan Inggris), Uni Eropa, mitra G7 (India, Australia, Korea Selatan, Comoros, Vietnam, dan Cook Islands), IMF, dan tiga perwakilan sektor swasta (Japan Foreign Trade Council, Nokia, dan Citi Group) itu, terkait agenda besar NKRI membangun infrastruktur, untuk mencipta pemerataan dan tingkatkan daya saing. Presiden NKRI mengajak PGII untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Indonesia mengharapkan dukungan PGII terhadap pembangunan IKN melalui investasi konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Pada kesempatan itu, dijelaskan pula bahwa Indonesia tengah melakukan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris, termasuk pembangunan IKN, untuk mengatasi ketimpangan sebaran, mengingat era sebelumnya pembangunan infrastruktur di Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan tidak meratanya sebaran jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di Tanah Air. IKN dirancang sebagai kota pintar masa depan berbasis alam dengan 70 persen area hijau dan 80 persen sumber energi berasal dari energi

baru terbarukan (EBT), oleh sebab itu, investasi pembangunan IKN sangat terbuka di berbagai sektor, mulai dari transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan lain-lainnya.

Pimpinan Negara NKRI juga menghadiri sejumlah pertemuan bilateral, dan ternyata banyak permintaan kerjasama bilateral yang ditujukan kepada NKRI. Presiden selalu menekankan pentingnya kemitraan yang setara, inklusif, dan saling menguntungkan., termasuk pentingnya peningkatan kerja sama perdagangan, yang mencakup upaya menghilangkan hambatan-hambatan di dalamnya. Presiden mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kerja sama investasi dan transformasi energi, termasuk implementasi *Just Energy Transition Partnership* (JETP). JETP dinilai penting untuk mendukung upaya mencapai target *zero carbon* pada tahun 2060.

Isu-isu spesifik bermunculan pada masing-masing pertemuan, sebagai misal,

- Dengan Jepang, kedua pemimpin negara mengharapkan agar review Indonesian-Japan Economic Partnership agreement (IJEPA) dapat diselesaikan September tahun 2023, NKRI menyampaikan harapan agar proses bidding MRT dapat segera diselesaikan.
- Presiden juga meminta penghapusan tarif untuk tuna kaleng dan perluasan akses pasar untuk buah-buahan tropis dari Indonesia.
- Kemudian, dengan Managing Director IMF, pertemuan diisi dengan tukar pikiran mengenai situasi ekonomi dunia yang banyak diwarnai ketidakpastian. Ekonomi Indonesia dinilai baik dan stabil oleh IMF, bertumbuh jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.



10. IKHWAL NATO & CSTO

Berbagai negara bergabung dengan NATO karena cemas agresi militer dadakan. Sumber Wikipedia menyajikan artikel berjudul *Pakta Pertahanan Atlantik Utara*, antara

lain mengungkapkan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization*, atau NATO) adalah sebuah organisasi aliansi militer antar berbagai negara, yang terdiri dari 2 negara di Amerika Utara, 28 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia yang bertujuan untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditanda tangani di Washington, DC pada tanggal 4 April 1949. NATO pada awalnya bertujuan untuk menekan pengaruh ideologi komunis dari Uni Soviet dan aliansinya yaitu Pakta Warsawa pada era Perang Dingin. Semboyan dari NATO yaitu "*Animus in consulendo liber*" yang artinya "Sebuah pikiran tak terkekang dalam pertimbangan".

Pasal utama persetujuan tersebut adalah Pasal V, yang berbunyi: *Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama dst.*

Pasal tersebut baru mulai digunakan untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 12 September 2001, sebagai tindak balasan terhadap peristiwa serangan teroris 11 September 2001 terhadap AS yang terjadi sehari sebelumnya.

Sejak keruntuhan Pakta Warsawa dan disgregasi Uni Soviet, dibentuklah organisasi penerus Pakta Warsawa untuk mengimbangi NATO yang bernama ***Collective Security Treaty Organization*** atau CSTO diikuti berbagai negara baru hasil disgregasi Uni Soviet dan sebagian negara pengikut Pakta Warsawa. Wikipedia menyajikan artikel berjudul *Collective Security Treaty Organization*, antara lain mengungkapkan bahwa CSTO adalah aliansi militer negara Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia dan Tajikistan, bergiliran menjadi pemimpin / presidensi , bertujuan (1) latihan perang-perangan bersama, antara lain di Rusia Selatan dan sentral-Asia tahun 2011 yang melibatkan 10.000 tentara dan 70 pesawat-tempur, (2) menjaga perdamaian & mengatasi konflik bersenjata DN tiap negara anggota triti tersebut , misalnya konflik DN Tajikistan dan Kyrgyzstan, diatasi oleh pasukan-negara-anggota-triti. Pada bulan Januari tahun 2022, CSTO mengirim 2.000 pasukan ke Kazakhstan. Pada 4 Februari 2009, CSTO membentuk pasukan-reaksi-cepat-bersama (Collective Rapid Reaction Force atau KSOR) untuk menjawab agresi-militer, kegiatan anti-teroris, kejahatan lintas-negara, penyelundupan obat-terlarang dan bencana-alam.

Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 4 Maret 1947, Traktat Dunkirk ditandatangani oleh Prancis dan Inggris sebagai *Treaty of Alliance and Mutual Assistance* dalam hal kemungkinan serangan oleh Jerman atau Uni Soviet setelah Perang Dunia II, pada tahun 1948 diperluas untuk mencakupi negara-negara Benelux, dalam bentuk Western Union, juga disebut sebagai Organisasi Perjanjian Brussel (BTO), yang didirikan berdasarkan Perjanjian



Brussel yang ditandatangani oleh Inggris, Prancis, dan anggota Benelux. Lalu muncul wacana aliansi militer baru, yang juga dapat mencakup Amerika Utara, menghasilkan penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara pada tanggal 4 April 1949 oleh negara-negara anggota Western Union ditambah AS, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark dan Islandia. Pada tahun 1952, jabatan Sekretaris Jenderal NATO ditetapkan sebagai kepala organisasi sipil, digelar latihan maritim NATO besar pertama, Exercise Mainbrace dan aksesi

Yunani dan Turki ke organisasi tersebut. Setelah Konferensi London dan Paris, Jerman Barat diizinkan untuk dipersenjatai-diri kembali secara militer, ketika mereka bergabung dengan NATO pada Mei 1955, yang pada gilirannya, merupakan faktor utama dalam pembentukan Pakta Warsawa yang didominasi Uni Soviet, yang menggambarkan dua sisi yang berlawanan dari Perang Dingin.

Pada tahun 1982, Spanyol yang baru demokratis bergabung dengan aliansi ini. Revolusi 1989 di Eropa menyebabkan NATO mengevaluasi ulang tujuan strategis, sifat, tugas, dan fokusnya di benua Eropa. Pada Oktober 1990, Jerman Timur lebur menjadi bagian Republik Federasi Jerman, pada November 1990, aliansi tersebut menandatangani Traktat tentang Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa (CFE) di Paris dengan Uni Soviet. Traktat ini mengamanatkan pengurangan militer khusus di seluruh benua, yang berlanjut setelah runtuhnya Pakta Warsawa pada Februari 1991 dan runtuhnya Uni Soviet pada Desember di tahun yang sama, yang menyingkirkan musuh utama NATO secara *de facto*.

Hal ini menyebabkan penarikan personel dan peralatan militer di Eropa. Perjanjian CFE menghapus 52.000 buah persenjataan konvensional dalam enam belas tahun berikutnya, dan memungkinkan pengeluaran militer oleh negara-negara anggota NATO Eropa menurun sebesar 28% dari tahun 1990 hingga 2015.

Secara politis, organisasi NATO mencari hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang baru otonom, dan forum diplomatik untuk kerja sama regional antara NATO dan tetangganya didirikan selama periode pasca-Perang Dingin, termasuk Kemitraan untuk Perdamaian (*Partnership for Peace*) dan inisiatif Dialog Mediterania di 1994, Dewan Kemitraan Euro-Atlantik pada 1997, dan Dewan Gabungan Permanen NATO-Rusia pada 1998. Pada KTT Washington 1999, Hungaria, Polandia dan Republik Ceko secara resmi bergabung dengan NATO. NATO mengeluarkan pedoman baru untuk keanggotaan dengan NATO dan Rencana Aksi Keanggotaan individual. Pedoman tersebut mengatur penambahan anggota aliansi baru: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia dan Slovenia pada tahun 2004, Albania dan Kroasia pada tahun 2009, Montenegro pada tahun 2017, Makedonia Utara pada tahun 2020, dan Finlandia pada tahun 2023.

Pasal 5 dari perjanjian Atlantik Utara mewajibkan negara-negara anggota NATO untuk membantu negara anggota mana pun yang terkena serangan bersenjata, diterapkan untuk pertama kalinya dan satu-satunya setelah serangan 11 September, setelah itu pasukan NATO dikerahkan ke Afghanistan di bawah misi ISAF yang dipimpin NATO. Organisasi tersebut telah menjalankan berbagai peran tambahan sejak saat itu, termasuk mengirim pelatih ke Irak, membantu dalam operasi kontra-pembajakan, pada tahun 2011 memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1973. Pasal 4, yang hanya meminta konsultasi di antara anggota NATO, telah dipanggil lima kali setelah insiden dalam Perang Irak, Perang Saudara Suriah dan aneksasi Krimea oleh Rusia.

Eksistensi sikap NATO di bangun secara khas sebagai berikut;

- NATO tidak mengutuk pembersihan 2016-2017 di Turki. Sebagai akibat dari invasi Turki ke daerah-daerah berpenduduk Kurdi di Suriah, intervensi Turki di Libya dan sengketa zona maritim Siprus-Turki, menyebabkan mulai munculnya tanda-tanda keretakan hubungan antara Turki dan anggota NATO lainnya.
- Anggota NATO telah menolak Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir PBB, perjanjian yang mengikat untuk negosiasi penghapusan total senjata nuklir, yang didukung oleh lebih dari 120 negara.
- Islandia adalah satu-satunya negara anggota NATO yang tidak memiliki kekuatan militer. Islandia hanya memiliki sistem penjagaan laut dan udara yang fungsinya sama seperti militer tetapi dalam skala kecil. Lembaga lain yang bertugas dalam pertahanan Islandia yaitu Komisi Keamanan Nasional dan Unit Pasukan Khusus.

Negara-negara anggota NATO adalah sebagai berikut.

Anggota NATO

Negara-negara pendiri

- Amerika Serikat
- Belanda
- Belgia
- Britania Raya
- Denmark
- Islandia
- Italia

- Kanada
- Luksemburg
- Norwegia
- Portugal
- Prancis

Perkembangan NATO di Eropa

Negara-negara yang bergabung pada masa Perang Dingin

- Yunani (1952)
- Turki (1952)
- Jerman (1955, sebagai Jerman Barat)
- Spanyol (1982)

Negara-negara mantan anggota Blok Timur yang bergabung setelah Perang Dingin

- Jerman Timur (1990)
- Polandia (1998)
- Ceko (1999)
- Hungaria (1999)
- Bulgaria (2004)
- Estonia (2004)
- Latvia (2004)
- Lituania (2004)
- Rumania (2004)
- Slowakia (2004)
- Slovenia (2004)
- Albania (2009)
- Kroasia (2009)
- Montenegro (2017)
- Makedonia Utara (2020)
- Finlandia (2023)

Negara-negara yang akan bergabung

- Swedia (2022)
- Ukraina (2022)

Mitra NATO berstatus Non-anggota NATO

Mitra untuk urusan Perdamaian

- Armenia
- Georgia
- Irlandia
- Kazakhstan
- Siprus
- Swiss
- Uzbekistan

Mitra Global

- Australia
- Irak
- Jepang
- Kolombia
- Korea Selatan



- Mongolia
- Bahrain
- Filipina
- Thailand
- Tunisia
- Taiwan
- Qatar
- Kuwait
- Uni Emirat Arab

- Brazil
- Israel
- Yordania
- Pakistan
- Argentina
- Selandia Baru

11.HUBUNGAN G7 DAN NATO

Stefan Wolf, 2022, menyajikan artikel berjudul *G7 and Nato summits lay bare deep and hostile divide between Russia and China and the west*, antara lain mengungkapkan bahwa pertemuan G7 di Jerman dan pertemuan pimpinan NATO di Madrid memberi sinyal batas dominasi Barat dalam tataran pemerintahan-global berlatar gejala polarisasi makin memuncak, dengan latar belakang perang Ukraina cq serangan Russia pada pusat-Belanja berpenduduk-padat di Ukraina, ungkapan NATO bahwa Russia adalah ancaman nyata dan penting bagi NATO dan kedamaian/stabilitas wilayah Euro-Atlantik. Pimpinan G7 tak dapat berbuat banyak akan kenaikan-biaya-hidup akibat blokade ekspor makanan Ukraina dan reduksi aliran gas ke Eropa yang memuncak tatkala musim-dingin.

Tak ada hampiran kooperatif NATO dengan RRT, muncul pengumuman aliran dana Partnership for Global Infrastructure and Investment sebesar USD 600 Miliar untuk menyaingi program China's Belt and Road Initiative bagi negara-negara berkembang. G7 telah sampai pada batas kemampuan menggalang negara-negara lain membentuk tata-dunia masa-depan. Pada pertemuan Madrid, Sekjen NATO menyatakan bahwa pertemuan tersebut harus (1) memperkuat NATO menghadapi berbagai rezim Russia dan RRC yang secara terbuka melawan keteraturan-internasional berbasis hukum, (2) penyiapan 40.000 sampai 300.000 pasukan tahun depan, (3) mengundanf Finlandia dan Swedia masuk aliansi, dalam membangun sistem perlindungan yang baru.

12.KETERLIBATAN NKRI PADA OPEC

Sebagai negara pengimpor-neto migas, Indonesia beberapa kali keluar-masuk menjadi anggota OPEC karena alasan tertentu. Peran Indonesia cukup signifikan sebagai perantara antara produsen dan konsumen dan menjadi penengah negara-negara anggota yang terlibat

sebagai konflik. Pada tahun 1980-an, saat pendapatan sektor migas mendominasi perekonomian Indonesia, negara kita diuntungkan atas sikap yang teguh dalam menjaga kestabilan harga minyak di pasar dunia. Alasan keluarnya Indonesia dari organisasi ini adalah posisi sebagai net importer yang berbeda kepentingan dengan anggota OPEC lain. Alasan selanjutnya, adalah hendak memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat Indonesia supaya bijak dalam menggunakan minyak atau bahan bakar karena ketersediaan minyak tidak lagi melimpah.

Sumber Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2008, menyajikan artikel berjudul Peranan Indonesia Dalam OPEC, antara lain mengungkapkan bahwa Indonesia tidak sedikit mendapat keuntungan sebagai anggota OPEC. Sebaliknya, Indonesia juga memberikan kontribusi nyata dalam posisinya sebagai anggota OPEC. Indonesia memiliki peran penting membawa OPEC menjadi lembaga yang terpadang oleh lembaga-lembaga internasional, walau OPEC beranggota negara-negara dunia ketiga. Peran Indonesia itu sangat nyata pada saat Sekjen OPEC dijabat oleh Prof Subroto, periode 1988-1994, pada saat itu Indonesia dikenal sebagai mediator antara produsen dan konsumen dan menengahi negara-negara anggota OPEC yang terlibat konflik.

Sebaliknya pada era 1980-an, dimana pendapatan dari sektor migas dominan, Indonesia mendapat keuntungan atas sikap OPEC yang teguh menjaga stabilitas harga minyak. Saat harga minyak sempat turun ke USD 9/barel dari USD 38/barel tahun 1980-an, Indonesia diuntungkan dengan upaya OPEC mendorong kembali kenaikan harga. Oleh karena itu jika saat ini muncul keinginan keluar dari OPEC, Indonesia akan memilih jalan keluar dengan baik-baik.

Terdapat dua alasan mendorong Indonesia keluar dari OPEC.

- Pertama, posisi Indonesia yang kini sebagai negara net importer, berbeda kepentingan dengan anggota OPEC lainnya.
- Kedua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa sekarang ini Indonesia tidak lagi memiliki minyak berlimpah. Dengan keluar dari OPEC ,pemerintah berharap masyarakat akan sadar dan tidak mengkonsumsi minyak atau BBM secara boros dan berlebihan. Sejauh ini pemerintah belum mengambil keputusan resmi keluar dari OPEC, hanya saja persiapan sedang di bahas secara lintas Departemen, terutama Departemen Luar Negeri serta instansi terkait lain.

Situs Organisasi Negara Pengekspor Minyak , 2023, menyajikan artikel berjudul *Negara Anggota*, mengungkapkan antara lain bahwa Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) didirikan di Bagdad, Irak, dengan penandatanganan perjanjian pada bulan September 1960 oleh lima negara yaitu Republik Islam Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi dan Venezuela. Mereka menjadi Anggota Pendiri Organisasi. Negara-negara tersebut kemudian bergabung dengan Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962), Uni Emirat Arab (1967), Aljazair (1969), Nigeria (1971), Ekuador (1973), Gabon (1975), Angola (2007), Guinea Khatulistiwa (2017) dan Kongo (2018). Ekuador menanggihkan keanggotaannya pada Desember 1992, bergabung kembali dengan OPEC pada Oktober 2007, tetapi memutuskan untuk menarik keanggotaannya dari OPEC efektif 1 Januari 2020. *Indonesia menanggihkan keanggotaannya pada Januari 2009, mengaktifkannya kembali pada Januari 2016, tetapi memutuskan untuk menanggihkan keanggotaannya sekali lagi pada Pertemuan^{ke} -171 Konferensi OPEC pada 30 November 2016.* Gabon mengakhiri keanggotaannya pada Januari

1995. Namun, bergabung kembali dengan Organisasi pada Juli 2016. Qatar mengakhiri keanggotaannya pada 1 Januari 2019. Saat ini, Organisasi memiliki total 13 Negara Anggota. Statuta OPEC membedakan antara Anggota Pendiri dan Anggota Penuh - negara-negara yang permohonan keanggotaannya telah diterima oleh Konferensi. Statuta menetapkan bahwa “setiap negara dengan ekspor bersih minyak mentah yang substansial, yang secara fundamental memiliki kepentingan yang sama dengan Negara Anggota, dapat menjadi Anggota Penuh Organisasi, jika diterima oleh mayoritas tiga perempat Anggota Penuh, termasuk suara setuju dari semua Anggota Pendiri.” Statuta selanjutnya menetapkan Anggota Asosiasi yang merupakan negara-negara yang tidak memenuhi syarat untuk keanggotaan penuh, namun tetap diterima di bawah kondisi khusus seperti yang ditentukan oleh Konferensi.

Sumber Energia, Desember 2021, mengungkapkan antara lain bahwa jika merujuk pada APBN 2022 maka target lifting yang ditetapkan untuk minyak adalah sebesar 703.000 BOPD dan gas sebesar 5,8 BSCFD. OPEC masih menjadi salah satu penentu naik turunnya harga minyak. Kalau OPEC produksinya masih stabil, kemudian Non OPEC juga tidak menambah signifikan, harga cenderung di level sekarang atau bahkan lebih tinggi. Meningkatnya harga minyak juga disebabkan upaya pemulihan ekonomi yang mulai dilakukan banyak negara setelah dihantam pandemi dalam dua tahun Untuk naik sekitar 20.000 BOPD menjadi 680.000 harus dilakukan dengan berbagai upaya



yang sangat berat, walau peluang untuk mencapai target lifting migas pada tahun 2022 seharusnya lebih besar ketimbang kesempatan meraih target pada tahun 2021, sebab sejak awal tahun 2022 telah ada insentif dari sisi harga minyak yang lebih baik di mata pelaku usaha hulu migas. Pihak SKK Migas sendiri berupaya agar outlook migas pada tahun 2022 tetap sejalan dengan target APBN tahun 2022. SKK Migas dan KKKS menyiapkan program

Filling the Gap untuk mengurangi atau bahkan menutup gap produksi terhadap APBN, memonitor dan mendorong percepatan pengeboran pengembangan dan proyek-proyek migas baru yang dapat on-stream di tahun 2022. Di samping itu, lapangan-lapangan yang idle di Wilayah Kerja eksisting khususnya PHE karena memiliki prioritas rendah secara portofolio korporasi didorong untuk segera diproduksi dengan menggunakan berbagai bentuk skema kerjasama aliansi strategis. Kontribusi dari lapangan idle ini diharapkan dapat membantu menutup gap tersebut.

13. PERAN NKRI PADA UNI AFRIKA

Wikipedia menyajikan makalah berjudul *Uni Afrika*, antara lain mengungkapkan bahwa Uni Afrika, disingkat **UA** adalah sebuah uni yang terdiri dari 54 negara Afrika, diumumkan dalam deklarasi Sirte di Sirte, Libya, pada 9 September 1999. Organisasi ini didirikan pada 26 Mei 2001 di Addis Ababa, Ethiopia, dan diluncurkan pada 9 Juli 2002 di Durban, Afrika Selatan. Organisasi ini dibentuk sebagai penerus Organisasi Kesatuan Afrika. (OAU). Keputusan terpenting UA dibuat oleh Majelis Uni Afrika, pada pertemuan semi-tahunan kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggotanya. Sekretariat UA, Komisi Uni Afrika, bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia..

Tujuan Uni Afrika adalah sebagai berikut:

- Untuk mencapai persatuan, kohesi, dan solidaritas yang lebih besar antara negara-negara Afrika.
- Untuk mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan Negara Anggotanya.
- Untuk mempercepat integrasi politik dan sosial-ekonomi benua.
- Untuk mempromosikan dan mempertahankan posisi Afrika bersama tentang isu-isu yang menjadi kepentingan benua dan rakyatnya.
- Untuk mendorong kerja sama internasional, dengan mempertimbangkan Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM.
- Untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua itu.
- Untuk mempromosikan prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga demokrasi, partisipasi rakyat dan pemerintahan yang baik.
- Untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan hak rakyat sesuai dengan Piagam Afrika tentang HAM, Hak Penduduk dan Instrumen HAM yang relevan lainnya.
- Untuk menetapkan kondisi yang diperlukan yang memungkinkan benua memainkan peran yang sah dalam ekonomi global dan dalam negosiasi internasional.
- Untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya serta integrasi ekonomi Afrika.
- Untuk mempromosikan kerjasama di semua bidang kegiatan manusia untuk meningkatkan standar hidup orang Afrika.
- Untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan antara Komunitas Ekonomi Regional yang ada dan yang akan datang untuk mencapai tujuan Perhimpunan secara bertahap.
- Untuk memajukan pembangunan benua dengan mempromosikan penelitian di segala bidang, khususnya sains dan teknologi.
- Untuk bekerja dengan mitra internasional yang relevan dalam pemberantasan penyakit yang dapat dicegah dan promosi kesehatan yang baik di benua itu.

Uni Afrika terdiri dari badan-badan politik dan administratif. Organ pembuat keputusan tertinggi adalah Najelia Uni Afrika, yang terdiri dari semua kepala negara atau pemerintahan negara anggota Uni Afrika. Uni Afrika juga memiliki badan perwakilan, Parlemen Pan-Afrika, yang terdiri dari 265 anggota yang dipilih oleh badan legislatif nasional negara-negara anggota AU.

Institusi politik Uni Afrika lainnya meliputi:

- Dewan Eksekutif, terdiri dari menteri LN, yang menyiapkan keputusan untuk Majelis;
- Komite Perwakilan Tetap, terdiri dari duta besar untuk Addis Ababa negara anggota Uni Afrika;
- Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOCC), sebuah badan konsultatif masyarakat sipil.

Sejarah Uni Afrika berawal dari '*Kongres Pertama Kemerdekaan Negara-Negara Afrika*', yang diadakan di Acera, Ghana, pada tanggal 15 hingga 22 April 1958. Konferensi tersebut bertujuan untuk membentuk Hari Afrika, untuk menandai gerakan pembebasan setiap tahun mengenai kesediaan rakyat Afrika untuk membebaskan diri dari kediktatoran asing, serta upaya selanjutnya untuk menyatukan Afrika, termasuk Organisasi Persatuan Afrika (OAU), yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1963, dan Masyarakat Ekonomi

Afrika pada tahun 1981. Sebagian kritikus berpendapat bahwa OAU secara khusus *tidak berbuat banyak untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara Afrika dari pemimpin politik mereka sendiri*, dan sering menyebutnya sebagai "Klub Diktator".

Gagasan pembentukan Uni Afrika dihidupkan kembali pada pertengahan 1990-an di bawah kepemimpinan kepala negara Libya Muammar-Gadafi. Kepala negara dan pemerintahan OAU mengeluarkan Deklarasi Sirte di Libya pada tanggal 9 September 1999, menyerukan pembentukan Uni Afrika. Deklarasi tersebut diikuti oleh pertemuan puncak di Lome pada tahun 2000, ketika UU Konstitutif Uni Afrika diadopsi, dan di Lusaka pada tahun 2001, ketika rencana penerapan Uni Afrika diadopsi. Pada periode yang sama, inisiatif pembentukan Kemitraan Baru untuk Pembangunan Afrika (NEPAD), juga didirikan.

Barack Obama adalah presiden Amerika Serikat pertama yang berbicara di depan anggota Uni Afrika di Addis Ababa, pada 29 Juli 2015. Dengan pidatonya, dia mendorong dunia untuk meningkatkan hubungan ekonomi melalui investasi dan perdagangan dengan Afrika, mengapresiasi kemajuan yang dicapai dalam sektor pendidikan, infrastruktur dan ekonomi, mengkritik kurangnya demokrasi dan pemimpin yang menolak untuk mundur, diskriminasi terhadap minoritas, termasuk orang LGBT, kelompok agama dan etnis) dan korupsi, mendorong agar demokratisasi diintensifkan dan perdagangan bebas, untuk meningkatkan kualitas hidup orang Afrika secara signifikan.

2024

misi,
dan

luar



Deplu, Direktorat Afrika telah menyusun Rencana Strategis Direktorat Afrika tahun 2020 – yang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri sesuai amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis Direktorat Afrika berisi visi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan strategis target kinerja sampai dengan lima tahun mendatang, sebagai pedoman pelaksanaan politik negeri baik dalam mekanisme kerja sama

bilateral maupun intra dan antar kawasan Afrika Sub-Sahara, selaras dengan Visi Kementerian Luar Negeri tahun 2020 – 2024 yakni “Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Kawasan Afrika Sub-Sahara secara umum merupakan kawasan yang relatif stabil dan mengalami kemajuan signifikan di bidang demokrasi, penegakan HAM dan *good governance* meskipun dari perspektif politik, beberapa negara Afrika Sub-Sahara masih menghadapi tantangan keamanan dan tantangan demokrasi. Melalui Uni Afrika, negara-negara Afrika telah memperlihatkan peningkatan solidaritas yang semakin kuat dalam mempercepat kerjasama politik, ekonomi, dan sosial sehingga akan memberikan kontribusi besar bagi upaya menciptakan perdamaian, keamanan serta stabilitas di kawasan.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika Sub-Sahara selama ini telah berjalan dengan baik, namun perlu terus ditingkatkan. Indonesia yang memiliki hubungan sejarah dan *attachment* politik yang cukup kuat dengan negara-negara Afrika sejak prakarsa dan kepemimpinan RI dalam KAA 1955 berkomitmen untuk melakukan peningkatan hubungan ekonomi dengan Afrika.

- Dari 46 negara yang berada di bawah kewenangan Direktorat Afrika di kawasan Afrika Sub-Sahara, Indonesia saat ini mempunyai hubungan diplomatik dengan 45 negara.
- Pemerintah Indonesia sangat berkeinginan untuk mengoptimalkan hubungan dengan kawasan Afrika melalui berbagai inisiatif, baik pada tataran bilateral, regional maupun multilateral dengan prioritas pada diplomasi ekonomi baik perdagangan, investasi maupun kerjasama capacity building.
- Saat ini terdapat 10 KBRI, 1 KJRI dan 2 ITPC di Kawasan Afrika Sub-Sahara sementara di Indonesia terdapat 6 perwakilan negara-negara Afrika Sub-Sahara di Indonesia serta sekitar 7 Konsul Kehormatan.
- Keberadaan perwakilan RI dirasa perlu untuk ditingkatkan di masa mendatang, misalnya dengan membuka perwakilan di Kamerun atau negara Afrika lainnya yang dipandang strategis bagi kepentingan nasional Indonesia. Negara yang belum membuka hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia hanya Sudan Selatan.

Indonesia juga terus menerjemahkan kedekatan politis dan ikatan sejarah kuat dengan Afrika yang merupakan salah satu pasar potensial Indonesia yang dinamis dan menjanjikan melalui berbagai kerja sama ekonomi konkrit dengan kawasan Afrika.

Indonesia telah berhasil menyelenggarakan

- Indonesia-Africa Forum (IAF) pada tahun 2018 yang menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar USD 586, 56 juta di berbagai sektor unggulan RI,
- Indonesia-Africa Maritime Dialogue (IAMD) tahun 2018,
- Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) tahun 2019 yang menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar USD 822 juta,
- Pembentukan Preferential Trade Agreement RI-Mozambik tahun 2019,
- Pembentukan PTA bilateral seperti Mauritius dan Djibouti maupun sub-regional dengan kawasan Afrika,
- Meningkatkan outbound investment Indonesia ke sejumlah negara di Kawasan Afrika Sub Sahara antara lain Niger, Senegal, Tanzania, dan Nigeria, dengan melibatkan BUMN RI dan stakeholders terkait.

Direktorat Afrika telah menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal melalui hubungan luar negeri di Kawasan Afrika Sub-Sahara untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- b. Memajukan kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di Kawasan Afrika Sub-Sahara
- c. Meningkatkan infrastruktur diplomasi Direktorat Afrika untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Tujuan dari Direktorat Afrika adalah:

- a. Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal melalui hubungan luar negeri di Kawasan Afrika Sub-Sahara.

- b. Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional di Kawasan Afrika .

14. KEGIATAN LN NKRI DENGAN UNI EROPA

Anatasia Anjani , 2022, menyajikan artikel berjudul *Mengenal Uni Eropa: Peran dan Strukturnya*, antara lain mengungkapkan bahwa Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 27 negara di Eropa. Negara anggota Uni Eropa bekerja sama di bidang ekonomi, sosial, serta keamanan. Sejak berdiri pada 1993, negara-negara Uni Eropa juga mengembangkan kerja sama kebijakan lintas sektor. Beberapa di antaranya menyoal iklim, lingkungan, kesehatan, hukum, dan migrasi.

Uni Eropa memiliki peran sebagai organisasi internasional regional yang berwenang dalam proses penyelesaian sengketa negara anggota. Sengketa tersebut mencakup antara negara anggota dengan komisi di Uni Eropa, antarnegara anggota, dan Uni Eropa dengan negara non anggota, seperti dikutip dari jurnal *Peran Uni Eropa dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bagi Negara Anggota dan Negara Non Anggota* karya Carina Etta Siahaan.

Uni Eropa diberi wewenang oleh PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi. Berdasarkan sejarah, Uni Eropa menjadi salah satu kekuatan organisasi internasional yang baru dan cukup disegani oleh masyarakat internasional.

Uni Eropa dianggap berperan dapat mengintegrasikan anggotanya dalam sebuah kebijakan bersama sehingga diharapkan dapat membawa dampak secara internasional. Kebijakan Uni



Eropa adalah suara bersama yang harus ditaati oleh semua negara anggotanya.

Selain itu, Uni Eropa juga bertujuan untuk menjadikan pasar Eropa lebih bersifat internal antar anggotanya dan regional dalam lingkup yang lebih luas dan menjadi satu hal yang bersifat internasional serta menjadi pusat perekonomian dunia.

Uni Eropa juga membentuk opini publik dan juga legitimasi publik terhadap

kebijakan yang bersifat integritas dari Uni Eropa. Hal ini sangat penting karena ada banyak negara di dalam Uni Eropa yang memiliki karakter masyarakat dan nasionalisme yang berbeda-beda.

Organisasi ini juga berperan dalam proteksi internasional bagi pencari suaka dari konflik di berbagai negara. Lewat Uni Eropa, pencari suaka ditempatkan di berbagai negara anggota, seperti dikutip dari *The European Union: What it is and what it does* yang dirilis European Commission.

Struktur Uni Eropa bersifat unik karena hal ini dikarenakan masing-masing anggotanya tetap menjadi negara merdeka dan berdaulat.

Uni Eropa memiliki beberapa lembaga sebagai berikut.

- The Court of Justice of the European Union (CJEU)

CJEU berperan sebagai lembaga yudikatif dan lembaga mahkamah tertinggi di Uni Eropa untuk menangani masalah hukum di Uni Eropa. CJEU bertugas untuk

menjamin agar traktat-traktat Uni Eropa dapat diaplikasikan dan diintegrasikan di semua negara Uni Eropa sehingga menciptakan pemerataan hukum bagi semua orang.

- Pengadilan Auditor (CoA)

Adalah lembaga keuangan di Uni Eropa. CoA memiliki tugas investigasi yang kuat untuk menyelidiki dokumen dari organisasi yang menangani pendapatan dan pengeluaran Uni Eropa. Tugas CoA membuat laporan tertulis.

- Badan Penasihat Uni Eropa: Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (EESC)

EESC bertugas untuk membentuk pasar internal, menyediakan perlengkapan kelembagaan dan untuk memberikan instruksi kepada Komisi dan Dewan mengenai masalah sosial dan ekonomi untuk memberikan kelompok-kelompok tersebut bagian dalam proses pengambilan keputusan komunitas.

- Komite Daerah (CoR)

Komite daerah bertujuan agar daerah atau otoritas lokal mempengaruhi dan berpartisipasi dalam proses legislatif komunitas.

Yayasan Kehati, 2022, menyajikan artikel berjudul *Uni Eropa Atur Komoditas Impor Mencegah Deforestasi*, sebagai sebuah tulisan yang pernah dimuat di :

<https://www.forestdigest.com>, **antara lain mengungkapkan bahwa** Uni Eropa akan makin selektif menerima barang dari negara lain, akan menolak komoditas yang terkait dengan deforestasi. Selain Uni Eropa, pemerintah Inggris juga sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang Lingkungan ke parlemen, yang juga mencakup ketentuan khusus uji tuntas komoditas yang memberikan risiko terhadap hutan. Uni Eropa adalah kawasan beranggotakan 27 negara dengan total populasi 517 juta jiwa. Pada 2021, meski pandemi Covid-19, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa melonjak 26% mencapai 16,5 miliar Euro. Lonjakan itu, antara lain, didorong kenaikan harga komoditas, seperti sawit. Ekspor sawit ke negara-negara Uni Eropa tumbuh 9%. Menurut Kementerian Perdagangan, Indonesia menempati peringkat ke-22 sebagai pemasok bahan pangan untuk skala global, dengan *market share* ekspor 1,05% atau senilai US\$ 6,48 miliar. Jenis produk atau makanan dari Indonesia yang banyak diminati pasar global adalah produk tembakau (rokok), produk-produk ikan tuna, udang, produk kopi, makanan siap saji, kepiting, makanan ringan (*waffle* dan wafer), pasta, biskuit manis, serta produk olahan rumput laut dan tumbuhan alga lainnya.

Untuk pasar Uni Eropa, produk-produk makanan dari Indonesia paling banyak dikirim ke Belanda (US\$ 34,84 juta), Italia (US\$ 26,74 juta), Jerman (US\$ 26,32 juta), Belgia (US\$ 24,92 juta), Inggris (US\$ 21,11 juta), Rusia (US\$ 17,98 juta), Spanyol (US\$ 11,95 juta), Prancis (US\$ 6,60 juta), Turki (US\$ 5,91 juta), dan Portugal (US\$ 5,86 juta). Produk makanan Indonesia yang paling diminati pasar Uni Eropa adalah olahan tuna, tembakau, olahan nenas, produk kelapa, udang, makanan siap saji, rokok, pengental makanan dari olahan sayur, dan teh hitam.

Komisi Uni Eropa membuat proposal mencegah komoditas yang terkait deforestasi pada 17 November 2021. Proposal ini memberi justifikasi bahwa pendorong utama deforestasi dan degradasi hutan adalah perluasan lahan pertanian, yang terkait dengan produksi pangan. Karena itu Uni Eropa hendak memastikan rantai pasok komoditas pangan bebas deforestasi. Pada 28 Juni 2022, Dewan Uni Eropa menyatakan setuju terkait aturan baru itu. Dewan menyatakan akan mengadopsi posisi negosiasinya (pendekatan umum) sebagai langkah maju yang besar mencegah krisis iklim dan melindungi keanekaragaman hayati.

Regulasi Uni Eropa yang diusulkan berdampak pada komoditas Indonesia yang diekspor ke Eropa adalah sebagai berikut.

- Undang-undang energi/lingkungan terbarukan (*renewable energy/environment legislation*), seperti Arahan Energi Terbarukan (*Renewable Energy Directive*) II yang menghapuskan biofuel sebagai pendorong perubahan penggunaan lahan berdampak tinggi (seperti minyak sawit) pada 2030 .
- Uji tuntas wajib (*mandatory due diligence*). Misalnya, Undang-undang Kewaspadaan Prancis menjadi satu-satunya peraturan operasional yang mencakup uji tuntas risiko deforestasi komoditas hutan di bawah kewenangannya yang luas.
- Pelaporan dan pengungkapan wajib (*mandatory reporting and disclosure*). Misalnya, Prancis akan mewajibkan lembaga keuangan untuk mengungkapkan risiko keanekaragaman hayati.

Nonregulasi mencakupi pendekatan sukarela, seperti:

- Pelaporan dan pengungkapan (*reporting and disclosure*). Misalnya, gugus tugas pengungkapan terkait alam (*Task Force for Nature Related Disclosures*)—inisiatif pasar yang akan mengembangkan kerangka kerja bagi keuangan dan perusahaan untuk melaporkan risiko terkait alam.
- Standar dan label (*standards and labels*). Misalnya, Label Donau Soja dan Eropa Soja: persetujuan skema sertifikasi sukarela (misalnya pelabelan biofuel, arahan energi terbarukan Uni Eropa).
- Transparansi (*transparency*). Misalnya, platform di seluruh Uni Eropa (titik akses tunggal Eropa) untuk memberi investor akses tanpa batas terhadap informasi perusahaan terkait keuangan dan keberlanjutan di bawah Rencana Aksi Pasar Modal Uni Eropa.
- Dialog pemangku kepentingan (*stakeholder dialogues*). Misalnya, Amsterdam Declaration Partnership (ADP); COP 26 mengadakan dialog Forestry, Agriculture and Commodities Trade (FACT).
- Perjanjian perdagangan (*trade agreements*). Misalnya, dalam perjanjian perdagangan bebas Indonesia-EFTA, Swiss memberikan pengurangan tarif untuk kuota impor minyak sawit jika memenuhi kriteria keberlanjutan (kemungkinan dijamin melalui sertifikasi).
- Kriteria pengadaan publik hijau (*green public procurement criteria*). Misalnya, Undang-Undang Iklim dan Ketahanan Prancis yang mencakup pilihan vegetarian wajib dan kriteria pengadaan publik yang mengurangi permintaan pakan dan mendorong sumber daya lokal.

Apa saja komoditas ekspor dari Indonesia yang berpotensi terkena dampak dari kebijakan Uni Eropa mencegah deforestasi?

- Komoditas yang dicakup: kedelai, minyak sawit, kayu, daging sapi, kakao, dan kopi & beberapa produk turunan (misalnya kulit, cokelat, furnitur). Dasarnya penilaian dampak produk mana yang benar-benar berkontribusi terhadap deforestasi
- Tidak ada diskriminasi: berlaku sama untuk produk yang diproduksi di Uni Eropa dan diimpor dari luar negara-negara anggotanya.
- Cakupan progresif: produk yang dicakup akan diperluas seiring waktu.
- Tanggal batas (*cut-off date*) 31 Desember 2020: tidak ada komoditas yang diizinkan memasuki pasar Uni Eropa jika diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan.

Koalisi Eropa untuk Keadilan Perusahaan (*European Coalition for Corporate Justice–ECCJ*), mencatat bahwa RUU Lingkungan Inggris khusus berfokus pada komoditas berisiko hilangnya hutan dengan mayoritas menekankan perlindungan hak asasi manusia dan/atau kerusakan lingkungan secara lebih luas. Sementara Undang-Undang Kewaspadaan Prancis menjadi satu-satunya peraturan operasional yang mensyaratkan uji tuntas risiko deforestasi komoditas hutan, tetapi hanya dalam keadaan terbatas dan hanya untuk kategori terbatas pelaku korporasi.

Berbagai faktor yang perlu diperhatikan NKRI sebagai pengekspor komoditas KE Uni Eropa adalah sebagai berikut.

- **Regulasi.** Aturan yang dibangun Uni Eropa bertujuan meningkatkan perdagangan produk dari rantai pasokan “bebas deforestasi (*free deforestation*)”, akan menciptakan standar-standar baru yang memberatkan dunia usaha. Yang harus dipikirkan Pemerintah Indonesia adalah (a) mendefinisikan “free deforestation” sebagai kesepakatan bersama antara Uni Eropa dengan Indonesia melalui *cut-off date* yang disepakati; (b) Sistem Ketelusuran Rantai Pasok harus berada di Indonesia berupa platform lintas sektor dengan memastikan komoditas strategis yang berorientasi ekspor.
- **Dampak.** Komisi Uni Eropa akan memastikan dampak yang sama pada pemasok dan rantai pasokan di Eropa dan di negara-negara mitra. Bagaimana posisi Indonesia dan apa yang harus disiapkan sebagai negara produsen? *Fairness* adalah kuncinya karena itu pendekatan yurisdiksi dan lanskap mesti menjadi basisnya.
- **Prinsip.** Peraturan Uni Eropa didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan dasar ilmiah serta metodologi yang kuat. Bagaimana prinsip-prinsip ini bisa diadopsi dalam regulasi Indonesia? Hal ini akan berkaitan dengan maraknya pasar sertifikasi untuk produk-produk yang diekspor dan pemenuhan kriteria keberlanjutan serta ketelusuran rantai pasok.

Koalisi Eropa untuk Keadilan Perusahaan (*European Coalition for Corporate Justice–ECCJ*), mencatat bahwa RUU Lingkungan Inggris khusus berfokus pada komoditas berisiko hilangnya hutan dengan mayoritas menekankan perlindungan hak asasi manusia dan/atau kerusakan lingkungan secara lebih luas. Sementara Undang-Undang Kewaspadaan Prancis menjadi satu-satunya peraturan operasional yang mensyaratkan uji tuntas risiko deforestasi komoditas hutan, tetapi hanya dalam keadaan terbatas dan hanya untuk kategori terbatas pelaku korporasi.

Sumber ARISE+ Indonesia , menyajikan artikel berjudul *Kerja Sama Uni Eropa dengan Indonesia* , antara lain mengungkapkan bahwa selama beberapa dekade terakhir, Uni Eropa dan Indonesia telah berhasil memperkuat dan memperluas kerjasama yang ditopang oleh tujuan bersama dan kepentingan bersama. Sebagai anggota G20, kedua negara bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi masalah keuangan, sosial ekonomi, dan pembangunan global. Sejak 2014, Uni Eropa dan Indonesia meningkatkan hubungan bilateral dengan memberlakukannya Perjanjian Kerjasama Kemitraan, antara lain untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mempromosikan tata pemerintahan yang baik, melindungi lingkungan, melawan dampak perubahan iklim, mendukung masyarakat sipil dan mempromosikan pendidikan dasar.

Beberapa keuntungan bersama dari peningkatan kerjasama telah terwujud melalui perluasan perdagangan dan investasi. Perdagangan barang antara kedua mitra meningkat dari sekitar EUR 15 miliar pada 2009 menjadi EUR 24 miliar pada 2019, atau kenaikan rata-rata 4,8% per tahun. Aliran investasi langsung dari Uni Eropa ke Indonesia tumbuh dengan sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, Uni Eropa adalah sumber investasi terbesar kedua bagi Indonesia dengan saham Investasi Asing Langsung senilai sekitar EUR 34 miliar. Dalam rangka menciptakan lebih banyak peluang perdagangan serta investasi bagi bisnis dan masyarakat di kedua zona ekonomi tersebut, Uni Eropa dan Indonesia merundingkan perjanjian perdagangan bebas, yang juga dikenal sebagai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Uni Eropa-Indonesia (EU-Indonesia CEPA) sejak tahun 2016.

Sumber Kemenperin, 2017, menyajikan artikel berjudul *Kemenperin Perluas Pasar Ekspor Tiga Produk Unggulan Indonesia di Uni Eropa*, antara lain mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian mendorong tiga produk unggulan Indonesia agar lebih memperluas pasar ekspor di Uni Eropa, yaitu pakaian, tekstil, dan sepatu. Langkah ini seiring upaya Indonesia yang tengah melakukan negosiasi dengan Uni Eropa terkait perdagangan dan investasi kedua belah pihak. Negosiasi melalui *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dilakukan untuk mengantisipasi resolusi parlemen Uni Eropa yang dapat mengganggu proses kerja sama kedua belah pihak. Contohnya mengenai kampanye negatif yang digunakan untuk menekan ekspor *minyak kelapa sawit* Indonesia. Sambil menunggu penyesuaian standar, kedua belah pihak perlu merundingkan perjanjian dagang agar kesepakatan akhir tercapai. Salah satu caranya adalah pembahasan komoditas yang sensitif seperti kelapa sawit dibicarakan paling akhir. Menperin berharap, dengan adanya pembebasan bea masuk, menjadi peluang besar bagi industri Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang. Menperin mengatakan, diperlukan peraturan yang lebih seimbang pada tiga elemen utama di Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa, yaitu akses pasar, pem-fasilitasan perdagangan dan investasi, serta kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas. “Kami percaya bahwa Indonesia dan Uni Eropa merupakan mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Di bidang investasi nonmigas, Uni Eropa menjadi penanam modal terbesar ke-4 di Indonesia setelah Singapura, Jepang, dan Tiongkok pada tahun 2016, dengan nilai investasi mencapai USD2,6 miliar atau naik dibanding tahun sebelumnya sebesar USD2,26 miliar. Investor dari negara-negara Uni Eropa di Indonesia didominasi, antara lain Belanda, Inggris, dan Perancis dengan tujuan utama investasi ke provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Sabilla Ramadhiani Firdaus, 2022, menyajikan artikel berjudul *Pembatasan Ekspor Nikel; Kebijakan Nasional vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional*, sebagai Analisis

Kebijakan Analisis Kebijakan pada Lembaga Administrasi Negara, antara lain mengungkapkan bahwa Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO terkait larangan ekspor bijih nikel yang mulai berlaku 1 Januari 2020. Permintaan konsultasi delegasi Uni Eropa kepada delegasi Indonesia, disampaikan kepada *Dispute Settlement Body* (DSU) sesuai dengan Pasal 4.4 DSU. Uni Eropa mengklaim bahwa larangan ekspor Indonesia, persyaratan pemrosesan dan pemasaran dalam negeri, serta persyaratan perizinan ekspor yang berlaku untuk bahan mentah, termasuk nikel, bijih besi, kromium, batu bara, limbah logam, skrap, kokas, *tidak sesuai dengan Pasal XI:1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*. Uni Eropa juga mengklaim skema pembebasan bea masuk merupakan subsidi yang bergantung pada penggunaan barang-barang domestik atas impor yang dilarang berdasarkan Pasal 3.1 b) Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbang/Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Di antara negara-negara produsen utama, Rusia, Kanada dan Australia memiliki rantai nilai nikel yang relatif terintegrasi, menghasilkan proporsi bijih dan logam yang sebanding (rata-rata 11-15 persen), sedang Indonesia adalah produsen bijih tunggal (ore) terbesar selama dekade 2004-2013, mewakili 19 persen dari total dunia, pada sisi lain menghasilkan bagian logam nikel yang jauh lebih kecil, yaitu lima persen. Sebagai penerima ekspor nikel dari Indonesia, atas larangan ekspor ini, Uni Eropa mengklaim beberapa ketentuan tidak konsisten dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Pengaturan dan larangan ekspor mineral mentah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 102, bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Tambahan Khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara di melaksanakan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara. Dalam Pasal 103 ayat 1, program tersebut mensyaratkan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan (smelter) di dalam negeri. Pasal 170 juga mewajibkan perusahaan Kontrak Karya untuk melaksanakan kewajiban membangun smelter di dalam negeri. Untuk melaksanakan aturan tersebut, pemerintah mengeluarkan dua aturan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Nomor 1 menegaskan pemegang kontrak karya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, wajib memurnikan hasil tambang dalam negeri.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan dalam bentuk pengolahan dalam waktu tiga tahun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014.

Beberapa larangan dasar didasarkan pada banyak faktor, antara lain berdasar hasil analisis dampak kebijakan pemerintah. Dalam laporan “Analisis Kebijakan Larangan Ekspor Bahan Baku Pertambangan dan Mineral” yang diterbitkan Kementerian Perdagangan disebutkan, sumber daya nikel Indonesia pada 2011 sebesar 2.633 juta ton bijih dengan potensi cadangan mencapai 577 juta ton bijih. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2013 merupakan puncak tertinggi ekspor nikel Indonesia yang mencapai 64.802.857 ton atau 1.685.247 dollar AS. Terdapat enam negara utama yang menjadi tujuan ekspor nikel Indonesia, yakni Jepang, China, Australia, Swiss, Yunani, dan Ukraina. Untuk menunjukkan kedaulatan rakyat Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya, Pemerintah Indonesia

melarang ekspor melalui penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sejak berlakunya UU Minerba, hingga 11 Januari 2014 ternyata perusahaan tambang belum sepenuhnya siap, smelter belum dibangun. Kondisi tersebut membuat pemerintah mau tidak mau harus mencari jalan keluar, antara lain merevisi sejumlah peraturan turunan dari UU Minerba. Selain Analisis Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Bahan Baku Mineral dan Pertambangan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, ada dua faktor yang menjadi dasar kebijakan pemerintah Indonesia di sektor minerba, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor internal antara lain hilirisasi pertambangan, peningkatan pembangunan nasional, peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan ini adalah negara-negara yang menggunakan bahan baku mineral di Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang umumnya keberatan dengan kebijakan minerba karena dianggap menyulitkan dan menaikkan biaya produksi perusahaan.

Uni Eropa memandang bahwa

1. Pasal XI:1 GATT 1994, karena dengan melarang ekspor bijih nikel, dengan mewajibkan bijih nikel, bijih besi dan kromium serta batubara dan produk batubara menjalani kegiatan pengolahan tertentu sebelum diekspor, dengan mewajibkan jumlah tertentu nikel dan batubara yang dijual di dalam negeri sebelum diekspor dan dengan memberlakukan persyaratan perizinan ekspor tertentu pada bijih nikel, limbah dan skrap logam serta batubara dan kokas, Indonesia memberlakukan tindakan yang membatasi ekspor bahan mentah yang relevan untuk produksi baja tahan karat;
2. Pasal 3.1 b) ASCM, karena skema pembebasan bea masuk khusus yang diperkenalkan oleh Indonesia dalam rangka mendorong pengembangan industri dan investasi dan/atau peningkatan pembangunan ekonomi di wilayah tertentu negara (“Kawasan Pengembangan Industri” atau “WPI”), memberikan periode pembebasan bea tambahan (diperpanjang) yang bergantung pada penggunaan mesin, instalasi, peralatan atau perkakas yang diproduksi secara lokal; di mana dukungan tambahan tersebut merupakan pemberian subsidi dalam arti Pasal 1.1 ASCM dan membuat subsidi itu bergantung pada penggunaan barang-barang domestik atas barang-barang impor, melanggar Pasal 3.1 b) ASCM; dan Pasal X:1 GATT 1994, karena Indonesia tidak segera mengumumkan semua tindakan penerapan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan ekspor dan penerbitan izin ekspor, sehingga memungkinkan pemerintah dan pedagang menjadi berkenalan dengan mereka.

Indonesia beralasan bahwa larangan ekspor tersebut dilakukan karena cadangan nikel Indonesia yang semakin menipis, penggunaan nikel untuk program pemerintah dalam pembuatan industri baterai kendaraan listrik.

Permasalahan kasus klaim Uni Eropa kepada World Trade Organization (WTO) terhadap pembatasan ekspor nikel dan bahan baku lainnya yang dilakukan Indonesia, adalah mengenai pembatasan secara tidak adil membatasi akses produsen UE terhadap bijih nikel khususnya, serta untuk memo, batu bara dan kokas, bijih besi dan kromium. Indonesia meyakini bahwa kebijakan pelarangan ekspor nikel merupakan tujuan yang paling transformatif, karena terkait dengan nilai tambah dan konservasi sumber daya, yang mengacu pada visi jangka panjang pembangunan Indonesia berkelanjutan. Masing-masing pihak memiliki argumentasi yang

sama kuat, namun untuk argumentasi Indonesia – dengan melihat contoh kasus pada bagian analisis, dapat ditekankan pada kepentingan nasional dan prinsip dasar kedaulatan negara.

Tri Antoro, 2023, menyajikan artikel berjudul *Indonesia Kuatkan Kerjasama dengan Uni Eropa*, sumber Humas Kemendag, antara lain menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong kolaborasi dan penguatan kerja sama bilateral sektor perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kebijakan perdagangan luar negeri terus diperbaiki untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia tengah mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang transparan, cepat, serta mempermudah pelaku bisnis. Terdapat pula rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk mendukung UMKM, serta memastikan persaingan dan sistem lokapasar yang sehat. Uni Eropa merupakan tujuan ekspor terbesar ke-3 dan sumber impor terbesar ke-4 bagi Indonesia. Pada 2022, total perdagangan Indonesia-Uni Eropa tercatat sebesar USD33,2 miliar. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Uni Eropa tercatat sebesar USD21,5 miliar sedangkan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar USD11,7 miliar. Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Uni Eropa pada 2022 adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya, asam lemak monokarboksilat industri, batu bara, tembaga, dan alas kaki dengan sol luar dari karet. Sementara impor utama Indonesia dari Uni Eropa pada 2022 adalah pipa dari besi dan baja, obat-obatan, vaksin, mesin pembuat bubur kertas, serta kertas atau karton daur ulang.

BM Lukita Grahadyarini, 2022, menyajikan artikel berjudul *Perdagangan Indonesia-Uni Eropa Diperkuat*, antara lain mengungkapkan bahwa Uni Eropa dan Indonesia berkomitmen mendorong kerja sama ekonomi kedua negara di tengah tantangan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina. Perdagangan Indonesia-Uni Eropa terus meningkat dalam setahun terakhir, dengan surplus perdagangan terhadap Eropa mencapai hampir 9 miliar euro atau sekitar Rp 159 triliun. Indonesia dan Uni Eropa berkomitmen terus mendorong kerja sama perdagangan kedua negara, termasuk melanjutkan negosiasi kesepakatan kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia-UE (IEU CEPA). Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia HE Vincent Piket mengemukakan, hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam setahun terakhir. Pada tahun 2021, meski dalam kondisi pandemi Covid-19, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa melonjak 26 persen hingga mencapai 16,5 miliar euro. Lonjakan itu, antara lain, didorong kenaikan harga komoditas, seperti sawit. Ekspor sawit ke negara-negara Uni Eropa tumbuh 9 persen.

Intan Faradella Sukanto, 2023, menyajikan artikel berjudul *Potensi Impor Eropa ke Indonesia*, antara lain mengungkapkan bahwa pasar barang impor Indonesia asal Uni Eropa umumnya, khususnya produk berupa mesin untuk industri tertentu dan produk dairy (susu dan olahannya) mencapai US\$ 11,1 miliar (sekitar Rp 173,96 triliun) pada tahun 2021, meningkat 9% dari nilai impor tahun 2020.

Negara asal impor terbesar berasal dari Jerman, nilai impor Indonesia dari negara tersebut mencapai US\$ 3,19 miliar (sekitar Rp 49,99 triliun) sepanjang 2021, tumbuh 5,41% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 3,02 miliar (sekitar Rp 47,33 triliun), merupakan 28,73% dari total impor Indonesia dari Uni Eropa, serta mencapai 2,14% dari total impor Indonesia sepanjang tahun 2022. Impor utama Indonesia dari Jerman antara lain berupa mesin untuk industri tertentu, bahan kimia lainnya, serta alat pengobatan dan perlengkapannya.

Tabel 6. Nilai Impor Menurut Kelompok Negara Asal Utama
Januari–Desember, 2020 dan 2021

Kelompok Negara	Januari-Desember 2020		Januari-Desember 2021		Perubahan Jan-Des 2021 thd Jan-Des 2020 (%)
	Nilai (Juta US\$)	Peranan (%)	Nilai (Juta US\$)	Peranan (%)	
APEC					
ASEAN	29 832,8	21,07	39 951,4	20,36	33,92
Thailand	6 483,8	4,58	9 146,5	4,66	41,07
Singapura	12 341,2	8,72	15 451,7	7,88	25,20
Philipina	592,0	0,42	1 273,3	0,65	115,08
Malaysia	6 933,0	4,90	9 451,0	4,82	36,32
Myanmar	187,2	0,13	165,9	0,08	-11,38
Kamboja	47,4	0,03	49,2	0,02	3,80
Brunei Darussalam	75,3	0,05	162,8	0,08	116,20
Laos	42,3	0,03	38,0	0,02	-10,17
Vietnam	3 130,6	2,21	4 213,0	2,15	34,57
NAFTA	10 465,1	7,39	13 610,4	6,94	30,06
Amerika Serikat	8 580,2	6,06	11 249,1	5,73	31,11
Kanada	1 615,5	1,14	2 054,0	1,05	27,14
Meksiko	269,4	0,19	307,3	0,16	14,07
NEGARA APEC LAINNYA	69 021,2	48,76	98 202,5	50,05	42,28
Jepang	10 672,0	7,54	14 644,3	7,46	37,22
Hongkong	2 747,2	1,94	2 878,4	1,47	4,78
Korea Selatan	6 849,4	4,84	9 427,2	4,81	37,64
Taiwan	3 572,0	2,52	4 350,0	2,22	21,78
Tiongkok	39 634,7	28,00	56 227,2	28,66	41,86
Papua Nugini	33,4	0,02	125,8	0,06	276,65
Australia	4 646,6	3,28	9 425,0	4,80	102,84
Selandia Baru	757,0	0,54	959,4	0,49	26,74
Chili	108,9	0,08	165,2	0,08	51,70
UNI EROPA	10 184,8	7,19	11 095,9	5,66	8,95
Jerman	3 023,9	2,14	3 187,6	1,63	5,41
Italia	1 556,8	1,10	1 728,3	0,88	11,02
Perancis	1 358,4	0,96	1 275,6	0,65	-6,10
Belanda	804,3	0,57	846,1	0,43	5,20
Belgia	526,1	0,37	767,7	0,39	45,92
Spanyol	456,8	0,32	684,1	0,35	49,76
Swedia	435,1	0,31	560,3	0,29	28,77
Finlandia	334,3	0,24	390,4	0,20	16,78
Austria	289,1	0,20	357,6	0,18	23,69
Denmark	161,6	0,11	205,3	0,10	27,04
Polandia	285,3	0,20	192,8	0,10	-32,42
Cheska	268,9	0,19	139,4	0,07	-48,16
Irlandia	133,5	0,09	136,6	0,07	2,32
Hungaria	131,2	0,09	105,0	0,05	-19,97
Malta	1,0	0,00	90,4	0,05	8 940,00
Uni Eropa Lainnya	418,5	0,30	428,7	0,22	2,44
LAINNYA	22 064,9	15,59	33 329,8	16,99	51,05
TOTAL IMPOR	141 568,8	100,00	196 190,0	100,00	38,58

Sumber: [bps.go.id](https://www.bps.go.id)

Impor Indonesia dari Uni Eropa yang terbesar kedua berasal dari Italia senilai US\$ 1,73 miliar (sekitar Rp 27,11 triliun) sepanjang tahun 2021, nilai tersebut naik 11,02% dari tahun sebelumnya dengan porsi mencapai 15,58% total impor Indonesia dari Uni Eropa. Urutan ketiga, impor dari Prancis dengan nilai impor sebesar US\$ 1,28 miliar (sekitar Rp 20,06 triliun) pada tahun 2021, nilai tersebut turun 6,1% dan porsinya mencapai 11,5% dari total impor Indonesia dari Uni Eropa. Urutan keempat adalah Belanda dengan impor senilai US\$ 846,2 juta (sekitar Rp 13,26 triliun). Nilai tersebut naik 5,2% dan atau 7,63% total impor

Indonesia dari Uni Eropa. Impor dari Belgia dengan nilai US\$ 767,7 juta (sekitar Rp 12,03 triliun) pada 2021, nilai tersebut tumbuh 45,92% dari tahun sebelumnya, atau mencapai 6,92% total impor Indonesia dari Uni Eropa.

Apa saja kebutuhan-impor sebuah negara berkembang kepada negara maju teknologi ? Untuk memahami potensi impor barang asal Uni Eropa di Indonesia, berikut merupakan potensi impor dari kelima negara asal impor utama Uni Eropa beserta rincian produk utama yang diimpor ke Indonesia , merupakan masukan/bahan/gagasan penting bagi perumusan GBHN *cetak-biru pembangunan-teknologi,pertanian-modern dan tulang-punggung produksi-strategis masa-depan NKRI* :

1. Jerman

Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia membukukan impor dengan Jerman US\$ 3,19 miliar (sekitar Rp 49,99 triliun) per tahun 2021. Nilai tersebut terlihat naik 5% dibandingkan impor tahun sebelumnya yang tercatat di angka US\$ 3,02 miliar (sekitar Rp 47,33 triliun).

Jika dilihat dari rekam jejak perdagangan Indonesia dengan Jerman, impor dalam 10 tahun terakhir telah banyak berkurang. Tercatat nilai impor terendah Indonesia dari Jerman adalah US\$ 3,02 miliar (sekitar Rp 47,33 triliun) dan untuk nilai impor tertinggi di angka US\$ 4,43 miliar (sekitar Rp 69,43 triliun).

Lima produk utama yang diimpor Indonesia dari Jerman adalah (1) Mesin, peralatan mekanik, reaktor nuklir, boiler. Masuk dalam kode HS 84, Mesin, peralatan mekanik, reaktor nuklir, boiler merupakan kelompok produk barang impor yang dikategorikan bersama dengan dan bagiannya. Impor produk ini dari Jerman berada di urutan pertama. Indonesia mengimpor sebanyak US\$ 1,08 miliar (sekitar Rp 16,93 triliun). Nilai impor Mesin, peralatan mekanik, reaktor nuklir, boiler;bagiannya ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu menembus US\$ 1,25 miliar (sekitar Rp 19,59 triliun). (2) Peralatan optik, fotografi, sinematografi, pengukuran, pemeriksaan, presisi, medis atau bedah. Nilai impor produk peralatan optik, fotografi, sinematografi, pengukuran, pemeriksaan, presisi, medis atau bedah sebesar US\$ 102,82 juta (sekitar Rp 1,62 triliun) per Desember 2021. (3) Mesin dan peralatan listrik dan bagian-bagiannya. Indonesia melakukan impor produk ini berasal dari 139 negara. Impor Mesin dan peralatan listrik dan bagian -bagiannya dari negara ini berada di urutan 11. Pada 2021, Indonesia tercatat melakukan impor sebanyak US\$ 229,56 juta (sekitar Rp 3,61 triliun). Selain negara tersebut, impor terbesar Mesin dan peralatan listrik dan bagian -bagiannya berasal dari Cina, Singapura, Taipei, Cina, Jepang dan Korea, Republik.(4) Kendaraan selain stok kereta api atau trem, dan suku cadang dan aksesorinya. Indonesia tercatat mengimpor produk ini dari 89 negara. Impor Kendaraan selain stok kereta api atau trem, dan suku cadang dan aksesorinya dari negara ini berada di urutan ketujuh. Pada 2021, Indonesia tercatat melakukan impor sebanyak US\$ 145,91 juta (sekitar Rp 2,29 triliun) Selain negara tersebut, impor terbesar Kendaraan selain stok kereta api atau trem, dan suku cadang dan aksesorinya berasal dari Jepang, Cina, Thailand, India dan Brazil.(5) Produk Kimia Lain-lain. Impor Produk Kimia Lain-lain dari negara ini berada di urutan ketujuh. Pada 2021, Indonesia tercatat melakukan impor sebanyak US\$ 144,02 juta (sekitar Rp 2,26 triliun). Negara lain yang masuk lima besar suplier produk impor ini ke Indonesia adalah RRT, Jepang, Korea, Republik, Amerika Serikat dan Singapura.

2. Italia

Indonesia membukukan impor dengan Italia sebesar US\$ 1,73 miliar (sekitar Rp 27,11 triliun) sepanjang tahun lalu. Nilai tersebut naik 11,02% dari tahun sebelumnya dengan porsi mencapai 15,58% total impor Indonesia dari Uni Eropa. Lima produk utama yang diimpor Indonesia dari Italia adalah: (1) Hidrokarbon Tds, Halogenasi, Sulfonasi, senilai US\$ 143,31 juta (sekitar Rp 2,25 triliun) pada tahun 2021, (2) Pulp dan Sisa-sisa Kertas, sebesar US\$ 116,28 juta (sekitar Rp 1,83 triliun) per Desember 2021. Indonesia juga mengimpor Pulp dan sisa-sisa kertas dari negara lain, seperti Inggris, Belanda, Swedia, Finlandia, dll, (3) Mesin Lain Untuk Industri Tertentu, senilai US\$ 83,31 juta (sekitar Rp 1,3 triliun) pada tahun 2021. Negara pengekspor terbesar untuk produk ini dari Uni Eropa ke Indonesia ialah Jerman. (4) Produk Logam Tidak Mulia, Lain sebesar US\$ 82,67 juta (sekitar Rp 1,3 triliun) pada tahun 2021. (5) Perkakas Tangan dan Mesin Bukan Listrik, sebesar US\$ 73,53 juta (sekitar Rp 1,15 triliun) pada Desember 2021.

3. Prancis

Indonesia membukukan impor dengan Perancis sebesar US\$ 1,28 miliar (sekitar Rp 20,06 triliun) data per Desember 2021, menurun 6,11% dibandingkan impor tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US\$ 1,36 miliar (sekitar Rp 21,39 triliun). Rekam jejak perdagangan Indonesia dengan Perancis, impor dalam 10 tahun terakhir telah mengalami penurunan cukup dalam. Terendah impor Indonesia adalah US\$ 1,28 miliar (sekitar Rp 20,06 triliun) dan untuk impor tertinggi di angka US\$ 1,93 miliar (sekitar Rp 30,35 triliun).

Lima produk utama yang diimpor Indonesia dari Perancis adalah (1) Minyak esensial dan resinoid, pada 2021, Indonesia tercatat mengimpor sebanyak US\$ 176,78 juta (sekitar Rp 2,78 triliun) mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat US\$ 96,81 juta (sekitar Rp 1,52 triliun). (2) Mesin, peralatan mekanik, reaktor nuklir, boiler, sebesar US\$ 171,47 juta (sekitar Rp 2,7 triliun, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai US\$ 299,58 juta (sekitar Rp 4,71 triliun). (3) Mesin dan peralatan listrik dan bagian-bagiannya senilai US\$ 102,45 juta (sekitar Rp 1,61 triliun), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai US\$ 108,6 juta (sekitar Rp 1,7 triliun). Indonesia tercatat mengimpor produk ini dari 147 negara. Impor Mesin dan peralatan listrik dan bagian-bagiannya dari Perancis tercatat berada di urutan 16. Negara lain yang masuk lima besar suplier produk impor ini ke Indonesia adalah Cina, Singapura, Taipei, RRT, Jepang dan Korea. (4) Produk susu senilai US\$ 89,9 juta (sekitar Rp 1,41 triliun), naik dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat US\$ 51,58 juta (sekitar Rp 811,2 miliar). Impor Produk susu dari Perancis tercatat berada di urutan keempat. Selain negara tersebut, impor terbesar Produk susu berasal dari Selandia Baru, Amerika Serikat, Belgia dan Jerman. Indonesia juga tercatat mengimpor produk ini dari 29 negara lain. (5) Produk farmasi, senilai US\$ 53,08 juta (sekitar Rp 834,8 miliar). Indonesia mengimpor produk ini dari 72 negara. Impor produk farmasi dari Perancis tercatat berada di urutan delapan. Negara lain yang masuk lima besar pemasok produk impor ini ke Indonesia adalah Cina, Amerika Serikat, Belgia, Spanyol dan India.

4. Belanda

Indonesia membukukan impor dengan Belanda US\$ 846,12 juta (sekitar Rp 13,26 triliun) per Desember 2021, naik 5,2% dibandingkan impor tahun sebelumnya yang tercatat US\$ 804,33 juta (sekitar Rp 12,65 triliun). Rekam jejak perdagangan Indonesia dengan Belanda, impor dalam 10 tahun terakhir menurun sangat tajam. Terendah impor Indonesia adalah US\$ 723,62

juta (sekitar Rp 11,38 triliun) dan untuk impor tertinggi di angka US\$ 1,24 miliar (sekitar Rp 19,5 triliun).

Lima produk utama yang diimpor Indonesia dari Belanda adalah: (1) Mesin, peralatan mekanik, reaktor nuklir, boiler US\$ 135,26 juta (sekitar Rp 2,08 triliun), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai US\$ 138,96 juta (sekitar Rp 2,18 triliun). (2) Produk farmasi senilai US\$ 78,96 juta (sekitar Rp 1,24 triliun) pada tahun 2021. (3) Plastik . Impor Plastik dari negara ini berada di urutan 15. Pada 2021, Indonesia tercatat melakukan impor US\$ 74.23 juta (sekitar Rp 1.17 triliun). Negara lain yang masuk lima besar suplier produk impor ini ke Indonesia adalah RRT, Thailand, Singapura, Korea, Republik dan Malaysia.(4) Bubur kayu atau bahan selulosa berserat lainnya. Produk ini diperoleh dari 38 negara. Impor Bubur kayu atau bahan selulosa berserat lainnya dari Belanda berada di urutan sepuluh, pada 2021 senilai US\$ 65.31 juta (sekitar Rp 1,03 triliun). Negara lain yang masuk lima besar suplier produk impor ini ke Indonesia adalah Amerika Serikat, Kanada, Italia, Britania Raya dan Selandia Baru. (5) Mesin dan peralatan listrik dan bagian –bagiannya. Indonesia juga tercatat banyak mengimpor mesin dan peralatan listrik dan bagian -bagiannya dari Belanda, nilai impor pada 2021 US\$ 60,2 juta (sekitar Rp 946,77 miliar), tahun sebelumnya US\$ 66,18 juta (sekitar Rp 1,04 triliun). Impor Mesin dan peralatan listrik dan bagian -bagiannya dari Belanda tercatat berada di urutan 19. Selain negara tersebut, impor terbesar Mesin dan peralatan listrik dan bagian-bagiannya berasal dari Cina, Singapura, Taipei,RRT, Jepang dan Korea, Republik. Indonesia juga tercatat mengimpor produk ini dari 142 negara.

5. Belgia

Indonesia membukukan impor dengan Belgia sebesar US\$ 767,7 juta (sekitar Rp 12,03 triliun) pada 2021, tumbuh 45,92% dari tahun sebelumnya, mencapai 6,92% total impor Indonesia dari Uni Eropa.

Lima produk utama yang diimpor Indonesia dari Belgia adalah : (1) Bahan Obat-obatan dan Kesehatan, sebesar US\$ 221,32 juta (sekitar Rp 3,48 triliun) per Desember 2021.(2) Susu, Kep. Susu dan Hasilnya kec. Mentega dan Keju, US\$ 111,33 juta (sekitar Rp 1,75 triliun) pada tahun 2021, (3) Sayur-Sayuran Diawetkan, US\$ 40,83 juta (sekitar Rp 642,14 miliar) pada tahun 2021, (4) Mesin Lainnya Untuk Industri Tertentu, US\$ 24,35 juta (sekitar Rp 382,95 miliar) per Desember 2021, (5) Persenyawaan Organo-Inorganik dan Heterosiklik sebesar US\$ 24,14 juta (sekitar Rp 379,65 miliar) pada tahun 2021.

15. HUBUNGAN DIPLOMATIK NKRI DENGAN NEGARA PESEMAKMURAN INGGRIS

Negara persemakmuran (commonwealth of nations) merupakan persatuan bebas negara-negara berdaulat bekas jajahan Inggris yang mempertahankan ikatan persahabatan dan kerjasama praktis dengan negara tersebut.

Sumber Gpriority, 2023, menyajikan makalah berjudul *5 Tahun Dijajah Inggris, Kenapa Indonesia Bukan Negara Persemakmuran*, antara lain mengungkapkan bahwa wafatnya Ratu Elizabeth II memunculkan gejolak di antara negara-negara persemakmuran Inggris yang diisukan menginginkan referendum. Negara persemakmuran (commonwealth of nations) merupakan persatuan bebas negara-negara berdaulat bekas jajahan Inggris yang

mempertahankan ikatan persahabatan dan kerjasama praktis dengan negara tersebut. Meskipun pernah dijajah Inggris selama kurang lebih 5 tahun dari 1811 hingga 1816 Indonesia tidak termasuk ke dalam persemakmuran, karena negara persemakmuran adalah negara-negara yang pernah menjadi koloni Inggris. Indonesia memang pernah dijajah oleh Inggris, namun tidak menjadi koloni negara tersebut. Hal ini karena NKRI yang masih bernama Hindia-Belanda pada saat itu, diserahkan kembali ke tangan Belanda. Inggris menduduki Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 setelah menang perang melawan Perancis yang berada di bawah komando Napoleon Bonaparte. Peristiwa ini lantas membuat Belanda kehilangan kekuasaannya di Indonesia. Pasalnya pada masa itu Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis, yang secara otomatis membuat wilayah jajahannya turut di bawah kontrol negara Perancis. Setelah kepergian Belanda, Inggris datang ke tanah air dengan mengirimkan Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa, sebelum kemudian dipromosikan sebagai Gubernur Sumatra. Selama memerintah di Indonesia, Raffles menghapus sistem monopoli perdagangan, sistem tanam paksa Belanda, mengubahnya menjadi lebih adil dengan sistem sewa tanah dan pembagian skema wilayah Pulau Jawa. Penjajahan Inggris di Indonesia sendiri berlangsung selama 5 tahun. Selanjutnya, Inggris menyerahkan kembali Hindia-Belanda kepada Belanda yang telah merdeka dari Perancis. Penyerahan tersebut terjadi pada 1814 ketika Inggris dan Belanda mengadakan pertemuan di London dan menghasilkan kesepakatan Konvensi London. Dalam Konvensi tersebut, Inggris bersedia untuk menyerahkan kembali Hindia-Belanda kepada Belanda. Setelahnya, penjajahan Belanda atas Indonesia kembali selama beberapa tahun, yang berakhir dengan Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dari hasil pemberian Inggris ataupun negara lain, tetapi dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. (Vn)

Sumber Era ID. Menyajikan artikel berjudul *Negara Persemakmuran Inggris: Tujuan dan Anggota-Anggota di Dalamnya*, antara lain mengungkapkan bahwa sepeninggal Ratu Elizabeth II, secara otomatis putra sulungnya, yaitu Pangeran Charles akan memegang kepemimpinan negeri Inggris Raya sebagai raja dan membawahi 14 negara persemakmuran. The Commonwealth of Nations disebut sebagai Negara-negara Persemakmuran, yang merupakan sebuah organisasi internasional yang terdiri dari Negara-negara berdaulat yang dibentuk atau yang pernah dijajah oleh Inggris (Great Britain). Seiring dengan berkembangnya organisasi ini, negara-negara yang tidak menjadi bekas jajahan Inggris juga dapat bergabung di dalamnya seperti Mozambik dan Rwanda. Negara-negara tersebut sudah merdeka dan mempunyai sistem pemerintahannya sendiri, berserikat karena mempunyai tujuan yang serupa dengan saling mendukung negaranya satu sama lain, di seluruh dunia, ada



sebanyak 53 negara yang tergabung di dalamnya, tersebar di wilayah Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Pasifik, dan Karibia. Pada awalnya, anggota Negara Persemakmuran Inggris terdiri dari tiga negara yang bergabung dengan Britania Raya dalam negara persemakmuran, antara lain Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Terdapat negara yang tidak pernah dijajah Inggris, tapi memutuskan berserikat dalam negara persemakmuran, diantaranya Namibia, Kamerun, dan Mozambik. Saat ini, jumlah

total populasi seluruh negara persemakmuran ini ada sekitar 2,4 miliar orang atau sekitar 30 persen dari populasi manusia di Bumi.

Tujuan Negara Persemakmuran Inggris adalah sebagai berikut. Negara-negara anggota persemakmuran Inggris memiliki tujuan yang serupa, yaitu bersatu dan menjalin kerja sama dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan HAM. Selain itu, anggota negara persemakmuran juga saling menyepakati bahwa isu lingkungan dan dampak perubahan iklim juga cukup penting untuk diselesaikan bersama-sama.

Daftar Negara Persemakmuran Inggris adalah sebagai berikut.

- Afrika: Kenya, Malawi, Lesotho, Botswana, Kamerun, Afrika Selatan, Tanzania, Uganda, Zambia, Gambia, Ghana, Malta, Mauritius, Mozambik, Namibia, Nigeria, Rwanda, St. Kitts dan Nevis, Swaziland, Seychelles, dan Sierra Leone.
- Asia: Bangladesh, Brunei, India, Malaysia, Singapura, Pakistan, dan Sri Lanka.
- Eropa: Britania Raya dan Cyprus.
- Amerika: Kanada.
- Pasifik: Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Kiribati, Fiji, Nauru, Kepulauan Solomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
- Karibia: Belize, St. Lucia, St. Vincent dan Grenadines, Bahamas, Antigua dan Barbuda, Barbados, Dominika, Trinidad dan Tobago, Jamaika, Grenada, dan Guyana.

Negara persemakmuran memiliki keyakinan bahwa setiap anak berhak menerima pendidikan sehingga mampu mencapai cita-cita dan berkehidupan yang lebih baik, serta menerima perawatan kesehatan ketika diperlukan.

16. TENTANG OKI

OKI dibentuk tahun 1967 untuk meningkatkan solidaritas Islam serta menjadi wadah kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia senantiasa memainkan peran aktif dalam mendorong kiprah dan kerja sama OKI.

Surti Risanti , 2023, menyajikan artikel berjudul *57 Daftar Negara OKI, Organisasi Terbesar Setelah PBB*, sumber Fortune Media IP Limited, antara lain mengungkapkan daftar anggota OKI yang tersebar di 4 benua.



1. Yordania – Bergabung 1969
2. Afghanistan – Bergabung 1969
3. Indonesia – Bergabung 1969
4. Uzbekistan – Bergabung 1996
5. Iran – Bergabung 1969
6. Pakistan – Bergabung 1969
7. Turki – Bergabung 1969
8. Chad – Bergabung 1969
9. Tunisia – Bergabung 1969
10. Algeria – Bergabung 1969
11. Arab Saudi – Bergabung 1969
12. Senegal – Bergabung 1969
13. Sudan – Bergabung 1969
14. Somalia – Bergabung 1969
15. Guinea – Bergabung 1969

16. Palestina – Bergabung 1969
17. Kuwait – Bergabung 1969
18. Lebanon – Bergabung 1969
19. Libya – Bergabung 1969
20. Mali – Bergabung 1969
21. Malaysia – Bergabung 1969
22. Mesir – Bergabung 1969
23. Maroko – Bergabung 1969
24. Mauritania – Bergabung 1969
25. Niger – Bergabung 1969
26. Yaman – Bergabung sejak 1969
27. Uni Emirat Arab (UEA) – Bergabung 1972
28. Bahrain – Bergabung 1972
29. Oman – Bergabung 1972
30. Sierra Leone – Bergabung 1972
31. Suriah – Bergabung 1972
32. Qatar – Bergabung 1972
33. Bangladesh – Bergabung 1974
34. Burkina Faso – Bergabung 1974
35. Gabon – Bergabung 1974
36. Gambia – Bergabung 1974
37. Guinea-Bissau – Bergabung 1974
38. Kamerun – Bergabung 1974
39. Uganda – Bergabung 1974
40. Irak - Bergabung 1975
41. Comoros – Bergabung 1976
42. Maladewa – Bergabung 1976
43. Djibouti – Bergabung 1978
44. Benin – Bergabung 1983
45. Brunei Darussalam – Bergabung 1984
46. Nigeria – Bergabung 1986
47. Albania – Bergabung 1992
48. Tajikistan – Bergabung 1992
49. Azerbaijan – Bergabung 1992
50. Kyrgyzstan – Bergabung 1992
51. Turkmenistan – 1992
52. Mozambik – Bergabung 1994
53. Kazakhstan – Bergabung 1995
54. Togo – Bergabung 1997
55. Suriname – Bergabung 1996
56. Guyana – Bergabung 1998
57. Pantai Gading – Bergabung 2001

Ty Haqqi, 2023, menyajikan artikel berjudul *the 5 most powerful Islamic countries in the world*, menyebutkan

- Saudi Arabia berbasis SDA Migas, pertumbuhan PDB 8,7 % atau terbesar dalam G20, melakukan modernisasi, meningkatkan belanja APBN hankam, dengan 80% pembelian alatista ke AS.

- Mesir yang bergejala pertumbuhan penduduk mengatasi pertumbuhan ekonomi dan gejala berkembangnya kekuasaan militer.
- Pakistan adalah negara ber SD militer terkuat diantara negara-negara Muslim karena ancaman India, berada dalam permasalahan perekonomian.
- Turkiye adalah perekonomian Muslim terbesar ketiga di muka-bumi , meningkatkan SD militer karena Syria.
- \Indonesia ber PDB diatas USD 1 Triliun , berupaya meningkatkan swasembada pangan , perekonomian bertulang punggung kelas menengah , dalam bayangan ancaman inflasi, membangun kekuatan militer dan martitim menghadapi ancaman RRT dan nuklir Australia.

Berdasarkan laporan terbaru *International Monetary Fund* (IMF) yang dirilis akhir tahun 2020 menunjukkan, total GDP Indonesia menempati posisi pertama dengan nominal sebesar 1.088.768 juta dolar AS. Sumber lain menyatakan bahwa GDP per kapita Uni Emirat Arab tertinggi, mencapai 31.948 dolar AS menjadikannya sebagai salah satu negara anggota OKI paling makmur. Sumber MySharing DOT CO , 8 tahun lalu, menyajikan artikel berjudul *Kemiskinan Masih Jadi Momok Negara Anggota OKI*, mengungkapkan antara lain bahwa sset keuangan syariah global telah mendekati hampir 2 triliun dolar AS. Namun, industri ini dinilai belum sukses menciptakan aktivitas ekonomi yang memadai untuk mengentaskan kemiskinan. Negara anggota OKI menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal pengentasan kemiskinan, jumlahnya menurun dari 396 juta jiwa pada 1990 menjadi 322 juta jiwa pada 2011, atau menurun 18,9 persen. Pada 1990 negara anggota OKI memiliki populasi 963 juta jiwa, dimana 41,1 persen diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam kurun waktu 1990-2011 populasi penduduk di negara anggota OKI meningkat hingga lebih dari 471 juta jiwa dan jumlah penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari 1,25 dolar per hari pun menurun. Hasilnya, secara persentase jumlah penduduk miskin pun menurun menjadi 22,3 persen pada 2011. Pada 1990 , 22 persen masyarakat dunia yang tinggal di negara anggota OKI. Persentasenya kemudian meningkat menjadi 33,1 persen pada 2011. Dibanding pada 1990, jumlah penduduk miskin telah berkurang di seluruh kawasan negara anggota OKI, kecuali di Sub Sahara Afrika. Sebagai contoh, negara anggota OKI di Asia Selatan telah sukses menurunkan angka kemiskinan dari 145 juta jiwa pada 1990 menjadi 83 juta jiwa pada 2011, atau menurun sekitar 41 persen. Pada 1990 sebanyak 37 persen populasi masyarakat miskin negara anggota OKI ada di Asia Selatan, dan pada 2011 telah turun menjadi hanya 26 persen. Di lain pihak, kawasan Sub Sahara Afrika mencatat perlambatan dalam pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di kawasan itu malah meningkat dari 137 juta jiwa pada 1990 menjadi 192 juta jiwa pada 2011, dengan 46 persen dari total populasinya hidup di bawah garis kemiskinan. Jika dilihat dalam cakupan negara anggota OKI, kawasan Sub Sahara Afrika menyumbang 60 persen penduduk miskin pada 2011, meningkat dari 35 persen pada 1990. Untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, negara anggota OKI pun didorong agar mengarahkan program pengentasan kemiskinan pada pemberdayaan ekonomi dan penyediaan kebutuhan dasar, meningkatkan peran zakat dan wakaf, memperluas program jaring pengaman sosial, berkolaborasi dengan lembaga non pemerintah dan lembaga internasional, mengembangkan mekanisme respon darurat, meningkatkan kerjasama antar negara anggota OKI dan memperluas akses pembiayaan.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia , 2023, menyajikan artikel berjudul *Konferensi Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri OKI ke-18*, antara lain mengungkapkan bahwa konferensi telah mengesahkan Resolusi mengenai *Repeated Crimes of Desecration and Burning of Copies of Al-Mushaf ash-Sharif in the Kingdoms of Sweden and Denmark* dan *Statement on the Storming of the Blessed Al-Aqsa Mosque by Israel*. Secara virtual, Menlu RI

Ibu Retno Marsudi telah menyampaikan kecaman atas aksi pembakaran Al-Quran, karena kebebasan berekspresi tidak seharusnya melukai agama apapun.

Sumber PPIH, 2022, menyajikan makalah berjudul Indonesia Pertahankan Posisi Keempat dalam SGIE 2022, Sumber: republika.co.id/berita/r9lzfj457/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022, antara lain mengungkapkan bahwa Indonesia mempertahankan posisinya pada *The Global Islamic Economy Indicator* dalam *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022* yang diluncurkan DinarStandard di Dubai, Uni Emirate Arab, pada hari Kamis (31/3/2022). Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab.

CEO DinarStandard Rafi-uddin Shikoh menyampaikan, meski tetap berada di peringkat yang sama seperti tahun lalu, Indonesia mengalami kenaikan signifikan di sektor makanan halal. Indonesia naik dua peringkat ke posisi kedua dalam sektor *halal food*. Indonesia mempertahankan posisi keempat di GIEI secara keseluruhan peringkat, Indonesia terus memperlihatkan kinerja yang baik dalam meningkatkan peringkat Halal Food. Ekspor makanan halal ke negara-negara OKI meningkat 16 persen pada 2021. Indonesia juga mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan sertifikasi halal, antara lain melalui digitalisasi. Sektor keuangan syariah di Indonesia juga punya prospek menjanjikan dengan merger tiga bank anak usaha bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia.

Indonesia berada di posisi keenam di sektor keuangan syariah, ketiga dalam modest fashion, kesembilan dalam farmasi dan kosmetik, namun Indonesia tidak masuk Top 10 untuk pariwisata ramah muslim dan media hiburan berkarakter Muslim.

Laporan tersebut menyebutkan konsumsi ekonomi syariah global yang mencakup enam sektor ekonomi riil mencapai dua triliun USD AS atau oleh 1,9 miliar Muslim seluruh dunia hingga kuartal III 2021, aset keuangan syariah global tercatat 3,6 triliun dolar AS, tumbuh 7,8 persen (yoy). Kontribusi terbesar konsumsi sektor riil berasal dari makanan halal yang sebesar 1,67 triliun dolar AS, tumbuh 7,1 persen, diikuti oleh *modest fashion* khas-Muslim sebesar 375 miliar dolar AS yang tumbuh 6,1 persen, media dan rekreasi sebesar 308 miliar dolar AS atau tumbuh 7,5 persen.

DinarStandard memproyeksikan dengan pertumbuhan rata-rata 7,5 persen per tahun, di mana konsumsi dalam ekonomi syariah global dapat mencapai 2,8 triliun dolar AS pada 2025.

Dari sisi investasi di sektor ekonomi syariah, terjadi peningkatan signifikan hingga 118 persen (yoy) menjadi 25,7 miliar dolar AS.

Indonesia termasuk dalam enam negara yang meraih investasi terbesar atau lebih dari 20 transaksi investasi selama 2020-2021. Negara lain adalah Uni Emirate Arab, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki. Mayoritas atau sekitar 66,4 persen investasi ditanamkan pada sektor keuangan syariah. Diikuti oleh makanan halal sebesar 15,5 persen, farmasi sebesar delapan persen, media lima persen, dan perjalanan sebesar 4,9 persen. Impor negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam tercatat 279 miliar dolar AS pada 2020, didominasi oleh halal food sebesar 72 persen. Laporan yang menghitung indeks peringkat dari 81 negara ini mencatat pergerakan signifikan Indonesia pada halal food, diikuti farmasi dan kosmetik, dan fashion.

Konsumsi ekonomi Syariah bagi 2 miliar jiwa atau 25 % penduduk dunia¹ mencapai USD 2 Triliun pertahun atau sekitar 5 % konsumsi dunia yang besarnya mencapai USD 44 Triliun pertahun. Sumber TheWorldCounts, 2023, menyajikan artikel berjudul *Consumer Spending*, antara lain mengungkapkan bahwa belanja-konsumsi barang/jasa termasuk kendaraan dan belanja rekreasi dunia pertahun sebesar USD 44 Triliun atau USD 1,4 Juta perdetik. Barang konsumsi terpopuler di muka bumi adalah Coca-Cola, Lay's Chips, Sony PlayStation, The iPad, Star Wars tickets, Toyota Corolla, Angry Birds game, Rubik's Cube, Michael Jackson "Thriller" album, dan Harry Potter books dengan berbagai produsen terbesar, yaitu Nestle, Procter & Gamble, PepsiCo, Unilever, JBS SA, Coca Cola Company, AB Inbev, Tyson Foods, Mondelez dan L'Oreal. Pasar konsumsi terbesar adalah US, RRT, Japan, Germany and the UK mencakupi separuh konsumsi dunia, dimana AS sendirian mencakupi 29 % belanja konsumsi dunia.

Pewarta; Yashinta Difa Pramudyani, dari Antara, 2023, menyajikan artikel berjudul *Indonesia dukung Gambia gelar KTT OKI dengan hasil konkret*, antara lain mengungkapkan bahwa Menlu RI Retno Marsudi (kanan) menerima kunjungan Menlu Gambia Mamadou Tangara (kiri) di Gedung Pancasila, Jakarta, pada Selasa (24/1/2023). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan dukungan Indonesia untuk Gambia yang akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pertemuan dengan Menlu Gambia Mamadou Tangara di Jakarta, Selasa, Retno menyampaikan harapan agar KTT OKI yang akan digelar akhir tahun ini dapat membawa hasil yang konkret. "Indonesia mendukung Gambia untuk dapat menghasilkan kerja sama yang dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat negara anggota OKI, antara lain melalui kerja sama untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi perempuan Afghanistan, serta kerja sama penguatan kapasitas di bidang pertanian," kata Retno dalam keterangan tertulis Kemlu RI. Retno menyatakan kesiapan Indonesia untuk memberikan pelatihan keprotokolan dan persidangan internasional kepada Gambia guna meningkatkan kesiapan negara itu menyelenggarakan KTT OKI tersebut. Selain membahas kerja sama dalam kerangka forum OKI, kedua menlu juga mendiskusikan berbagai peluang peningkatan kerja sama bilateral. "Indonesia ingin menjadi bagian dari kisah sukses pembangunan ekonomi Afrika," ujar Retno kepada Tangara. Secara khusus, kedua menlu membahas tindak lanjut beberapa inisiatif dalam *Indonesia-Africa Forum 2018* dan *Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019*. Retno juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu merenovasi Agricultural Rural Farmers Training Centre (ARFTC) di Jenoi, Gambia, yang dibangun Indonesia pada 1996. Dengan renovasi itu, ARFTC diharapkan dapat menjadi *hub* regional untuk pelatihan petani di Afrika Barat. Kedua menlu juga membahas rencana *preferential trade agreement* (PTA) antara Indonesia dan Economic Community of West African States (ECOWAS), yang diusulkan Indonesia sejak 2017. Tangara menyampaikan kesiapan Gambia menindaklanjuti rencana PTA tersebut. Di bidang kesehatan, Retno menginformasikan bahwa vaksin COVID-19 buatan Indonesia, IndoVac, saat ini dalam proses pengajuan daftar penggunaan darurat (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dia menyampaikan keinginan Indonesia untuk semakin terlibat dalam program-program kesehatan di Gambia.

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2023, menyajikan artikel berjudul Indonesia Dorong Pemajuan Hak-Hak Perempuan dalam Konferensi Tingkat Menteri OKI, antara lain mengungkapkan bahwa Indonesia mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar

¹ Melansir *World Population Review*, berikut daftar agama terbesar di dunia berdasarkan jumlah pemeluknya pada 2020, yaitu Kristen (2,38 miliar), Islam (1,91 miliar), Hindu (1,16 miliar), Buddha (507 juta), Agama lokal (430 juta), Agama lainnya (61 juta), Yahudi (14,6 juta)

menjadi organisasi yang bersatu, adaptif dan bermanfaat bagi Umat dan dunia. OKI harus terus memperkuat kesatuan, solidaritas dan spirit kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Umat dan dunia saat ini. Pernyataan nasional Indonesia tsb disampaikan Direktur Kerja Sama Multilateral Duta Besar Tri Tharyat, mewakili Menlu RI, dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-49 OKI di Nouakchott, Mauritania, pada 16-17 Maret 2023. Terdapat empat pesan utama yang disampaikan Indonesia dalam pertemuan tersebut.

- Pertama mengenai pemajuan hak-hak perempuan. Islam sangat mengormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Kontribusi perempuan dalam dunia Islam juga sangat nyata. Indonesia mendorong agar OKI menjadikan isu hak-hak perempuan sebagai salah satu agenda yang menjadi perhatian utama.
- Kedua, OKI harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatasi situasi di Afghanistan. Indonesia mendorong agar OKI mendesak Pemerintah Taliban untuk membatalkan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Indonesia juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam kunjungan ulama negara-negara anggota OKI ke Afghanistan. Komitmen Indonesia dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan di Afghanistan sangat jelas. Pada bulan Desember 2022, Indonesia bersama Qatar menyelenggarakan Konferensi Internasional mengenai Pendidikan bagi Perempuan Afghanistan yang berhasil mengumpulkan komitmen bantuan internasional untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Afghanistan.
- Ketiga yang disampaikan Indonesia adalah mengenai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Di tengah kesewenang-wenangan penjajahan Israel, Indonesia tegaskan pentingnya OKI untuk bersatu dan lakukan langkah konkrit untuk dukung Palestina. Hal ini termasuk melalui dukungan terhadap permintaan pendapat hukum (*Advisory Opinion*) dari Mahkamah Internasional (ICJ) serta dorongan terhadap proses perdamaian.
- Keempat, hal terakhir yang disampaikan oleh Indonesia adalah pentingnya OKI perkuat kerja sama konkrit dalam bidang pembangunan. Hal ini terutama agar OKI dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat. Beberapa bidang kerja sama yang diusulkan Indonesia antara lain dalam pengembangan vaksin, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan industri halal. Indonesia juga mendorong kolaborasi OKI dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pusat Kerja Sama Selatan-Selatan yang berkedudukan di Jakarta.

Artikel berjudul *Di Konferensi Tingkat Menteri OKI, Mensos Paparkan Langkah Strategis dalam Penanganan Masalah Sosial*, antara lain mengungkapkan bahwa di Kairo, 8 Juni 2023, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah nyata dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah menyusun sistem perlindungan sosial dan kebijakan yang meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sebagai bagian penting sambutan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam forum Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo, Mesir.. Dalam kesempatan yang dihadiri delegasi dari 40 negara itu, Mensos memaparkan secara lengkap kebijakan dan program Kemensos dalam menangani berbagai masalah sosial.

- Mensos menjelaskan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan, pemerintah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pengambilan data

lebih terperinci tentang profil Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hingga saat ini, setidaknya 100 juta penerima manfaat terdaftar dalam DTKS dengan penyandang disabilitas. DTKS menjadi acuan pelaksanaan program jaminan kesehatan gratis (PBI-JKN), membebaskan lebih dari 8.000 orang dari pasung,” katanya dalam konferensi dengan topik '*Social Justice and Social Security*'.

- DTKS juga menjadi penopang penyelenggaraan program perlindungan dan sistem jaminan sosial untuk keluarga miskin yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, tahun 2022 telah menjangkau hampir 10.000.000 KPM PKH dan 18.800.000 penerima manfaat Sembako.
- Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah juga menyelenggarakan program perlindungan sosial selama pandemi. Bersama PT Pos Indonesia sebagai penyalur, kelompok masyarakat terdampak pandemi menerima bantuan berupa BLT BBM dan BLT minyak goreng.
- Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok miskin, Kemensos membantu dengan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Program ini memberikan bantuan usaha dan peningkatan kapasitas kewirausahaan, tahun lalu program tersebut mencapai dan meningkatkan taraf hidup 10.000 keluarga di seluruh Indonesia. PENA membantu usaha mikro di 5 klaster; kuliner, kerajinan tangan, barang dan jasa, pertanian dan perkebunan.
- Untuk mendorong pendapatan kelompok marjinal, pemerintah telah membangun dua rumah susun 5 lantai dan akan memperbanyak sedikitnya 14 rusunawa lagi di 8 lokasi di seluruh Indonesia. Lantai dasar di rusunawa diprioritaskan untuk lansia atau penyandang disabilitas, untuk sewa 1 unitnya mulai dari Rp10.000 per bulan atau hanya sekitar \$0,7 per bulan,” ucap Mensos menjelaskan.
- Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas juga menjadi perhatian penting. Untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, Kemensos mendirikan galeri Sentra Kreasi Atensi (SKA). Kisah sukses telah dapat dirasakan di berbagai lokasi, termasuk di antaranya Cafe More Bandung, ARTNE Coffee di Tabanan Bali, Batik Ciprat dan sebagainya.
- Kemensos telah melakukan langkah nyata untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan dengan membagikan tongkat penuntun adaptif dengan fitur-fitur inovatif seperti sensor panas, banjir atau air mengalir dan detektor bahan kimia berbahaya dan GPS.
- Pemerintah melaksanakan operasi katarak besar-besaran dilakukan di seluruh negeri, termasuk kepada anak-anak, pemerintah mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas, meluncurkan Program Indonesia Mendengar, Indonesia Melihat, dan Indonesia Melangkah.
- Sebagai negara yang berada di sekitar *mega-thrust* dan *ring of fire* terbesar di dunia, pemerintah Indonesia memastikan terus meningkatkan ketahanan penyandang disabilitas menghadapi ancaman bencana. Di daerah bencana, pemerintah membangun pusat pengungsian besar-besaran untuk mendukung dan memastikan semua kelompok mendapatkan perlindungan, Kemensos menyediakan *bufferstock* di lumbung sosial; yaitu 484 titik logistik (lumbung sosial) di 544 kecamatan di 145 kabupaten/kota, 29 provinsi. Bantuan menjadi lebih dekat dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Lumbung sosial diisi stok beras, makanan instan siap saji, kotak obat P3K, selimut, kasur, tenda, pakaian dewasa, popok bayi, generator listrik dan perahu karet.
- Kemensos juga menerjunkan 39.000 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) termasuk Difagana dan Pendamping Sosial lainnya dilatih untuk dapat merespon cepat. Depsos memiliki Kampung Siaga Bencana tersebar di 936 lokasi di 34 provinsi.

Kementerian Pemuda dan Olahraga , 2023, menyajikan artikel berjudul Sekjen OKI Sampaikan Terima Kasih Kepada Pemerintah Indonesia atas Dukungan dan Pelayanan Maksimal OIC-CA 2023 , sumber Kementerian Pemuda dan Olahraga, antara lain mengungkapkan bahwa Sekjen Organisasi Kerjasama Islam Bidang Kemanusiaan, Sosial dan Budaya Tarig Ali Bakhit Salah menyebut, pelaksanaan kegiatan Organization Islamic Cooperation - Cultural Activity (OIC-CA) 2023 terselenggara atas kerjasama pemerintah Indonesia khususnya Kemenpora dan beberapa kementerian lembaga terkait lainnya. Sekjen Organisasi Kerjasama Islam Bidang Kemanusiaan, Sosial dan Budaya Tarig Ali Bakhit Salah menyebut, pelaksanaan kegiatan Organization Islamic Cooperation - Cultural Activity (OIC-CA) 2023 terselenggara atas kerjasama pemerintah Indonesia khususnya Kemenpora dan beberapa kementerian lembaga terkait lainnya.

Sekjen Organisasi Kerjasama Islam Bidang Kemanusiaan, Sosial dan Budaya Tarig Ali Bakhit Salah menyebut, pelaksanaan kegiatan Organization Islamic Cooperation - Cultural Activity (OIC-CA) 2023 terselenggara atas kerjasama pemerintah Indonesia khususnya Kemenpora dan beberapa kementerian lembaga terkait lainnya. Sekjen OKI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah mendukung dan memberikan pelayanan hangat agar terselenggaranya acara berjalan dengan baik dan lancar. Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara pendiri OKI dan telah memainkan peran penting di OKI. OKI sangat memberikan apresiasi kepada Indonesia atas kontribusinya selama ini. OKI kedepan akan terus bekerjasama dengan berbagai badan OKI untuk memajukan kepentingan pemuda khususnya bagi kemajuan pemuda Islam dan akan berguna tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh pemuda negara-negara Islam. Usai diterima Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, delegasi dari Assistant Secretary General for Humanitarian, Social and Culture Affairs, Organization Islamic Cooperation - Cultural Activity (OIC-CA) bersama 53 peserta dari seluruh peserta berkesempatan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta dan Gereja Katolik Katedral Jakarta.

17. KERJASAMA BILATERAL DAN MULTILATERAL

Situs Kemenlu, 2023, menyajikan artikel *Kerja Sama Bilateral* , antara lain mengungkapkan bahwa hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat.

Dalam menjalin hubungan tersebut *Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan.*

Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self governing territory. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan (Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, dan Eropa Tengah dan Timur). Kemenlu secara ringkas mendaftarkan seluruh negara dan bentuk kerjasama di bawah ini.

Daftar di bawah ini berisiko tumpang-tindih dengan berbagai judul besar tersebut di atas, misalnya PBB dan NATO, berisiko ketinggalan-zaman atau kurang-mutakhir , dan berisiko kurang-lengkap.

- **Amerika Serikat**

Amerika Serikat merupakan mitra strategis dan mitra dagang terbesar ke-2 bagi Indonesia selama dua tahun berturut (2020 dan 2021). Pada tahun 2022, Total nilai perdagangan tahun 2022 (Jan-sep) USD 30,75 miliar, naik 16,67% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor RI ke AS tahun 2022 (Jan-Sep) sebesar USD 21,97 miliar, naik 20,38 % dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

- **Kanada**

Hubungan Diplomatik RI-Kanada dimulai pada tahun 1952. Bagi Indonesia, Kanada merupakan peluang besar kerja sama ekonomi. Kanada melihat Indonesia dan kawasan ASEAN sebagai mitra kerja sama ekonomi (bisnis, perdagangan dan investasi) yang potensial. Kanada merupakan mitra dagang ekspor Indonesia ke-31 dan mitra dagang impor ke-18. Volume perdagangan bilateral Indonesia-Kanada pada tahun 2021 adalah sebesar US\$ 3,12 milyar, mengalami peningkatan sekitar 29,57% dibandingkan tahun 2020 (US\$ 2,4 milyar). Sementara itu, defisit perdagangan dialami Indonesia sebesar US\$ 992,4 juta, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu US\$ 826,4 juta.

Pada 27 November 2022, Kanada meluncurkan Strategi Indo-Pasifik yang merupakan comprehensive roadmap untuk mempererat engagement Kanada terhadap Kawasan Indo-Pasifik dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Kanada menginvestasikan total anggaran mencapai hampir CAD 2,3 miliar (atau sekitar USD 1,7 miliar) untuk periode 5 tahun pertama.

Strategi Indo-Pasifik Kanada memuat 5 sasaran strategis yang interconnected, yaitu:

- a. Promoting Peace, Resilience and Security;
- b. Expanding Trade, Investment, and Supply-Chain Resilience;
- c. Investing in and Connecting People;
- d. Building a Sustainable and Green Future;
- e. Canada as an Active and Engaged Partners in the Indo-Pacific.

- **Panama**

Hubungan diplomatik RI-Panama berlangsung sejak tahun 1979 dengan ditandatanganinya MOU oleh kedua negara di New York. Kedutaan Besar Panama di Jakarta dibuka pada tahun 1999. Indonesia membuka Kedutaan Besar RI di Panama City pada tahun 2010, dimana sebelumnya Panama dirangkap oleh KBRI Mexico City. Volume perdagangan bilateral Indonesia-Panama pada tahun 2021 adalah sebesar 173,46 juta, RI surplus US\$ 8,83 juta.

Hubungan bilateral kedua negara masih dititikberatkan pada kerja sama politik, a.l. saling dukung di organisasi internasional dan pertemuan-pertemuan bilateral baik dilakukan dengan kunjungan langsung maupun disela-sela pertemuan internasional. Potensi kerja sama lain yang dapat digarap dengan Panama adalah sektor ekonomi dan maritim. Indonesia memanfaatkan Panama sebagai hub masuknya produk-produk Indonesia ke kawasan Amerika Tengah maupun Selatan, dimana 60% dari total ekspor Indonesia ke Panama, di re-ekspor ke negara-negara di kawasan. Kerja sama bidang sosbud dilakukan melalui tawaran partisipasi siswa Panama pada program beasiswa budaya (Darmasiswa) maupun program beasiswa master (KNB).

- **Kosta Rika**

Hubungan diplomatik RI-Kosta Rika dimulai sejak penandatanganan komunike bersama di New York pada tanggal 9 Januari 1985. Pelaksanaan hubungan dengan Kosta Rika dirangkap oleh KBRI Panama City di Panama. Dari sisi Kosta Rika, hubungan dengan Indonesia dilakukan oleh Kedubes Kosta Rika di Jakarta (dibuka pada 5 September 2017 oleh Menlu Kosta Rika, Manuel Antonio Gonzales Sans). Perjanjian bilateral yang telah ditandatangani yaitu Perjanjian Bebas Visa Paspor

Diplomatik/Dinas (2013), MoU Konsultasi Bilateral (2013) dan Framework Cooperation Agreement (2015). Kosta Rika merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia di kawasan Amerika Tengah (setelah Panama, Guatemala dan Honduras). Volume perdagangan bilateral Indonesia-Kosta Rika pada tahun 2021 adalah sebesar US\$ 44 juta, Indonesia surplus sebesar 29,1 juta.

- **Nicaragua**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Nicaragua telah terjalin baik sejak 1988. Sampai saat ini, perwakilan RI di Nicaragua dirangkap di KBRI Panama City. Secara umum hubungan ekonomi perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Nicaragua memperlihatkan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya. Nilai perdagangan RI-Nicaragua dari tahun ke tahun walaupun fluktuatif, cenderung mengalami peningkatan dengan surplus di pihak Indonesia. Volume perdagangan bilateral Indonesia-Nicaragua pada tahun 2021 adalah sebesar US\$ 36 juta, Indonesia surplus sebesar USD 36 juta.

Sejak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1988, kedua negara telah menandatangani 2 buah kesepakatan di bidang ekonomi, yaitu 1) Persetujuan Dasar mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Nicaragua dan 2) Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Nicaragua mengenai Pembentukan Komisi Bersama di Bidang Kerja Sama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik.

- **Meksiko**

Hubungan diplomatik Indonesia-Meksiko dibuka dengan penandatanganan Joint Declaration di Washington DC tanggal 6 April 1953. Bagi Indonesia, Meksiko merupakan mitra ekonomi dan perdagangan, di mana Meksiko merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-3 di wilayah Amerika setelah AS dan Brazil, kontributor surplus ke-2 terbesar setelah AS serta akses pasar produk Indonesia ke wilayah Amerika Utara dan Tengah.

Selama tahun 2021, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai perdagangan antara Indonesia dan Meksiko sebesar US\$ 1,61 milyar, meningkat sebanyak 33,46% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ekspor non-migas Indonesia menjadi salah satu sumbangsih peningkatan volume perdagangan tersebut, di mana volume ekspor non-migas meningkat sebanyak 46,21% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, Meksiko juga merupakan salah satu mitra penting dalam kerjasama regional/global dan inisiatif kemitraan global (G20, MIKTA, APEC, FEALAC, dan Pacific Alliance).

- **Honduras**

Hubungan diplomatik dibuka pada tahun 1997. Honduras dirangkap oleh KBRI Panama City dan Indonesia dirangkap dari Perutusan Tetap Honduras di PBB, New York.

Volume perdagangan bilateral Indonesia-Honduras pada tahun 2021 adalah sebesar US\$ 154,7 juta. Indonesia mengalami surplus US\$ 153,7 juta (ekspor Indonesia US\$ 154,7 juta, impor Indonesia US\$ 500 ribu). Kerja sama antara Indonesia dan Honduras terfokus pada kerja sama pertanian umumnya, khususnya agrobis kelapa sawit.

- **Argentina**

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Argentina dimulai sejak 30 Juni 1956. Beberapa kali kunjungan resmi Kepala Negara mewarnai hubungan dekat kedua negara. Presiden Argentina Mauricio Macri berkunjung ke Jakarta pada 26 Juni 2019, sementara Presiden Abdurrahman Wahid berkunjung pada 29 September 2000.

Kerjasama ekonomi bilateral bernilai sangat penting, dimana Argentina merupakan mitra dagang ke-2 terbesar RI di wilayah Amerika Selatan, dengan volume-dagang tahun 2022 hingga bulan Oktober mencapai total USD 2,39 miliar, atau naik 26,15 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kerjasama ekonomi diharapkan lebih meningkat dengan pembentukan kesepakatan kemitraan ekonomi dengan Mercosur, di mana proses negosiasinya telah dimulai pada Desember 2021. Mercosur merupakan organisasi ekonomi dan politik beranggotakan Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay. Argentina menduduki kursi Presiden pada paruh pertama tahun 2023.

Selain itu, kedua negara terus mengembangkan kerjasama sosial budaya, khususnya di sektor pendidikan dan olahraga.

- **Chile**

Hubungan bilateral Indonesia-Chile dimulai dengan dibukanya hubungan kekonsuleran pada tahun 1964. Hubungan diplomatik secara resmi dimulai pada bulan September 1965. Pada tahun 1991, Indonesia membuka Kantor Perwakilan di Santiago.

Fokus hubungan bilateral Indonesia - Chile adalah pada peningkatan kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata. Indonesia dan Chile telah menandatangani Indonesia - Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC CEPA) pada tahun 2017 yang dimulai dengan Perjanjian Trade in Goods yang diratifikasi pada tahun 2019. Pada tahun 2022, negosiasi Trade in Services IC CEPA juga telah diselesaikan dan ditandatangani pada tanggal 21 November 2022. Pada tahun 2023, negosiasi untuk perjanjian investasi akan segera dilaksanakan.

Melalui IC - CEPA, Chile menghapuskan tarif masuk untuk 7,669 produk (atau 89,3 % Pos Tarif) dan Indonesia menghapus tarif masuk untuk 9.308 produk (atau 86,1% pos tarif). Sejak penerapan IC CEPA di tahun 2019, penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin/COO) meningkat hampir 10 kali lipat. Neraca perdagangan bilateral periode 2019-2021 meningkat sebesar 54% dari 275,8 juta USD menjadi 424,6 juta USD dan konsisten membawa surplus bagi Indonesia.

- **Uruguay**

Hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Republik Oriental Uruguay dimulai sejak tahun 1965 dengan membuka Konsulat di Montevideo dan mengangkat Konsul Kehormatan. Pada April 1966, hubungan ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar yang dirangkap dari KBRI Buenos Aires, Argentina. Sementara, setelah sebelumnya dirangkap oleh Kedutaan Besarnya di Hanoi, Vietnam, pada tahun 2018, Uruguay telah membuka perwakilannya untuk Indonesia di Jakarta.

Pada Mei 1959, Presiden Soekarno pernah melakukan kunjungan ke Uruguay dalam rangkaian kunjungannya ke negara-negara Amerika Latin. Sementara kunjungan terakhir dari pejabat tinggi Uruguay terlaksana pada 11 Oktober 2016, di mana Menteri Luar Negeri Rodolfo Nin Novoa berkunjung ke Jakarta.

Kerjasama ekonomi bilateral terus meningkat dengan peningkatan nilai perdagangan periode Januari-Oktober 2022 meningkat 73,38% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kerjasama ekonomi diharapkan lebih meningkat dengan pembentukan kesepakatan kemitraan ekonomi dengan Mercosur, di mana proses negosiasinya telah dimulai pada Desember 2021. Mercosur merupakan organisasi ekonomi dan politik beranggotakan Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay.

- **Paraguay**

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Paraguay dimulai tanggal 29 November 1982. Perwakilan Indonesia untuk Paraguay dirangkap dari Buenos Aires. Semenjak tahun 1990, Pemri mengangkat Ricardo Sanchez Abdo sebagai Konsul Kehormatan di Asuncion, Paraguay.

Sedangkan Kedutaan Besar Paraguay untuk Indonesia dibuka di Jakarta pada Januari 2011. Namun, pada Maret 2021, Pemerintah Paraguay memutuskan perubahan akreditasi di mana Indonesia dirangkap pada Kedutaan Besar Paraguay di Tokyo, di mana Y.M. Raúl Alberto Florentin Antola menjadi non-resident ambassador Paraguay untuk Indonesia.

Kerjasama ekonomi bilateral terus meningkat dengan peningkatan nilai perdagangan periode Januari-Oktober 2022 meningkat 57,68% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kerjasama ekonomi diharapkan lebih meningkat dengan pembentukan kesepakatan kemitraan ekonomi dengan Mercosur, di mana proses negosiasinya telah dimulai pada Desember 2021. Mercosur merupakan organisasi ekonomi dan politik beranggotakan Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay.

- **Brasil**

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Brasil dibuka pada Maret 1953 dan mencapai tataran lebih tinggi dengan Deklarasi Kemitraan Strategis di 2008. RI-Brasil memiliki mekanisme dialog bilateral Forum Konsultasi Bilateral (FKB) dan Sidang Komisi Bersama (SKB). Brasil merupakan satu-satunya negara di kawasan Amerika Selatan yang memiliki Kemitraan Strategis dengan Indonesia dan dengan status sebagai Mitra Sektor ASEAN. Posisi kedua negara yang strategis sebagai hub di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin juga memberikan potensi besar pengembangan hubungan perdagangan dan investasi.

Total nilai perdagangan Indonesia-Brasil untuk periode pada 2021 mengalami kenaikan 15,53%, dimana pada tahun 2020 sebesar USD 3,58 miliar, menjadi USD 4,13 miliar di tahun 2021. Ekspor Indonesia ke Brasil pada 2021 tercatat mengalami kenaikan 48,71%, dari USD 1 miliar di tahun 2020 menjadi 1,5 miliar di tahun 2021. Impor Indonesia dari Brasil juga mengalami kenaikan sebesar 2,37%, dari USD 2,56 miliar di tahun 2020 menjadi USD 2,62 miliar di tahun 2021.

Brasil merupakan mitra dagang Indonesia terbesar di Amerika Latin yang merupakan pasar ekspor dan sumber investasi yang potensial bagi Indonesia. Hal ini didukung dengan kesepakatan yang telah dicapai melalui perjanjian bilateral Indonesia dan Brasil di berbagai bidang, antara lain Politik, Perdagangan, Perbankan, Pertahanan, Investasi, Energi, Kerja Sama Teknik, Sosial Budaya, Konsuler, dan Pertanian.

- **Suriname**

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Suriname dibuka pada Januari 1976. Mekanisme dialog bilateral tertinggi di antara kedua negara adalah Joint Commission/Sidang Komisi Bersama (SKB) RI – Suriname yang disepakati di Jakarta pada tahun 1992. Ikatan sosial budaya yang telah berlangsung lama semakin diperkuat dengan program bantuan teknis dan capacity building, program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), dan hibah dari Indonesia ke Suriname.

Ekspor Indonesia ke Suriname pada tahun 2021 tercatat mengalami penurunan sebesar 27,09%, dari USD 5,7 juta di tahun 2020 menjadi USD 4,1 juta di tahun 2021. Impor Indonesia dari Suriname juga mengalami penurunan sebesar 39,04%, dimana pada tahun 2020 sebesar USD 218 ribu, menjadi USD 133 ribu di tahun 2021. Namun, terlepas dari penurunan tersebut, Indonesia masih mengalami surplus perdagangan sebesar USD 4 juta. Komoditas utama ekspor Indonesia ke Suriname antara lain ikan beku, akumulator elektronik, tissue, pasta, suku cadang mesin, tembakau, sabun, dan plastik. Sementara itu komoditas utama impor Indonesia dari Suriname antara lain kayu gergajian, live animals, dan live fish.

Indonesia memiliki potensi cukup besar untuk berinvestasi di Suriname, di antaranya di bidang perkayuan, pertambangan emas dan minyak, perkebunan kelapa sawit, buah dan sayuran, serta perumahan. Hal ini diperkuat dengan berbagai perjanjian bilateral di bidang Politik, Perdagangan, Ekonomi dan Perbankan, Kerja Sama Teknik, Sosial Budaya, dan Konsuler yang telah disepakati oleh kedua negara.

- **Guyana**

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Guyana dibuka pada 27 Agustus 1999 melalui penandatanganan Joint Communique di New York. Saat ini, pelaksanaan hubungan dengan Guyana dirangkap oleh KBRI Paramaribo di Suriname. Hubungan bilateral di bidang politik antara Indonesia dengan Guyana diperkuat oleh saling dukung pencalonan pada beberapa organisasi internasional, serta dukungan terhadap integritas wilayah NKRI.

Ekspor Indonesia ke Guyana di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 53.12%, dari USD 2,51 juta di tahun 2020, menjadi USD 3,84 juta di tahun 2021. Impor dari Guyana di sisi lain mengalami penurunan sebesar 95.89%, yaitu dari USD 47,4 ribu di tahun 2020 menjadi USD 1,9 ribu di tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Guyana sebesar USD 3,83 juta. Komoditas utama ekspor Indonesia ke Guyana antara lain minyak sawit, sabun, kendaraan bermotor, karung dan tas, serta tekstil. Sementara itu, komoditas utama impor Indonesia dari Guyana antara lain produk sayuran, kabel dan kawat, akumulator elektronik, dan live animals.

Terdapat peluang kerja sama melalui berbagai program kegiatan capacity building dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan, khususnya melalui program pelatihan di bidang pertanian dan pendidikan. Salah satu kerja sama konkret yang telah terlaksana yaitu program peningkatan kapasitas di bidang pertanian untuk negara-negara Afrika, Amerika Latin, dan Kepulauan Karibia yang merupakan kerja sama antara Kementerian Pertanian Indonesia dengan Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation.

- **Bolivia**

Indonesia dan Bolivia mengawali hubungan bilateral sejak tahun 1963. Sejak tahun 2001, Indonesia menjadi negara rangkapan Kedutaan Besar Bolivia di Tiongkok, sedangkan Bolivia menjadi negara rangkapan KBRI Lima.

Di tingkat bilateral, kedua negara baru saja menandatangani MSP mengenai Pembentukan Konsultasi Bilateral pada 22 September 2021 di sela-sela Sidang Umum PBB ke-76. Di tingkat multilateral, kedua negara telah memberikan saling dukung di berbagai organisasi internasional.

Neraca perdagangan kedua negara secara konsisten mengalami peningkatan dan surplus bagi Indonesia, kecuali saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, Bolivia menempati peringkat ke-10 sebagai negara mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Nilai perdagangan mencapai US\$ 30,5 juta atau meningkat sebesar 57,29% YoY, diiringi peningkatan nilai ekspor Indonesia sebesar 27,09% YoY menjadi US\$ 21,6 juta. Pada periode Januari-Oktober 2022, nilai perdagangan meningkat sebesar 8,62% YoY atau mencapai US\$27,4 juta.

Salah satu kerja sama yang sedang dijajaki oleh kedua negara adalah dalam bidang lithium, di mana Bolivia memiliki cadangan lithium terbesar di dunia dan termasuk dalam Lithium Triangle bersama dengan Argentina dan Chile.

- **Ekuador**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Ekuador secara resmi terbentuk pada 29 April 1980 dan telah terjalin dengan baik di tingkat bilateral dan multilateral. Dikarenakan pandemi Covid-19, saat ini Kedutaan Besar Ekuador di Jakarta merupakan satu-satunya perwakilan Ekuador di kawasan Asia Tenggara, merangkap untuk ASEAN.

Di tingkat bilateral, kedua negara memiliki mekanisme Forum Konsultasi Bersama, Sidang Komisi Bersama, dan Working Group on Trade and Investment. Pertemuan bilateral yang terakhir diselenggarakan adalah Forum Konsultasi Bilateral ke-IV yang dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa serta Wakil Menteri Luar Negeri Ekuador pada Agustus 2022. Di tingkat multilateral, kedua negara telah memberikan saling dukung di berbagai forum internasional. Berbagai kerja sama lain yang telah disepakati oleh kedua negara adalah dalam bidang pertahanan, manajemen risiko bencana, penanggulangan perdagangan gelap narkoba, serta pelatihan dan pendidikan diplomatik.

Pada tahun 2021, Ekuador merupakan negara mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia di kawasan Amerika Selatan dan Karibia, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai US\$

291,9 juta atau meningkat sebesar 16,49% YoY, diiringi peningkatan nilai ekspor Indonesia sebesar 163,99% YoY menjadi US\$ 126,06 juta. Sejak tahun 2017, Indonesia selalu mengalami defisit dengan Ekuador dikarenakan impor biji kakao yang lebih dari 95% dari total impor, namun pada tahun 2021, nilai defisit mencapai titik terendah dalam 4 tahun terakhir. Pada Januari-Oktober 2022, nilai perdagangan bilateral meningkat sebesar 3,1% menjadi US\$ 219 juta.

- **Kuba**

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kuba dimulai pada 22 Januari 1960. Kedekatan hubungan bilateral ditandai dengan kunjungan Presiden Soekarno ke Kuba pada Mei 1960, sebagai kunjungan kenegaraan satu-satunya antara kedua negara hingga kini. Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengunjungi Kuba, namun dalam rangka pertemuan KTT Selatan-Selatan (2000) dan KTT GNB (2006). Pada Mei 2022, Plt. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa telah melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal untuk Urusan Bilateral, Kementerian Luar Negeri Kuba di Havana. Pada kesempatan tersebut, ditandatangani Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas secara sirkular oleh kedua menteri luar negeri.

Hubungan bilateral kedua negara menunjukkan perkembangan positif. Dalam bidang politik, kedua negara memiliki mekanisme pertemuan bilateral dan telah menunjukkan kerja sama saling dukung di berbagai forum internasional. Kedua negara juga telah menyepakati kerja sama dalam bidang pertanian, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta olahraga.

- **Peru**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Peru secara resmi terbentuk pada 12 Agustus 1975, yang kemudian ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar Peru di Jakarta sejak 1 November 1992 dan KBRI Lima sejak 20 Februari 2002.

Hubungan politik kedua negara berlangsung dengan baik melalui pertemuan bilateral dalam bentuk Forum Konsultasi Bersama dan Sidang Komisi Bersama, serta kerja sama saling dukung di berbagai forum internasional. Dalam situasi pandemi Covid-19, Indonesia dan Peru juga bekerja sama melalui Ministerial Coordination Group on Covid-19. Berbagai kerja sama lain yang telah disepakati oleh kedua negara adalah dalam bidang penanggulangan perdagangan gelap narkoba, pendidikan dan pelatihan diplomatik, pertanian, dan pertahanan.

Pada tahun 2021, Peru merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia di kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Nilai perdagangan bilateral mencapai US\$ 404,20 juta (meningkat sebesar 62,46% YoY), diiringi peningkatan nilai ekspor Indonesia sebesar 85,18% YoY menjadi US\$ 320 juta dan nilai surplus Indonesia sebesar 143,74 % YoY menjadi US\$ 235,70 juta. Pada Januari-Oktober 2022, nilai perdagangan bilateral meningkat sebesar 45,88% YoY menjadi US\$ 465 juta. Saat ini, kedua negara dalam proses peninjauan pembentukan perjanjian perdagangan bebas, yaitu Indonesia-Peru CEPA.

- **Kolombia**

Hubungan diplomatik Indonesia-Kolombia secara resmi dimulai pada tanggal 15 September 1980. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota dibuka pada tahun 1989 sedangkan Kedutaan Besar Republik Kolombia di Jakarta dibuka pada tahun 1983.

Kunjungan tingkat tinggi terakhir yang pernah dilakukan adalah kunjungan Wakil Presiden Kolombia, Gustavo Bell Lemus, ke Jakarta pada 31 Mei 2001 dalam rangka menghadiri KTT G-15. Pertemuan tingkat Kepala Negara terakhir dilakukan pada tanggal 30 November 2015 di sela-sela COP21 Paris, Perancis.

Kedua negara memiliki mekanisme dialog bilateral seperti Forum Konsultasi Bilateral dan Sidang Komisi Bersama. Berbagai kerja sama telah terjalin seperti bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, bidang pendidikan dan kebudayaan, ekonomi dan teknik, pertanian, anti-narkotika, intelijen keuangan, kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan.

- **Venezuela**

Hubungan diplomatik Indonesia-Venezuela secara resmi dimulai pada tanggal 10 Oktober 1959. Indonesia menempatkan Duta Besar yang pertama di Caracas pada bulan Januari 1977, sedangkan Venezuela menempatkan Duta Besarnya yang pertama di Jakarta pada bulan Mei 1981.

Kunjungan tingkat tinggi terakhir yang pernah dilakukan adalah kunjungan Presiden Hugo Chavez ke Jakarta pada 30-31 Mei 2001 dalam rangka menghadiri KTT G-15. Pertemuan tingkat tinggi terakhir dilakukan pada 18 September 2016 di sela-sela KTT GNB ke-17 di Isla Margarita, Venezuela, antara Wakil Presiden RI dengan Wakil Presiden Venezuela.

Kedua negara memiliki mekanisme dialog bilateral seperti Forum Konsultasi Bilateral dan Sidang Komisi Bersama. Berbagai kerja sama yang telah terjalin seperti bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, bidang ekonomi dan teknik, penghindaran pajak berganda, dan pelatihan diplomatik.

- **Grenada**

Hubungan diplomatik Indonesia-Grenada dimulai sejak 28 Februari 1992. Grenada dirangkap oleh KBRI Caracas di Venezuela, sedangkan Indonesia dirangkap oleh Kedutaan Besar Grenada di Washington DC.

Belum terdapat kunjungan tingkat tinggi antara kedua negara. Pertemuan tingkat tinggi terakhir dilakukan antara Menlu RI dan Menlu Grenada di sela-sela SMU PBB ke-73 di New York, 26 September 2018. Kerja sama bilateral telah terjalin pada fora multilateral dan penawaran beasiswa Darmasiswa.

- **Haiti**

Hubungan diplomatik Indonesia-Haiti dimulai sejak 20 November 2012. Haiti dirangkap oleh KBRI Havana di Kuba, sedangkan Indonesia dirangkap oleh Kedutaan Besar Haiti di Tokyo, Jepang. Indonesia memiliki Konsul Kehormatan RI di Port Au Prince sejak Agustus 2017.

Kunjungan tingkat tinggi terakhir tercatat pada Maret 2018 oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Karibia dan Pasifik. Kerja sama bilateral telah terjalin pada fora multilateral dan keikutsertaan personel TNI dan Polri dalam Misi PBB MINUSTAH (UN Mission for Stabilisation in Haiti) yang berakhir pada Oktober 2017 dan Misi PBB MINUJUSTH (UN Mission to Support Justice in Haiti) yang berakhir pada 2019.

- **Jamaika**

Hubungan diplomatik Indonesia-Jamaika dimulai sejak 17 Desember 1981. Jamaika dirangkap oleh KBRI Havana di Kuba, sedangkan Indonesia dirangkap oleh Kedutaan Besar Jamaika di Tokyo, Jepang. Indonesia memiliki Konsul Kehormatan RI di Kingston sejak 6 Juli 2015, sedangkan Jamaika memiliki Konsul Kehormatannya di Jakarta sejak 30 April 2001.

Kedua negara memiliki mekanisme dialog bilateral seperti Sidang Komisi Bersama yang terakhir dilakukan di Kingston, Jamaika, 25-26 September 2017. Berbagai kerja sama telah terjalin di bidang ekonomi dan teknik, peningkatan dan perlindungan penanaman modal, bidang promosi perdagangan, dan bidang olah raga.

- **Bahamas**

Hubungan diplomatik Indonesia-Bahama dimulai sejak 5 Mei 1977. Bahama dirangkap oleh KBRI Havana di Kuba, sedangkan Indonesia dirangkap oleh Kedutaan Besar Bahama di Beijing.

Belum terdapat kunjungan tingkat tinggi maupun pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara. Kerja sama bilateral telah terjalin pada fora multilateral dan kerja sama bidang Pertukaran Informasi Pajak.

- **Barbados**

Hubungan diplomatik Indonesia-Barbados dimulai sejak 26 Juni 2019. Barbados dirangkap oleh KBRI Bogota. Belum terdapat kunjungan tingkat tinggi maupun pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara. Kerja sama bilateral telah terjalin pada fora multilateral dan pelatihan teknik di bidang pertanian.

- **Persemakmuran Dominika**

Hubungan diplomatik Indonesia-Persemakmuran Dominika dimulai sejak 19 April 1994. Persemakmuran Dominika dirangkap oleh KBRI Caracas di Venezuela, sedangkan Perwakilan Persemakmuran Dominikana dirangkap oleh Perutusan Tetap Persemakmuran Dominika untuk PBB di New York.

Belum terdapat kunjungan tingkat tinggi maupun pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara. Kerja sama bilateral telah terjalin pada fora multilateral dan penawaran beasiswa Darmasiswa.

- **Republik Dominikana**

Hubungan Diplomatik antara Indonesia dengan Republik Dominikana dimulai pada tanggal 20 September 2011 dengan penandatanganan perjanjian diplomatik. Indonesia dan Republik Dominikana pernah sama-sama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2018. Saat ini, Perwakilan RI untuk Republik Dominikana dirangkap oleh KBRI Havana, sementara Perwakilan Republik Dominikana dirangkap dari Tokyo.

- **St. Kitts & Nevis**

Hubungan diplomatik Indonesia-Saint Christopher (St. Kitts) dan Nevis dimulai sejak 30 Januari 2014. St. Kitts dan Nevis dirangkap oleh KBRI Bogota, sedangkan Perwakilan St. Kitts dan Nevis dirangkap oleh Perutusan Tetap St. Kitts dan Nevis untuk PBB di New York. Indonesia memiliki Konsul Kehormatan RI di Basseterre sejak 30 Juli 2019.

Kunjungan tingkat tinggi terakhir tercatat pada Maret 2017 oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Karibia dan Pasifik. Kerja sama bilateral telah terjalin pada fora multilateral, pelatihan teknik di bidang manajemen resiko bencana, pertanian, pembuatan batik, dan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas.

- **St. Lucia**

Hubungan diplomatik Indonesia-Saint Lucia dimulai sejak 2 Februari 1994. Saint Lucia dirangkap oleh KBRI Caracas di Venezuela, sedangkan Perwakilan St Lucia dirangkap oleh Kedutaan Besar Saint Lucia di Washington DC, AS.

Belum terdapat kunjungan tingkat tinggi maupun pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara. Kerja sama bilateral telah terjalin pada fora multilateral dan kerja sama teknik bidang manajemen resiko bencana.

- **St. Vincent & the Grenadines**

Hubungan diplomatik antara RI dan St. Vincent and the Grenadines (SVG) secara resmi dibuka pada tanggal 30 November 1993, saat ini perwakilan RI untuk SVG dirangkap oleh KBRI Caracas.

Pada 5 Oktober 2021, secara resmi Pemri memberikan hibah kepada Pemerintah SVG untuk berupa Program Sarana Mobilitas Anak-anak Sekolah. Pemberian hibah ini tercantum dalam perjanjian yang telah ditandatangani secara sirkuler.

- **Trinidad & Tobago**

Hubungan diplomatik RI-Trinidad & Tobago secara resmi dibuka pada tanggal 12 Oktober 1973, melalui penandatanganan Joint Communique di New York. Saat ini, terdapat Konsul Kehormatan RI di Port of Spain, Mr. Ian Anthony. Adapun Perwakilan RI di Trinidad & Tobago dirangkap dari KBRI Caracas.

Secara umum hubungan dagang melalui pihak swasta di kedua negara telah terjalin dengan baik. Produk ekspor Indonesia telah masuk ke Trinidad & Tobago baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

- **Antigua & Barbuda**

Hubungan diplomatik Indonesia-Antigua dan Barbuda dimulai sejak 23 September 2011. Antigua dan Barbuda dirangkap oleh KBRI Bogota, sedangkan Perwakilan Antigua dan Barbuda dirangkap oleh Perutap Antigua dan Barbuda untuk PBB di New York. Indonesia memiliki Konsul Kehormatan RI di St. John's sejak 26 Mei 2020.

Kunjungan tingkat tinggi terakhir tercatat pada Desember 2017 oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Karibia dan Pasifik. Pertemuan tingkat tinggi terakhir dilakukan pada 7 Mei 2019 antara Menlu RI dengan Wakil Tetap Antigua dan Barbuda untuk PBB di New York.

Kedua negara telah menjalin kerja sama bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, pemberian hibah Pemri untuk dukungan Proyek Community Connect di St. John's, dan kerja sama teknik di bidang manajemen resiko bencana.

- **Inggris**

Inggris merupakan salah satu mitra strategis berdasar Joint Statement on Closer Cooperation pada April 2012. Pada 19 April 2022, Kemitraan Strategis diperkuat dengan Indonesia-UK Partnership Roadmap 2022-2024. Fokus kerja sama Indonesia-Inggris mencakup sektor-sektor prioritas yang cukup komprehensif, seperti perdagangan, investasi, industri kreatif, perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon, Pendidikan, riset dan inovasi, life science, dan kesehatan.

Nilai perdagangan pada tahun 2022 (per September 2022) tercatat USD 2 miliar, sementara di tahun 2021 USD 2,6 miliar (terbesar ke 5 di Eropa). Pada tahun 2021, Inggris merupakan sumber FDI terbesar kedua dari Eropa senilai USD 322,94 juta. Kuartal III 2022, realisasi FDI USD 507,7 juta. Sebelum pandemi, Inggris merupakan sumber wisatawan terbesar dari Eropa. Pasca pandemi, hingga September 2022, wisatawan Inggris tercatat lebih dari 100 ribu, terbesar diantara negara Eropa lainnya.

Indonesia-Inggris memiliki beberapa mekanisme kerja sama bilateral seperti Partnership Forum ditingkat Menlu, Joint Economic and Trade Committee (JETCO) di tingkat Mendag, serta mekanisme dialog dan working group di bidang pertahanan, siber, penanggulangan terorisme, Pendidikan, dan kesehatan. Inggris meluncurkan kebijakan Indo-Pacific Tilt pada tahun 2021 yang membuka peluang penguatan intensitas kemitraan bilateral dan di Kawasan.

- **Irlandia**

Hubungan diplomatik RI-Irlandia terjalin baik sejak 4 September 1984 dan pada tahun 2014, Irlandia membuka kedutaan besarnya di Jakarta. Indonesia-Irlandia memiliki potensi untuk terus mengembangkan kerja sama terutama di bidang Pendidikan tinggi, industri kreatif, sosial budaya dan

digital. Kedua negara juga mempunyai kesamaan pandangan pada berbagai isu global serta kerja sama saling dukung pada berbagai forum multilateral.

Pada 13 Oktober 2022, Konsultasi Bilateral Indonesia – Irlandia dilaksanakan pada tingkat Dirjen dan disepakati untuk terus mendorong peningkatan angka perdagangan dan investasi, mengoptimalkan potensi digital dan industri kreatif, lingkungan hidup, sustainable tourism, energy forest, dan pendidikan tinggi.

Pada Januari 2020, Irlandia meluncurkan Global Ireland, Delivering in the Asia Pacific Region to 2025 yang memberikan peluang penguatan kerja sama bilateral RI-Irlandia.

- **Spanyol**

Hubungan diplomatik RI - Spanyol telah terjalin secara baik sejak tahun 1958. Nilai perdagangan Bilateral Januari-Oktober 2022 USD 2,41 miliar, meningkat 2,41% dibanding periode yang sama tahun 2021, yang tercatat USD 2,35 miliar. Indonesia mengalami surplus selama 5 tahun terakhir. Surplus Indonesia periode Januari-Oktober USD 1,40 miliar.

Investasi Spanyol di Indonesia periode Jan-Oktober 2022 tercatat USD 14,48 juta, meningkat signifikan dari realisasi investasi di tahun 2021 yg tercatat sebesar USD 6,77 juta. Spanyol adalah salah satu importir palm oil Indonesia yang terbesar di Uni Eropa (UE) (2016 - 2020) dan juga merupakan mitra kerja sama industri strategis bagi Indonesia dengan skema produksi bersama dan alih teknologi. Spanyol memiliki keunggulan dalam beberapa bidang yang menjadi prioritas Indonesia saat ini: maritim (port, ship building), infrastruktur (toll roads, kereta api).

- **Portugal**

Hubungan diplomatik RI-Portugal pertama kali dibuka tahun 1950. Namun kedua belah pihak memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 1965 dan 1975. Pada tahun 1999, kedua negara melakukan pemulihan hubungan diplomatik. Hubungan bilateral Indonesia dan Portugal semakin berkembang dengan baik pasca pembukaan kembali hubungan diplomatik serta berorientasi ke masa depan untuk memanfaatkan potensi dan peluang kerja sama kedua negara secara maksimal. Hubungan yang baik tersebut direfleksikan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Portugal pada September 2014.

Pada tahun 2022 Januari - Oktober, perdagangan bilateral tercatat sebesar USD 139,5 juta dengan surplus Indonesia sebesar USD 80,9 juta. Dibandingkan periode yang sama tahun 2021, surplus Indonesia naik sebanyak 3,3% dan terdapat peningkatan sebesar 2,2% pada total perdagangan dari USD 136,5 juta di tahun 2021. Realisasi investasi Portugal di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 13 proyek investasi senilai USD 1,65 juta.

- **Italia**

Hubungan diplomatik RI- Italia terjalin sejak tahun 1949 dan telah berlangsung baik dalam kerangka bilateral dan multilateral yang terlihat dari intensitas saling kunjung dan pertemuan pada tingkat Kepala negara/Menteri.

Italia menempati peringkat ke-17 sebagai negara di dunia yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Sementara untuk kawasan Eurozone, Italia menduduki peringkat ke-2 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia sekaligus sebagai mitra dagang terbesar setelah Belanda pada tahun 2021.

Dalam 3 tahun terakhir sebelum pandemi yaitu 2017-2019, neraca perdagangan Indonesia dengan Italia cenderung menurun. Indonesia mengalami surplus pada tahun 2017 yaitu sekitar 362 juta USD dan menurun pada 2018 yaitu sekitar 80 juta USD. Sedangkan, pada tahun 2019 Italia mendapatkan surplus perdagangan dari Indonesia sekitar 27 juta USD.

Sementara itu, di masa pandemi neraca perdagangan Indonesia dan Italia justru semakin meningkat dan surplus pada Indonesia yaitu sekitar 186 juta USD pada tahun 2020 dan sekitar 1 Milyar USD pada tahun 2021. Pada tahun 2022, surplus Indonesia sebesar 1,33 Milyar USD.

Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 nilai investasi Italia memiliki trend menurun secara berturut-turut di Indonesia, yaitu 64,85 juta USD (2017), 32,08 juta USD (2018), 27,44 juta USD (2019), dan 12,68 juta USD (2020). Meskipun demikian, di tahun 2021 investasi Italia di Indonesia mulai naik kembali yaitu sekitar 37,58 juta USD dan 21,68 juta USD di tahun 2022 pada data hingga bulan September.

- **Malta**

Hubungan diplomatik antara RI – Kerajaan Malta secara resmi dibuka pada tahun 1 Desember 1979. Hingga saat ini, perwakilan Indonesia untuk Malta dirangkap oleh KBRI Roma, Italia sedangkan Malta belum memiliki perwakilan diplomatik untuk Indonesia.

Secara umum, hubungan bilateral antara RI dan Malta telah berjalan dengan baik, meskipun masih sangat terbatas. Kerja sama kedua pihak telah berjalan dengan baik di forum multilateral, khususnya dalam saling dukung pencalonan pada organisasi/lembaga internasional. Salah satu catatan penting dalam hubungan kedua negara adalah langkah Malta dalam meratifikasi Partnership and Cooperation Agreement (PCA) antara Indonesia dengan Uni Eropa pada bulan Agustus 2011.

Nilai perdagangan RI-Malta tahun 2021 meningkat signifikan sebesar USD 97,6 juta dibandingkan nilai dari 4 tahun sebelumnya yang kurang dari USD 20 juta per tahunnya. Namun periode Januari-Oktober 2022, nilai perdagangan tercatat USD 8,3 juta, turun sebanyak 91,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

- **Siprus**

Hubungan bilateral RI-Siprus dimulai sejak tahun 1987 dan terus mengalami peningkatan. Sebagai bentuk komitmen terhadap hubungan bilateral, Siprus membuka Kedutaan Besar di Jakarta pada tahun 2010. Namun, kesulitan ekonomi akibat Euro debt crisis memaksa Siprus menutup Kedutaan Besarnya di Jakarta pada tahun 2013. Saat ini, Kedubes Siprus dirangkap dari Canberra.

Nilai perdagangan RI – Siprus tahun 2021 mencapai US\$ 28,08 juta atau mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang mencapai US\$ 51,95 juta. Namun demikian, tren perdagangan dari tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan sebesar 22,47%.

Nilai realisasi investasi Siprus di Indonesia masih belum signifikan. Pada tahun 2017, investasi Siprus ke Indonesia tercatat US\$ 6,60 juta, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Nilai investasi mencapai titik terendah di tahun 2021 sebesar US\$ 254 ribu, namun perlahan mengalami peningkatan sebesar US\$ 1,2 juta periode Januari-Juli 2022. Investasi Siprus pada umumnya bergerak di sektor: perikanan, pertambangan; hotel dan restoran; dan jasa lainnya.

- **San Marino**

Hubungan diplomatik Indonesia dan San Marino dimulai sejak 26 September 2011. Dari segi ekonomi, nilai perdagangan diantara kedua negara belum menunjukkan nilai yang signifikan.

Begitupun dengan nilai investasi. Sampai saat ini, belum tercatat investasi dari San Marino di Indonesia. Namun demikian, fokus dan peluang hubungan bilateral Indonesia dan San Marino ada pada bidang sosial budaya, diantaranya mendorong kerja sama antara universitas dan pertukaran budaya kedua negara, kerja sama pendidikan dan pelatihan di bidang pemeliharaan situs bersejarah, dan mendorong kerja sama antar parlemen kedua negara. Meskipun San Marino bukan merupakan anggota UE, namun kebijakan luar negerinya selaras dengan kebijakan UE sehingga hubungan diplomatik RI-San Marino diharapkan dapat memperkuat gerak Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara UE, termasuk pada fora multilateral seperti PBB.

- **Vatikan**

Takhta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, dan hubungan diplomatik Indonesia - Vatikan telah dimulai sejak tahun 1947. Vatikan merupakan non-commercial economy dimana aktivitas perekonomian di dalam Vatikan terbatas hal-hal yang mendukung operasionalisasi Vatican City State. Sebagai non-commercial economy, kekuatan ekonomi Vatikan tidak dapat dianalisa layaknya sebuah negara, terlebih karena Vatikan tidak menjalankan aktivitas ekspor dan impor, termasuk dengan Indonesia. Namun demikian, hubungan Indonesia dan Vatikan diperkuat dengan adanya kesamaan posisi dalam berbagai isu regional maupun internasional antara lain terkait Konflik Israel-Palestina. Vatikan juga mengakui Indonesia sebagai model bagi dunia dalam hal toleransi dan dialog antarumat beragama. Sampai tahun 2021, Indonesia dan Vatikan telah melaksanakan 4 dialog lintas agama dengan beragam tema. Di bidang sosial budaya, Museum Etnologi Vatikan yang berada di Takhta Suci Vatikan juga memiliki koleksi permanen Taman Borobudur yang diresmikan pada 4 Oktober 2017. Terdapat 2 replika stupa besar Candi Borobudur dan hiasan relief/mosaik yang menggambarkan perjalanan hidup Buddha atau Sidharma Gautama.

- **Belanda**

Fokus utama hubungan bilateral RI-Belanda adalah peningkatan hubungan ekonomi, pengembangan kapasitas SDM RI, serta sumber transfer teknologi dan inovasi. Belanda juga merupakan mitra komprehensif Indonesia. Dari sisi ekonomi, hubungan ekonomi Indonesia dan Belanda kini bersifat "from aid to trade" yang menegaskan kerja sama kedua negara sebagai mitra yang setara. Belanda menempatkan Indonesia sebagai mitra prioritas bisnis Belanda di Asia setelah RRT. Belanda merupakan mitra dagang terbesar ke-12 di seluruh dunia, dan ke-2 di Eropa (setelah Jerman). Perdagangan bilateral selalu menunjukkan surplus bagi Indonesia. Sampai bulan September 2022, nilai perdagangan bilateral mencapai USD 4,85 miliar atau naik 24,76% year-on-year, dengan ekspor Indonesia mencapai USD 4,29 miliar dan impor senilai USD 596,3 juta serta surplus RI USD 3,69 miliar. Untuk investasi, realisasi investasi sektor riil Belanda di Indonesia pada tahun 2021 menempati urutan ke-5 terbesar setelah Singapura, RRT, AS, dan Jepang. Sedangkan diantara negara Eropa, Belanda selalu menempati peringkat ke-1 sejak tahun 2018.

- **Belgia**

Fokus utama hubungan bilateral RI-Belgia adalah diplomasi ekonomi, pengembangan kapasitas SDM Indonesia serta mitra Indonesia sebagai mitra dalam upaya penanggulangan terorisme dan penyelundupan narkoba dari kawasan Eropa. Dari sisi ekonomi, Indonesia menempati peringkat ke-29 sebagai mitra dagang Belgia dengan dunia, dengan pangsa 1,46%. Pada tingkat ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-2 dengan pangsa 27%. Belgia merupakan mitra dagang terbesar ke-21 bagi Indonesia pada tahun 2021. Pada periode Januari-September 2022, nilai perdagangan kedua negara tumbuh sebesar 30,69% year-on-year, capai USD 2,11 miliar dengan kenaikan surplus yang mencapai 74,23% atau senilai USD 1,20 miliar. Dari sisi sosial budaya, Belgia merupakan satu-satunya negara di Eropa yang memiliki taman bertema Indonesia. Terdapat Taman Indonesia (Kingdom of Ganesha) di dalam taman Pairs Daiza (dulu bernama Parc Paradisio), Brugelette, yang merupakan taman seluas 6,2 hektar didedikasikan untuk Indonesia

- **Luksemburg**

Fokus utama hubungan bilateral RI-Luksemburg adalah peningkatan kerja sama bilateral, khususnya ekonomi dan sosial budaya. Indonesia dan Luksemburg juga membidik kerja sama di bidang Pendidikan dan perbankan syariah. Sebagaimana diketahui, Luksemburg adalah negara terbesar kedua pusat dana investasi di dunia (setelah AS), pusat perbankan swasta paling penting di zona Euro dan pusat terkemuka Eropa untuk perusahaan reasuransi. Luksemburg menduduki urutan ke-16 mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa. Pada periode Januari hingga September 2022, nilai perdagangan kedua negara naik 26,52% year-on-year dengan nilai USD 53 juta dan surplus RI tumbuh 148,81% menjadi USD 31,5 juta. Selain itu, nilai investasi Luksemburg periode Januari-September 2022 telah mencapai USD 301 juta dengan 131 proyek, naik dari total investasi sepanjang 2021 yang tercatat USD 144,5 juta. Pada 2018, 2019 dan 2021, Luksemburg menempati peringkat 6 besar sebagai investor terbesar di Indonesia, dan peringkat 2 di tahun 2020. Namun, di tahun 2022, peringkat Luksemburg turun di posisi ke 7.

- **Prancis**

Hubungan bilateral Indonesia Prancis telah terjalin dengan baik sejak September 1950. Terdapat kesamaan prinsip antara kebijakan politik luar negeri RI Prancis, yaitu Politik Bebas Aktif Indonesia dan *Politique Indépendance* Prancis. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi kedua negara dalam membina hubungan luar negerinya. Indonesia dan Prancis menjalin hubungan Kemitraan Strategis sejak 1 Juli 2011. Hubungan kedua negara cenderung terus meningkat tanpa masalah-masalah signifikan yang mengganggu. Pada 24 November 2021, Menlu kedua negara menandatangani *Plan of Action for the Deepening of Strategic Partnership (PoA)* sebagai capaian dari 10 tahun kemitraan strategis, yang akan menjadi kompas bagi hubungan dan kerja sama bilateral selama periode 2022-2027.

- **Andorra**

Hubungan diplomatik Indonesia–Andorra secara resmi telah dimulai sejak 26 Maret 1996 dan dilaksanakan melalui KBRI Paris. Meskipun kedua negara tidak memiliki perwakilan di negara masing-masing, kedua negara bekerja sama di berbagai forum internasional. Hubungan bilateral kedua negara dititikberatkan pada bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Banyak potensi yang dapat digali diantara kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi, pariwisata, dan budaya.

Pertemuan terakhir Menlu RI dengan Menlu Andorra Mrs. Maria Ubach Font dilangsungkan di sela-sela Sidang Umum PBB pada 19 September 2017. Pertemuan tersebut yaitu penyelenggaraan rangkaian kegiatan Breakfast Business Meeting dan Malam Budaya “Colors d’Indonesia” di Andorra pada 25 Oktober 2022, oleh KBRI Paris.

- **Monako**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Monako dilaksanakan melalui KBRI Paris, dan berjalan baik sebagaimana ditandai dengan pengaturan saling dukung di berbagai forum internasional; serta hubungan perdagangan antara kedua negara. Sejak tanggal 3 Maret 2017, Konsul Kehormatan Indonesia untuk Monako dijabat oleh Mr. Mahmoud Shaker Al-Abood. Penguatan hubungan bilateral juga ditandai dengan pembukaan kantor Konsulat oleh Monako di Jakarta pada 30 Agustus 2015.

Pada 18 Juni 2015, Dubes LBBP RI untuk Prancis merangkap Kepangeranan Monako dan Andorra, Hotmangaradja Pandjaitan, telah menyerahkan Surat Kepercaan kepada HSH Prince Albert II. Dubes LBBP RI secara khusus telah mengundang investasi dari pihak Monako dengan memanfaatkan pembangunan infrastruktur dan kemudahan investasi di Indonesia, Dubes juga bermaksud

membangun hubungan antara eksportir dan importir serta investor melalui misi dagang dan pameran, dan juga mempererat hubungan p-to-p.

- **Yunani**

Yunani merupakan salah satu negara pertama di kawasan Eropa yang memberikan pengakuan atas kedaulatan NKRI pada 29 Desember 1949. Melalui nota diplomatik tertanggal 22 Maret 1950, Indonesia secara resmi menjalin hubungan dengan Yunani. Hubungan erat diwujudkan dengan ditandatanganinya Perjanjian Dagang RI-Yunani pada 30 November 1951. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan pertama kedua negara. Selama ini Pemerintah Yunani mendukung integritas wilayah, proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia. Pemerintah Yunani hampir tidak pernah secara vocal mengecam Indonesia, termasuk dalam kejadian-kejadian negatif di tanah air seperti masalah Aceh, Papua dan masalah residual Timor Timur. Pemerintah Yunani juga mengakui bahwa Indonesia merupakan pilar stabilitas Asia Tenggara dan mitra penting dalam upaya memajukan kerja sama perdamaian dunia.

- **Austria**

Hubungan diplomasi Indonesia dan Austria telah terjalin sejak tahun 1954. Fokus utama hubungan bilateral Indonesia dan Austria berpusat pada peningkatan hubungan ekonomi dan bisnis, kerja sama Pendidikan tinggi dan riset, energi serta sosial budaya. Indonesia dan Austria memiliki mekanisme bilateral, baik politik maupun teknis, serta dialog lintas agama. Dari segi ekonomi, hubungan dagang Indonesia dan Austria masih dapat ditingkatkan serta mengeksplor potensi yang ada. Untuk perdagangan, hingga Oktober 2022, nilai perdagangan kedua negara senilai USD 362,8 juta naik atau sebesar 24,07% year-on-year. Untuk investasi, Austria berada di urutan ke-17 dari seluruh PMA yang masuk ke Indonesia dengan nilai investasi sebesar USD 64.7 juta dengan 39 proyek periode Jan-Sep 2022, dan berada di 10 besar investor asal Eropa.

- **Slovenia**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Slovenia telah terjalin sejak 1992. Fokus utama hubungan bilateral Indonesia dan Austria berpusat pada peningkatan hubungan ekonomi dan bisnis, kerja sama di forum internasional serta kerja sama kekonsuleran. Dari segi ekonomi, hubungan Indonesia merupakan satu-satunya negara pengeksport batu bara ke Slovenia. Penggunaan batu bara memberikan kontribusi sekitar 30% bagi penggunaan energi di Slovenia. Setiap tahun, Indonesia mengeksport 450.000 ton batu bara lignit ke Slovenia. Selama kurun waktu 2016-2021, volume perdagangan kedua negara menunjukkan tren peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang sedikit menurun. Pada tahun 2021, volume perdagangan Indonesia-Slovenia mencapai USD 152 juta, meningkat sebesar 40.35% dibandingkan tahun 2020. Ekspor terbesar Indonesia ke Slovenia adalah batu bara, produk karet, alas kaki, dan tekstil. Sementara impor Indonesia dari Slovenia adalah gulungan metal, bahan obat-obatan, dan produk plastik. Menurut data BKPM, investasi Slovenia pada tahun 2016-2021 menunjukkan tren fluktuatif dan rekor tertinggi dicatatkan pada tahun 2019, yaitu sebesar USD 942,4 ribu untuk membiayai 12 proyek.

- **Ceko**

Hubungan Indonesia dengan Ceko atau sebelumnya masih bernama Cekoslowakia telah berlangsung sejak tahun 1930-an. Cekoslowakia adalah termasuk negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 2 Februari 1950. Bulan Maret 1952, Cekoslowakia membuka Konsulat Jenderal di Jakarta. Pada tahun 1957, kedua negara membuka kedutaan besar masing-masing di Jakarta dan Praha. Kedua negara juga telah memiliki mekanisme bilateral, antara lain Forum Konsultasi Bilateral, Sidang Komisi Bersama, dan Dialog Lintas Budaya dan Agama. Ceko merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia di kawasan Eropa Tengah. Pada periode

2017-2021, nilai perdagangan Indonesia-Ceko memiliki tren meningkat hingga mencapai USD 339 juta pada tahun 2020, setelah sebelumnya berkisar diangka USD 250 juta. Ceko juga merupakan investor terbesar kedua di Indonesia diantara negara kawasan Eropa Tengah. Kerukunan antar budaya dan umat beragama merupakan salah satu prioritas diplomasi Indonesia dan Ceko. Kedua negara melaksanakan Dialog Lintas Agama pada bulan Mei 2010 di Praha.

- **Slowakia**

Indonesia dan Slowakia telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1 Januari 1993. Hubungan bilateral Indonesia dan Slowakia pada tataran yang baik, dengan berbagai mekanisme bilateral yang sudah terbentuk, seperti Forum Konsultasi Bilateral. (FKB), dan Sidang Komisi Bersama (SKB). Dalam hal ekonomi dan perdagangan, Kementerian Perdagangan RI mencatat total perdagangan bilateral Indonesia-Slowakia periode 2017-2021 mengalami dinamika peningkatan dan penurunan. Pihak Indonesia masih terus menikmati surplus dengan Slowakia. Pihak Pemerintah dan bisnis kedua negara selalu berpandangan bahwa total nilai perdagangan bilateral Indonesia-Slowakia tidak mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Sementara dari segi sosial dan budaya, Pemerintah Indonesia telah memberikan beasiswa Darmasiswa kepada lebih dari 240 pelajar Slowakia selama periode 2001–2018.

- **Polandia**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Polandia telah terjalin sejak September 1955. Polandia adalah salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eropa Tengah. Kedua negara juga telah memiliki mekanisme bilateral, antara lain Forum Konsultasi Bilateral, Dialog Lintas Budaya dan Agama, serta Policy Planning Consultation. Dari segi ekonomi dan perdagangan, selama lima tahun terakhir (2017-2021), angka perdagangan Indonesia-Polandia mengalami peningkatan sebesar 11.46% dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021. Untuk meningkatkan *people to people contacts*, sejak 1987, Pemerintah RI telah memberikan program beasiswa Darmasiswa kepada sekitar 448 mahasiswa untuk bidang studi Bahasa Indonesia dan Seni Budaya pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Terdapat Asosiasi Persahabatan Indonesia-Polandia yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi para pecinta budaya Indonesia di Polandia dan penggalangan alumni Darmasiswa yang saat ini berjumlah 250 orang, tersebar di seluruh Polandia.

- **Hungaria**

Hubungan bilateral RI-Hungaria berada pada tataran yang sangat baik. Tingkat dan frekuensi pertemuan pada tingkat tertinggi dan tinggi menjadi penanda hubungan tersebut. Kedua negara juga telah memiliki mekanisme dialog bilateral yaitu Sidang Komisi Ekonomi Bersama dan Forum Konsultasi Bilateral. Indonesia merupakan mitra-dagang ke-6 terbesar Hungaria di Asia Tenggara. Sementara itu, Hungaria adalah mitra dagang ke-3 di kawasan Visegrad-4. Total nilai perdagangan RI-Hungaria tahun 2021 tercatat USD 197,74 juta (menurun 7,04% dari tahun 2020 yang mencapai USD 212, 73 juta). Hungaria memiliki 31 proyek investasi senilai USD 1,47 juta pada tahun 2021 sementara terdapat 25 proyek investasi senilai USD 1,55 juta pada tahun 2020. Upaya peningkatan kerja sama di bidang pendidikan dimulai sejak tahun 1993 dengan pemberian beasiswa Darmasiswa dari Pemri bagi pelajar Hungaria untuk belajar Bahasa Indonesia dan seni selama 8 bulan di Indonesia. Jumlah alumni program Darmasiswa dari Hongaria saat ini telah mencapai lebih dari 354 orang. Selain itu, Hungaria menyediakan beasiswa Stipendium Hungaricum bagi 100 orang mahasiswa asal Indonesia setiap tahun.

- **Jerman**

Hubungan diplomatik RI dan Jerman dimulai sejak tahun 1952. Pada tahun 2012 Indonesia dan Jerman telah menyepakati Deklarasi Kemitraan Komprehensif atau dikenal dengan Deklarasi Jakarta

yang menjadi dasar peningkatan 7 bidang kerja sama prioritas, yaitu polhankam; ekonomi & pembangunan; kesehatan; pensosbud; ristek; lingkungan hidup & energi terbarukan; serta people-to-people contact.

Saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jerman tahun 2016, kemitraan strategis kedua negara kembali dipertajam pada tiga fokus bidang kerja sama yaitu pendidikan vokasi, energi terbarukan dan kerja sama kemaritiman.

Bertepatan dengan semangat perayaan 70 tahun hubungan diplomatik, pada bulan Juni 2022, Presiden Jerman Y.M. Dr. Frank-Walter Steinmeier, melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, kedua negara berkomitmen untuk mempererat hubungan bilateral yang fokus pada kerjasama ekonomi, utamanya industri 4.0, energi terbarukan dan penguatan kerjasama perubahan iklim.

Di bidang ekonomi, Jerman merupakan mitra dagang utama Indonesia di Eropa. Merujuk data BPS, ekspor non migas Indonesia ke Jerman tahun 2021 menempati urutan 15 dari nilai total ekspor non migas Indonesia dengan dunia. Adapun investasi Jerman ke Indonesia sepanjang periode 2016-2021 senilai USD 1,22 milyar (3.093 proyek investasi). Indonesia juga merupakan salah satu Mitra Global dalam Kerja Sama Pembangunan Jerman, fokus pada 3 bidang prioritas, yakni iklim dan energi; sumber daya alam, pelatihan dan pertumbuhan berkelanjutan untuk pekerjaan layak; serta kesehatan. Pemerintah Jerman juga memiliki komitmen terhadap pelaksanaan Green Infrastructure Initiative/GII di Indonesia, yaitu meyiapkan pinjaman senilai EUR 2,5 miliar untuk 5 tahun kedepan guna mendukung program-program pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon secara berkelanjutan, khususnya di sektor transportasi umum, pengelolaan air dan air limbah, serta pengelolaan limbah padat.

- **Swiss**

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Swiss dibuka pada November 1951. Hingga saat ini, Swiss adalah salah satu mitra penting Indonesia di bidang perdagangan, investasi, pariwisata serta kerja sama pembangunan. Di tahun 2021, investasi Swiss di Indonesia tercatat mencapai USD 1,2 milyar. Jumlah ini menempatkan Swiss pada urutan kedua sumber penanaman modal dari wilayah Eropa (di bawah Belanda), dan peringkat ke-10 di daftar negara asal modal asing di Indonesia. Hubungan perdagangan dan investasi kedua negara semakin diperkuat dengan dua perjanjian penting yaitu Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA yang telah mulai berlaku sejak 1 November 2021 dan Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal yang ditandatangani pada 24 Mei 2022.

Di bidang pembangunan, kedua negara telah menjalin kerja sama sejak tahun 1960. Indonesia menjadi negara prioritas Swiss untuk kerja sama pembangunan selama 4 periode sejak 2009. Fokus kerja sama pembangunan periode 2021-2024 adalah penguatan institusi publik, penguatan daya saing sektor swasta terutama UMKM, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan fokus khusus pada isu kesetaraan gender, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

- **Liechtenstein**

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Liechtenstein dibuka pada 12 November 1998. Hubungan bilateral kedua negara berjalan dengan baik, meskipun masih dalam tingkat intensitas yang rendah. Perwakilan RI untuk Liechtenstein dirangkap oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern, Swiss, sedangkan Perwakilan Liechtenstein untuk Indonesia diwakili oleh Kedutaan Besar Swiss di Jakarta.

Kerja sama kedua negara terjalin terutama dalam hal saling dukung dalam forum internasional dan ekonomi. Indonesia dan Liechtenstein telah memiliki kerja sama aktif dalam kerangka Persetujuan

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA yang telah mulai berlaku pada 1 November 2021 (negara anggota EFTA lainnya adalah Islandia, Swiss dan Norwegia).

- **Norwegia**

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Norwegia dibuka pada 25 Januari 1950. Di tahun 2010, Indonesia dan Norwegia menyepakati arah kerja sama bilateral kedua negara melalui suatu deklarasi bersama berjudul “Membangun Persahabatan yang Dinamis di Abad 21” (Towards a Dynamic Partnership in the 21st Century). Deklarasi menekankan pentingnya kedua negara melakukan berbagai kerja sama yang berkesinambungan, terutama pada penanganan arsitektur global, tuntutan globalisasi dan tantangan masa depan dalam konteks forum internasional.

Norwegia adalah salah satu mitra utama Indonesia untuk kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, energi, lingkungan hidup, kesehatan, perikanan, dan kerja sama triangular. Indonesia terus mengupayakan perdagangan bilateral yang lebih berimbang dan saling menguntungkan dengan Norwegia, salah satunya dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA yang telah mulai berlaku pada 1 November 2021.

Di tahun 2022, kedua negara meraih capaian baru dalam kerja sama lingkungan hidup dengan disepakatinya Memorandum Saling Pengertian tentang Kemitraan Untuk Mendukung Upaya Indonesia Dalam Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lainnya.

- **Islandia**

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Islandia dimulai pada 13 Juni 1983. Perwakilan RI untuk Islandia dirangkap oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oslo, Norwegia, sedangkan Perwakilan Islandia untuk Indonesia dirangkap oleh Kedutaan Besar Islandia di Tokyo, Jepang.

Persahabatan dan kerja sama kedua negara terjalin antara lain dalam bentuk saling dukung dalam forum internasional (PBB, Dewan HAM, IMO, FATF), peningkatan kapasitas sektor perikanan, pengembangan energi panas bumi, serta perdagangan dan investasi.

- **Denmark**

Hubungan diplomatik Indonesia-Denmark telah dimulai sejak tanggal 15 Februari 1950, dan kedua negara telah menjalin hubungan bilateral yang relatif berlangsung dengan produktif dan stabil, ditandai dengan tidak adanya outstanding issues dan sikap tidak mencampuri urusan dalam negeri (non-intervensi) antara kedua negara. Denmark menyambut positif situasi Indonesia pasca-Reformasi yang telah mencapai kemajuan, sebagai emerging economy yang demokratis dan memainkan peranan penting di ASEAN, dunia Islam, dan secara internasional.

Secara geopolitik, Denmark memandang Indonesia - bersama India, Singapura, Filipina, Viet Nam – sebagai aktor penting bagi kepentingan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjalin kemitraan perdagangan bebas, dan meredakan konflik di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan bilateral Indonesia dan Denmark berstatus Kemitraan dengan “Deklarasi Bersama Kemitraan Inovatif untuk Abad ke-21” tingkat Menlu (2015) dan “Pernyataan Bersama” tingkat Kepala Pemerintahan (2017). Implementasinya disusun dalam kerangka Rencana Aksi Bersama yang kini telah memasuki periode kedua (2017-2020; 2021-2024) antara kedua Pemerintah.

Secara umum, Denmark adalah mitra dagang, investasi, dan pariwisata terbesar kedua Indonesia di kawasan Nordik. Denmark memiliki maskapai perkapalan terbesar di dunia, sehingga menjadi salah

satu pemain utama untuk perdagangan dengan Eropa khususnya di kawasan Nordik. Perekonomian Denmark merupakan industri maju dengan standar hidup yang tinggi

- **Lithuania**

Hubungan diplomatik RI-Lithuania telah terjalin sejak 1993. Hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara terbesar di kawasan Baltik ini dirangkap melalui Perwakilan RI di Kopenhagen, Denmark. Sebagai negara anggota EU, Lithuania telah meratifikasi Comprehensive Partnership Cooperation Agreement (PCA) Indonesia-EU (2012).

- **Swedia**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Swedia telah dimulai sejak tahun 1950, dengan pembukaan kantor perwakilan RI di Stockholm.

Swedia kini merupakan mitra dagang, investasi, dan pariwisata terbesar Indonesia di Nordik. Swedia melihat pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi dengan emerging economies (a.l. Brazil, Meksiko, Indonesia, Thailand). Kedua negara memiliki komitmen untuk memfokuskan kerja sama pada perdagangan dan investasi, pertahanan, kesehatan, lingkungan hidup, energi terbarukan dan smart mobility, serta kerja sama dalam kerangka multilateral (a.l. NPT Review, Indo-Pacific, G20 sustainable financing).

- **Latvia**

Hubungan diplomatik dijalin sejak tahun 1993. Latvia adalah negara Baltik pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan RI.

- **Finlandia**

Finlandia- berpenduduk 5,6 juta jiwa- adalah salah satu negara terluas wilayahnya di Eropa dan memiliki keunggulan dalam industri pengolahan kayu dan hasil hutan, maupun transformasi TIK ("EU's most digitalized country"; DESI Index 2022). Finlandia adalah anggota EU, sedang mengajukan keanggotaan NATO, dan satu-satunya negara Nordik yang mengadopsi Euro.

Hubungan diplomatik dengan Indonesia dibuka pada tahun 1954. Kedua negara memiliki kedutaan besar di masing-masing ibukota Jakarta dan Helsinki. Finlandia merupakan mitra dagang tujuan ekspor urutan ke-86 Indonesia.

- **Estonia**

Hubungan RI-Estonia diawali pengakuan RI atas kemerdekaan Estonia (1991) dan pembukaan hubungan diplomatik oleh kedua pemerintah sejak tahun 1993. Hubungan bilateral telah berkembang dengan baik dan konstruktif.

Estonia telah membuka perwakilan diplomatik pertamanya di Asia Tenggara, melalui pembukaan Kedutaan Besar Estonia di Singapura (2021).

- **Rumania**

Hubungan bilateral Indonesia-Rumania telah berlangsung sejak 20 Februari 1950 dan telah berjalan dengan baik. Rumania merupakan salah satu mitra utama Indonesia untuk kerja sama di bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan juga dukungan di berbagai forum internasional.

Di bidang politik, RI-Rumania telah mengadakan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) secara daring pada tanggal 30 Maret 2022. Pertemuan tersebut membahas tentang ketenagakerjaan, penanggulangan terorisme, investasi, promosi platform INA-ACCESS, penanggulangan COVID-19, upaya peningkatan turisme, serta kerja sama di bidang pendidikan. Pada tanggal 3 maret 2021, RI-Rumania telah mencapai kesepakatan dalam terbentuknya MoU on Counter-Terrorism Cooperation antara BNPT dengan Romanian Intelligence Service (RIS).

Di bidang ekonomi, secara umum kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara menunjukkan fluktuasi. Trend perdagangan bilateral selama 5 tahun (2017-2021) menunjukkan penurunan sebesar 2.64%. Indonesia turut mengupayakan adanya intensifikasi perdagangan bilateral dengan Rumania, antara lain dengan cara menyelenggarakan Indonesia-Romania Virtual Business Dialogue pada tanggal 10 Maret 2022, hasil kolaborasi KADIN Indonesia dan Kedubes Rumania di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, akan didorong kontak bisnis melalui KADIN kedua negara. Di sisi lain, Keunggulan Rumania di bidang mekanisasi pertanian, teknologi perbenihan dan industri peternakan, dapat dipertimbangkan sebagai pijakan awal pengembangan kerja sama ke depan. Sebagai antisipasi awal, pihak Rumania terindikasi ingin mengaktifkan forum bilateral pertanian dalam upaya mencari pasar untuk produk peternakan dan tanaman pangan (gandum).

Di bidang sosial budaya, pada tahun 2020, telah ditandatangani Agreement of Creative Cooperation antara ISI Denpasar dengan Nasional University of Music Bucharest yang ditindaklanjuti dengan Kunjungan Delegasi ISI Denpasar ke Bucharest pada tanggal 24 - 29 Oktober 2022 untuk melaksanakan workshop gamelan di National University of Music Bucharest.

- **Bulgaria**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Bulgaria dimulai pada tahun 1956 dan Kedutaan Besar RI di Sofia dibuka pada tahun 1962. Secara umum, hubungan bilateral Indonesia-Bulgaria berjalan baik. Letak strategis Bulgaria di kawasan Eropa Tenggara, Balkan dan Laut Hitam serta 2 (dua) pelabuhan laut internasional di Varna dan Burgas, berpotensi menjadi hub dan gateway bagi produk-produk ekspor utama Indonesia ke non-traditional dan emerging markets di kawasan dimaksud dan selanjutnya memasuki pasar Eropa lainnya.

Pada tahun 2021, volume perdagangan Indonesia dengan Bulgaria mencapai USD 129,04 juta dengan defisit di pihak Indonesia senilai USD -49,469 juta, turun -31.71% dari tahun 2020 yaitu USD 188,949 juta. Trend perdagangan dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan penurunan sebesar -7.21%.

Dalam 3 tahun terakhir tercapai sejumlah kesepakatan ekonomi yakni antara IDEA Group Bulgaria dan Mustika Ratu (2020), William Wongso dan Bella Bulgaria berbentuk LoI investasi Produksi Rendang di Eropa senilai USD 3 juta (2021), PT. Sasa Inti Indonesia dan PICCO Bulgaria untuk produk tepung kelapa atau high fat desiccated coconut senilai sekitar hampir USD 1,5 juta (2021), dan PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) dengan PICCO Bulgaria produk food ingredients berbentuk LoI dengan perkiraan nilai transaksi sebesar USD 2 juta (2022).

- **Makedonia Utara**

Hubungan diplomatik RI-Makedonia Utara secara resmi dibuka pada 23 Mei 1993.

Di bidang politik, RI-Makedonia Utara telah menyelenggarakan Pertemuan Dubes RI Sofia dengan Kemlu Makedonia Utara, 17 September 2021. Kegiatan dimaksud ditujukan untuk membahas Rencana Kunjungan Kerja Menlu Makedonia Utara ke wilayah Asia Tenggara pada bulan Maret-April 2022. Kedua negara turut mengadakan Forum Konsultasi Bilateral II di Skopje pada tanggal 21 Maret 2019.

Dari sisi ekonomi, Hubungan dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Makedonia Utara masih relatif kecil, fluktuatif dan cenderung mencatat neraca defisit bagi pihak Indonesia. Potensi kerja sama sektor pariwisata antara Indonesia dengan negara akreditasi masih terbuka. Diantara kerja sama yang dapat dikembangkan adalah perawatan bangunan peninggalan sejarah. Selain itu, pengelolaan obyek wisata dan budaya dapat menjadi potensi utama. Makedonia Utara berharap dapat menjalin kerjasama dengan RI di bidang teknologi informasi dan industri gelas.

Dari bidang sosial budaya, pihak Pemri telah menyerahkan Counterdraft Agreement between the Ministry of Culture of the Republic of Makedonia and Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia on Cooperation in the Field of Culture pada FKB ke-2 RI-Makedonia Utara tanggal 21 Maret 2019.

- **Albania**

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Albania dibuka melalui penandatanganan Komunike Bersama pada 4 Mei 1994.

Dalam tiga tahun terakhir, hubungan bilateral RI – Albania di bidang politik-keamanan secara umum berjalan dengan baik, meski belum ada hal-hal yang signifikan. Indonesia dan Albania memiliki hubungan yang baik dalam bidang pencalonan pada organisasi internasional. Sedangkan dalam hubungan dan kerja sama ekonomi, masih relatif kecil. Volume perdagangan Indonesia dengan Albania pada tahun 2021 sebesar USD 13,166 juta dengan surplus di pihak Indonesia senilai USD 2,572 juta, naik 94.58% dari tahun 2020 yaitu USD 6,766 juta. Trend perdagangan selama 5 tahun terakhir (2017-2021) tercatat kenaikan sebesar 0.58%. Pada saat INACEE tanggal 19 Oktober 2022, telah ditandatangani MoU on Energy Products Agency and Home Appliances Agency antara Modena Indonesia dan Xh&M Albania dengan Nilai bisnis mencapai USD 35 juta.

- **Kroasia**

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kroasia telah terjalin sejak 2 September 1992 melalui penandatanganan Komunike Bersama. Pada tahun 1995, Pemerintah Kroasia membuka Kedutaan Besar di Jakarta, sementara itu Pemerintah RI menetapkan Duta Besar RI di Budapest merangkap Kroasia. Sebagai upaya untuk semakin meningkatkan kerja sama kedua negara di segala bidang, Pemerintah RI telah memutuskan membuka perwakilan diplomatik RI tingkat kedutaan besar di Zagreb pada 29 November 2010.

Kerja sama perdagangan Indonesia dengan Kroasia dinilai fluktuatif. Volume perdagangan RI-Kroasia pada tahun 2021 sebesar USD 50,381 juta dengan surplus di pihak Indonesia senilai USD 35,289.9 juta, turun -11.63% dari tahun 2020 yaitu USD 57,009 juta. Trend perdagangan bilateral RI-Kroasia dalam 5 tahun (2017-2021) mencatat penurunan sebesar -8.55%.

Pada tanggal 6 November 2022, telah dibuka Restoran Indonesia pertama di Kroasia bernama "Wayang Restaurant" yang terletak di Rijeka - kota yang berjarak sekitar 150 km dari Zagreb.

- **Bosnia & Herzegovina**

Hubungan bilateral Indonesia-Bosnia dan Herzegovina dimulai sejak Pemerintah RI memberikan pengakuan kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina pada 20 Mei 1992 dan pembukaan hubungan diplomatik kedua negara pada 11 April 1994.

Kerja sama bidang politik kedua negara tercermin dari saling kunjung pejabat tingkat tinggi, pertemuan konsultasi bilateral dan saling dukung di forum internasional. Pada 9-14 Juni 2022, Menlu Bosnia dan Herzegovina, Y.M. Bisera Turkovic telah melakukan kunjungan kerja ke Indonesia.

Menlu Bosnia dan Herzegovina juga turut hadir dalam Bali Democracy Forum (BDF) ke-15, 8 Desember 2022 di Bali.

Kerja sama ekonomi Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina, khususnya di bidang perdagangan dan investasi, masih terbatas. Pasar ekonomi Bosnia dan Herzegovina yang relatif kecil dengan tingkat pengangguran yang tinggi turut mempengaruhi hal ini. Tren perdagangan kedua negara dalam periode 2017-2021 mengalami penurunan sebesar 12,13%.

Di bidang sosial budaya, kedua negara telah membentuk kerja sama dialog lintas agama. Selain itu, kedua negara terlibat aktif dalam bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa dan kerja sama antar universitas.

- **Serbia**

Hubungan diplomatik Indonesia-Serbia yang terbentuk sejak 4 November 1954 terjalin cukup erat.

Kerja sama di bidang politik ditandai antara lain dengan saling kunjung pejabat tingkat tinggi, pertemuan konsultasi bilateral dan saling dukung di berbagai fora internasional. Pada Mei 2022, Menlu Serbia, Y.M. Nikola Selakovic telah melakukan kunjungan kerja ke Indonesia, dimana sebelumnya Menlu RI telah melakukan kunjungan kerja ke Beograd pada Oktober 2021 dalam rangka menghadiri High Level Meeting Peringatan 60 Tahun KTT GNB I. Selain itu, kerja sama ekstradisi juga mempererat hubungan kedua negara dengan disetujuinya ekstradisi Maria Pauline Lumowa (pembobol Bank BNI tahun 2005) dari Serbia ke Indonesia pada Juli 2020. Indonesia dan Serbia juga memperluas kerja sama di bidang penanggulangan terorisme dengan ditandatanganinya MoU on Preventing and Fighting Transnational Crimes and Capacity Building pada tahun 2021.

Di bidang ekonomi, perdagangan kedua negara cukup fluktuatif dan masih relatif kecil, dengan neraca defisit bagi Indonesia hampir setiap tahunnya. Tren perdagangan bilateral selama 5 tahun (2017-2021) mengalami peningkatan sebesar 0,74%.

Di bidang sosial budaya, kedua negara telah membentuk kerja sama dialog lintas agama yakni "Indonesia-Serbia Bilateral Interfaith Dialogue (ISBID)". Selain itu, kedua negara terlibat aktif dalam bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa, kerja sama antar universitas, dan kerja sama kearsipan.

Serbia termasuk dalam daftar negara yang diberikan fasilitas bebas visa untuk kunjungan ke Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari. Serbia juga termasuk dalam daftar negara subyek VOA dalam Surat Edaran nomor IMI-0650.GR.01.01 Tahun 2022 tertanggal 26 Juli 2022. Terhitung tanggal 14 Oktober 2017, Pemerintah Serbia telah memberikan Bebas Visa Kunjungan Singkat bagi WNI ke Serbia untuk 30 (tiga puluh) hari dalam kurun waktu satu tahun.

- **Montenegro**

Indonesia merupakan negara ke-69 yang mengakui kemerdekaan Montenegro dengan pemberian pengakuan kemerdekaan Montenegro dari Pemerintah RI pada Juli 2006. Hubungan diplomatik kedua negara baru dilakukan pada 21 September 2011. Kerja sama kedua negara berkembang lebih intensif setelah pemerintah kedua negara menunjuk non resident Duta Besar untuk mewakili kepentingan kedua negara.

Di bidang ekonomi, nilai perdagangan Indonesia dan Montenegro relatif kecil, meski nilainya selalu meningkat setiap tahun dan Indonesia senantiasa mencatat neraca surplus dalam lima tahun terakhir (2017-2022). Produk Indonesia yang berpeluang di pasar Montenegro antara lain: karet, palm oil, aluminium fluoride.

Montenegro termasuk kedalam negara yang mendapatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan yang ditetapkan pada PP No. 21 tahun 2016. Saat ini, Montenegro belum memberikan Bebas Visa Kunjungan untuk pemegang paspor RI.

- **Rusia**

Indonesia – Rusia telah menjalin hubungan diplomatik sejak 3 Februari 1950. Rusia adalah salah satu mitra penting Indonesia. Intensitas hubungan bilateral mengalami peningkatan sejak penandatanganan “Deklarasi tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21” oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 April 2003. Deklarasi tersebut difokuskan pada kerja sama di bidang ekonomi, teknik militer, dan iptek. Perkembangan kerja sama terjadi di berbagai sektor baik politik, pertahanan dan keamanan, teknik militer, ekonomi, perdagangan dan investasi, maritim, pariwisata, pendidikan, sosial budaya dan kemanusiaan, serta saling dukung dalam berbagai organisasi internasional. Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2022 (Jan-Sept) mencapai USD 2,52 milyar, naik 20,05% dari periode yang sama 2021. Nilai ekspor RI ke Rusia pada 2022 (Jan-Sept) mencapai 1,04 milyar turun 4,5% dari periode yang sama 2021. Nilai investasi Rusia pada periode Januari – September 2022 mencapai USD 11,8 juta dalam 323 proyek.

- **Belarus**

Indonesia - Belarus telah menjalin hubungan diplomatik sejak 18 Juni 1993. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia alama defisit perdagangan karena impor bahan baku pupuk potassium dari Belarus. Neraca Perdagangan periode Jan-Okt 2022 capai USD 87 juta, turun 57% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Sejak konflik Rusia-Ukraina yang dimulai bulan Februari 2022, pengiriman bahan baku pupuk dari Belarus terganggu karena sanksi. Hal ini berdampak pada logistik, pembayaran dan asuransi pengiriman yang tinggi. Belarus juga memiliki arti penting karena merupakan salah satu anggota EAEU. Per 5 Desember 2022, Indonesia dan EAEU telah melakukan peluncuran bersama perundingan FTA RI-EAEU. Diharapkan FTA tersebut dapat menyeimbangkan neraca perdagangan RI-Belarus.

- **Armenia**

Indonesia - Armenia telah menjalin hubungan diplomatik sejak 22 September 1992. Neraca perdagangan kedua negara walaupun masih rendah, namun Indonesia selalu surplus. Periode Jan-Okt 2022, perdagangan mencapai USD 3,4 juta naik 26% dibanding periode yang sama tahu sebelumnya. Indonesia memiliki potensi untuk ekspor produk potensial RI seperti kopi dan teh. Armenia juga merupakan anggota EAEU sehingga perannya sangat diperlukan dalam mensukseskan perundingan FTA RI-EAEU. Armenia memiliki kepentingan untuk menggalang dukungan atas isu Nargono-Karabakh terkait batas wilayah antara Armenia dan Azerbaijan.

- **Turki**

Hubungan diplomatik RI dan Turki dimulai sejak tahun 1950. Pada tahun 2011, hubungan Indonesia dan Turki semakin solid dengan adanya “Joint Declaration Indonesia-Turkey: Towards an Enhanced Partnership in a New World Setting”. Pernyataan Bersama tersebut memuat komitmen kedua negara untuk saling bekerja sama di bidang politik-keamanan, ekonomi serta kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada 14 November 2022, Presiden Joko Widodo dan Presiden Recep Tayyip Erdogan kembali bertemu sebelum KTT G20 di Bali. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu bilateral, seperti kerja sama ekonomi dan perdagangan, pertahanan, sosial dan budaya, serta isu regional dan global lainnya.

Di bidang ekonomi, Indonesia menempati peringkat kedua di ASEAN sebagai negara pengekspor terbesar kedua ke Turki pada 2021, dengan nilai ekspor USD 1,604 juta. Tren ekspor Indonesia ke Turki pada periode 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan positif rata-rata 5,27%. Sedangkan impor Indonesia dari Turki periode 2017-2021 menunjukkan tren -12,87%. Sedangkan di bidang investasi, pada periode Januari-Juni 2022 tercatat investasi Turki di Indonesia sebesar USD 2 juta yang mencakup 20 proyek.

- **Ukraina**

Hubungan diplomatik RI-Ukraina dijalin melalui Joint Communiqué di Moskow, 11 Juni 1992 dan terus berkembang dalam berbagai bentuk kerja sama di antara kedua negara. Sejak dimulainya operasi militer Rusia ke wilayah Ukraina pada 24 Februari 2022, konflik militer Ukraina-Rusia masih terus berlangsung hingga saat ini (21 Desember 2022). Presiden Joko Widodo adalah Pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina (29/06) sejak konflik militer terjadi. Kunjungan tersebut menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah dan turut menyampaikan pesan perdamaian untuk pengakhiran konflik dan menempuh negosiasi damai, serta kepedulian rakyat dan Pemerintah Indonesia atas dampak konflik militer bagi warga sipil, melalui pemberian bantuan obat-obatan dan alkes, serta komitmen rekonstruksi rumah sakit di Ukraina, apabila konflik militer telah berakhir. Pemerintah Indonesia juga sebelumnya telah memberikan bantuan hibah uang tunai sekitar USD 250.000 melalui Palang Merah Ukraina untuk pengadaan barang kebutuhan warga sipil yang terdampak konflik militer.

Indonesia merupakan mitra dagang utama Ukraina bersama negara-negara ASEAN yang lain, dengan nilai perdagangan USD 1,01 miliar. Pada tahun 2021 nilai perdagangan bilateral RI-Ukraina meningkat sekitar 22,8% dibanding tahun 2020. Ukraina merupakan salah satu mitra dagang terbesar dengan RI di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Salah satu usaha untuk meningkatkan nilai perdagangan diantara kedua negara tersebut adalah dengan mengadakan Sidang Komisi Bersama Kerja Sama Ekonomi dan Teknik ke-4 secara hybrid pada 26 Juli 2022.

- **Georgia**

Hubungan diplomatik RI – Georgia disepakati dalam Komunike Bersama yang ditandatangani pada 25 Januari 1993. Melalui Keputusan Presiden RI No. 88/1993 tertanggal 30 September 1993, Perwakilan RI di Kyiv, Ukraina bertugas merangkap Georgia. Pada Mei 2021 telah dibuka the Extension Office of the Embassy of the Republic of Indonesia in Kyiv di Tbilisi. Kedutaan Besar Georgia di Jakarta dibuka pada Oktober 2012. Beberapa kerja sama RI - Georgia yang telah berlangsung baik, di antaranya adalah kerja sama parlemen kedua negara, kepolisian dan bidang pelayanan publik.

Pada bidang ekonomi, di tahun 2021 tercatat kenaikan nilai perdagangan bilateral paling drastis selama 5 tahun terakhir, yaitu mencapai 450,33% dari tahun sebelumnya, menjadi USD 274,3 juta, dengan surplus di pihak Indonesia senilai USD 273,4 juta. Hal ini dikarenakan ekspor Indonesia meningkat tajam 503,62% mencapai USD 273,9 juta pada 2021. Produk Indonesia yang berpotensi diekspor ke Georgia adalah pernak-pernik pendukung industri hospitality (perhotelan dan restoran), seperti kerajinan tangan, perlengkapan hotel dan restoran, kopi dan teh. Hal ini dilatarbelakangi dengan peran penting sektor pariwisata di Georgia yang berkontribusi sebesar 20% terhadap PDB Georgia.

- **Uni Eropa**

Uni Eropa (UE) adalah organisasi antarpemerintah dan supranasional yang beranggotakan 27 negara-negara Eropa. UE bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintah.

RI dan UE memiliki Perjanjian Kemitraan Komprehensif RI-UE (Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation) yang sering disebut Partnership and Cooperation Agreement (PCA). PCA mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014 dan merupakan perjanjian payung yang mengatur secara umum berbagai bidang kerja sama yang menjadi kepentingan dan prioritas kedua belah pihak.

RI dan UE melaksanakan kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam PCA RI-UE, antara lain saling menghormati, dukungan terhadap integritas wilayah, serta kemitraan yang sejajar.

Sebagai monitoring kerja sama di bawah kerangka PCA, kedua pihak membentuk Komite Bersama (Joint Committee) RI-UE pada tingkat Dirjen untuk memantau dan memberi arahan kerja sama bilateral RI-UE. Pertemuan Joint Committee RI-UE telah terlaksana 6 kali. Joint Committee pertama dilaksanakan pada 28–29 November 2016 di Brussel; kedua di Jakarta, 6 Desember 2017; ketiga di Brussel, 11 Desember 2018, keempat di Jakarta, 4 Februari 2020, kelima melalui video conference, 22 Juni 2021; dan keenam di Bali, 29 Juli 2022.

- **Asia-Europe Meeting (ASEM)**

Asia-Europe Meeting (ASEM) merupakan forum dialog dan kerja sama informal antara Asia dan Eropa yang dibentuk di Bangkok pada tahun 1996. Dimulai dengan 26 mitra, kini ASEM telah berkembang menjadi 53 mitra (21 negara Asia, 30 negara Eropa, Sekretariat ASEAN, dan Uni Eropa).

ASEM memiliki tiga pilar kerja sama, yaitu politik-keamanan, ekonomi-perdagangan-investasi, dan budaya serta bidang-bidang lainnya. Umumnya, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan pada proses ASEM bersifat tidak mengikat. ASEM juga tidak memiliki sekretariat. Keputusan ASEM yang tertinggi ditetapkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang sebelumnya dibahas pada tingkat Foreign Ministers' Meeting (FMM) dan Senior Officials' Meeting (SOM). Menteri Luar Negeri dan pejabat tingginya (senior officials) melakukan tugas koordinasi dengan bantuan para koordinator regional ASEM, yang mewakili kelompok ASEAN, kelompok Eropa, dan kelompok Northeast and South Asia (NESA).

Indonesia terus aktif mengembangkan ketiga pilar kerja sama ASEM. Indonesia menyelenggarakan berbagai pertemuan ASEM dan berpartisipasi sebagai co-sponsor di berbagai inisiatif ASEM.

Sebagaimana telah diamanatkan pada KTT ASEM yang ke-11 pada tahun 2016, negara-negara mitra ASEM merayakan ASEM Day setiap bulan Maret untuk meningkatkan visibilitas dan keberadaan ASEM di masyarakat. Akibat dari pandemi COVID-19, perayaan ASEM Day pada tahun 2020-2021 diselenggarakan kegiatan secara virtual dan hybrid.

Selain itu, ASEM mengadakan FMM dan KTT setiap tahunnya secara bergantian. Namun, dikarenakan pandemi COVID-19, KTT ASEM yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2020 baru dapat diselenggarakan pada tahun 2021.

- **Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC)**

FEALAC merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan konektivitas Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia. FEALAC dapat meningkatkan peran kepemimpinan Indonesia dalam organisasi kawasan mengingat Indonesia pernah menjadi Koordinator Regional untuk kawasan

Asia Timur serta saat ini menjabat sebagai Co-Chair FEALAC Working Group Culture, Youth, Gender and Sport (WG CYGS) periode 2019-2021 bersama dengan Ekuador.

Indonesia memiliki beberapa proyek nasional dalam kerangka Working Group Trade, Investment, Tourism, MSMEs (TITM) seperti pembentukan FEALAC Trade Regulation Database (2017), dan FEALAC Journalist Visit Program (2016); serta dalam kerangka WG CGYS yaitu penyelenggaraan Indonesia FEALAC Youth Conference (IFYC) tahun 2015.

Indonesia pernah menjadi host dalam penyelenggaraan FMM ke-6 pada 13-14 Juni 2013 di Bali yang menghasilkan Deklarasi Uluwatu. Deklarasi dimaksud menegaskan kembali komitmen negara-negara anggota FEALAC untuk melanjutkan dan memperdalam kerja sama dua kawasan untuk pembangunan berkelanjutan.

- **Pacific Alliance**

Pacific Alliance atau Aliansi Pasifik merupakan inisiatif integrasi kawasan yang dibentuk secara resmi pada 28 April 2011 melalui penandatanganan Lima Presidential Declaration.

Pada KTT ke-4 (6/6/2012), negara-negara anggota menandatangani Framework Agreement for the Pacific Alliance (AMAP) yang mengatur a.l. mengenai pendirian Aliansi Pasifik, tujuan, struktur organisasi, mekanisme berlakunya AMAP, dan ketentuan negara observer. Selanjutnya pada tahun 2016, negara-negara anggota Aliansi Pasifik menandatangani protokol tambahan AMAP yang mengatur mengenai pergerakan bebas barang, jasa, modal dan manusia antarnegara anggota Aliansi Pasifik.

Indonesia dan Aliansi Pasifik terus memperkuat kerja sama, antara lain melalui sejumlah people-to-people contact di berbagai bidang. Sebagai observer state, Indonesia secara rutin hadir dan aktif di Cooperation Forum of the Pacific Alliance.

- **MERCOSUR (Mercado Común del Sur / The Southern Common Market)**

MERCOSUR (Mercado Commun del Sur/The Southern Common Market) merupakan organisasi ekonomi dan politik yang dibentuk pada 1991 dengan beranggotakan 4 (empat) negara: Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay. Organisasi ini dibentuk melalui Treaty of Asunción (1991) dan diamandemen dengan Protocol of Ouro Preto (1994) yang memformalkan status MERCOSUR sebagai custom union.

Indonesia dan MERCOSUR telah sepakat meluncurkan Indonesia–Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement (IM CEPA) melalui konferensi video pada pertemuan Mercosur’s Common Market Council (CMC) pada 16 Desember 2021 silam. Sebagai CEPA pertama yang diluncurkan MERCOSUR dengan mitranya, Indonesia–Mercosur CEPA dinilai cukup historis.

- **CARICOM (Caribbean Community)**

Caribbean Community (CARICOM) dibentuk pada 4 Juli 1973 dengan ditandatanganinya Treaty of Chaguaramas oleh PM Barbados (Errol Barrow), PM Guyana (Forbes Burnham), PM Jamaika (Michael Manley), dan PM Trinidad dan Tobago (Eric Williams). Perjanjian ini direvisi pada tahun 2002 dengan dibentuknya single market dan single economy CARICOM.

Tujuan CARICOM adalah integrasi ekonomi para negara anggota dengan berdirinya sebuah rezim common market dan koordinasi kebijakan luar negeri para negara anggota. CARICOM memiliki 4 (empat) pilar utama, yaitu integrasi ekonomi, koordinasi kebijakan luar negeri, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sosial, serta keamanan.

Indonesia telah resmi terakreditasi sebagai Third State dalam CARICOM sejak 2 Mei 2018. Akreditasi tersebut diharapkan membawa hubungan Indonesia dan CARICOM pada tingkatan yang lebih tinggi di berbagai bidang untuk memperoleh manfaat nyata bagi masyarakat kedua kawasan.

Indonesia dan CARICOM terus memperkuat kerja sama, antara lain melalui pemberian hibah Pemerintah Indonesia kepada CARICOM dalam bentuk pelatihan capacity building di bidang kebencanaan, pada tahun 2023 secara luring di Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan pelatihan serupa secara daring pada 8-12 Agustus 2022 atas kerjasama antara NAM-CSSTC dan Pemri.

- **SICA (Sistema de la Integración Centroamericana/Central American Integration System)**

Penandatanganan Tegucigalpa Protocol dalam XI Summit Meeting of Central American Presidents pada 13 Desember 1991 menjadi tonggak berdirinya SICA (Sistema de la Integración Centroamericana/ Central American Integration System).

SICA didirikan untuk mewujudkan integrasi Amerika Tengah, khususnya dalam bidang a.l. ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dengan pilar prioritas kawasan di bidang keamanan demokratis; pencegahan dan mitigasi bencana alam dan dampak perubahan iklim; integrasi sosial; integrasi ekonomi; dan penguatan kelembagaan. Kantor pusat SICA terletak di San Salvador, El Salvador.

Indonesia dan SICA terus memperkuat kerja sama, antara lain melalui pemberian hibah Pemerintah Indonesia kepada SICA dalam bentuk pelatihan capacity building di bidang kebencanaan, pada tahun 2023 secara luring di Indonesia. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan pelatihan serupa secara daring pada 8-12 Agustus 2022 atas kerjasama antara NAM-CSSTC dan Pemri.

- **NATO (North Atlantic Treaty Organization)**

North Atlantic Treaty Organization (NATO) merupakan organisasi keamanan regional negara-negara di kawasan utara Samudera Atlantik berbasis collective defense yang terbentuk pada 4 April 1949. NATO merupakan sebuah organisasi intra-governmental yang dibentuk untuk menciptakan keamanan bersama yang ditujukan bagi negara-negara yang berada di kawasan Atlantik Utara sebagai respons atas meningkatnya tensi antara blok Barat dan blok Timur. Dasar pembentukan NATO tercantum dalam North Atlantic Treaty yang tercantum dalam artikel 5 yang pada intinya berusaha menciptakan stabilitas ideologi dari berbagai ancaman dengan menggunakan pendekatan keamanan.

Hingga saat ini Indonesia dan NATO belum memiliki hubungan kerja sama militer maupun kemitraan. Namun demikian, Indonesia tetap melakukan engagement dengan NATO sebagai langkah antisipasi dalam menyikapi berbagai perkembangan isu pertahanan dan keamanan dunia yang akan berdampak pada stabilitas pertahanan dan keamanan kawasan.

- **Eurasian Economic Union (EAEU)**

Eurasian Economic Union (EAEU) didirikan pada tahun 2000 dan kemudian berkembang menjadi customs union dan single market pada tahun 2010. EAEU merupakan customs union di mana terdapat keleluasaan perpindahan barang, jasa, modal dan tenaga kerja di antara negara-negara anggotanya. Sebagai organisasi ekonomi yang negara-negara anggotanya merupakan pecahan dari Uni Soviet di kawasan Eropa dan Asia (Eurasia), EAEU memiliki potensi besar sebagai target pasar dan mitra perdagangan baru bagi Indonesia.

- **Yordania**

Sejak dibukanya hubungan diplomatik RI-Yordania pada 22 Oktober 1951, kerja sama bilateral kedua negara di berbagai sektor terus terjalin dengan baik. Yordania yang memiliki posisi geopolitik strategis di kawasan merupakan salah satu mitra penting Indonesia dalam menangani isu-isu krusial di kawasan dan global, khususnya isu Palestina dan terorisme. Di bidang ekonomi, Yordania sebagai salah satu negara dengan cadangan fosfat terbesar di dunia merupakan pemasok kebutuhan bahan baku pupuk yang sangat dibutuhkan bagi sektor pertanian Indonesia. Kerja sama di bidang fosfat ini juga telah menarik masuknya investasi Jordan Phosphate Mines Company (JPMC) yang membangun perusahaan patungan bersama PT. Petrokimia Gresik (PG) bernama PT. Petro Jordan Abadi (PJA) di Gresik dengan kepemilikan saham masing-masing 50% sejak Oktober 2014. Saat ini (tahun 2022) sedang dijajaki outbond investment dari Indonesia untuk membangun pabrik industri fosfat di Yordania.

- **Palestina**

Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestina di Aljazair pada 15 November 1988. Sebagai wujud dukungan Indonesia kepada Palestina sebagai negara baru, pada 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani “Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia-Palestina” yang sekaligus meresmikan pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta. Duta Besar pertama Palestina untuk Indonesia menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990. Pada 1989, Indonesia menetapkan Kedutaan Besar RI di Tunisia untuk merangkap akreditasi RI untuk negara Palestina. Seiring dengan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah, pada 1 Juni 2004, Indonesia memutuskan untuk memindahkan akreditasi untuk Palestina menjadi rangkapan KBRI Amman. Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh melalui berbagai forum internasional. Kedua negara terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan hubungan bilateral melalui kunjungan resmi di tengah keterbatasan perizinan yang dikendalikan oleh pihak okupasi Israel.

- **Lebanon**

Hubungan antara Indonesia dengan Lebanon bermula dengan diumumkannya pernyataan pengakuan de-jure atas negara Republik Indonesia oleh Presiden Lebanon, Bechara El-Khoury pada tanggal 29 Juli 1947. Lebanon adalah negara ketiga yang mengakui Indonesia setelah Mesir dan Suriah. Hubungan diplomatik kedua negara telah dirintis sejak tahun 1950-an melalui Duta Besar RI di Kairo yang merangkap Lebanon, disusul dengan keputusan Pemerintah Indonesia untuk membuka perwakilannya di Beirut dengan status Kuasa Usaha, sementara Duta Besarnya tetap dirangkap dari Kairo. Ketika pecah perang saudara di Lebanon (1975-1990) Perwakilan RI di Beirut ditutup pada tahun 1976 karena alasan keamanan, dan dirangkap oleh KBRI Damaskus. Kendati kedua negara baru membuka kembali perwakilannya pada tahun 1996, tetapi hubungan dan kerja sama politik kedua negara selama ini terjaga dengan cukup baik. Menyangkut isu-isu internal, kedua negara mampu menunjukkan saling pengertian dengan tidak saling mencampuri urusan internal. Berbagai krisis politik di Indonesia seperti isu Aceh, konflik SARA di Ambon, HAM dan sebagainya ditanggapi cukup bijak oleh Lebanon dengan menyerahkan sepenuhnya solusinya kepada pemerintah RI. Demikian pula sebaliknya, pemerintah RI sangat mendukung posisi Lebanon dalam menghadapi berbagai isu terutama dalam konfliknya dengan Israel. Penempatan pasukan perdamaian Indonesia dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan adalah wujud nyata dari dukungan RI kepada Lebanon. Belum ada catatan mengenai mekanisme bilateral RI-Lebanon.

- **Suriah**

Hubungan politik RI-Suriah dimulai sejak Suriah mengakui RI secara de jure pada 2 Juli 1947. Hubungan diplomatik kedua negara dibuka pada 1950. Indonesia menempatkan seorang Kuasa Usaha di Damaskus pada 1955. Antara 1959-1961 saat Suriah bergabung dengan Mesir di bawah United Arab Republic (UAR), Perwakilan RI di Damaskus diubah menjadi Konsulat Jenderal. Konsulat Jenderal di Damaskus kembali menjadi KBRI ketika UAR pecah dan Suriah kembali menjadi negara terpisah pada 1961. Hubungan diplomatik yang terus berkembang mendorong RI-Suriah menandatangani MoU mengenai Pembentukan Konsultasi Bilateral di Jakarta pada 27 Juni 1997, serta Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Ekonomi, Pengetahuan, Teknik dan Kebudayaan di Damaskus pada 3 Februari 2007. Meskipun karena satu dan lain hal, pertemuan mekanisme bilateral tersebut masih belum dapat terlaksana hingga saat ini. Kedua negara juga memiliki kesamaan pandangan dalam menanggapi berbagai isu regional seperti isu Palestina dan isu-isu global seperti transnational crime dan terorisme. Kerja sama di fora internasional juga berkembang baik yang tercermin dari banyaknya saling dukung dalam pencalonan di berbagai posisi/jabatan pada organisasi-organisasi internasional.

- **Kuwait**

Hubungan diplomatik RI-Kuwait dibuka pada 28 Februari 1968. Hubungan bilateral dilaksanakan melalui KBRI Baghdad sampai KBRI Kuwait City dibuka pada April 1976. Hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia dengan Kuwait terjalin baik sejak dibukanya hubungan diplomatik. Kedua negara telah memiliki dua mekanisme bilateral, yaitu Sidang Komisi Bersama tingkat Menteri Luar Negeri (SKB) dan pertemuan Joint Trade Committee (JTC) tingkat Senior Officials atau pejabat Eselon II antar kedua Kementerian Perdagangan. Pertemuan pertama SKB dilaksanakan di Kuwait City pada 1-2 September 2019, yang didahului dengan Senior Officials' Meeting (SOM) pejabat Eselon II antar Kementerian Luar Negeri di Kuwait City pada 9-10 Juli 2019. Pertemuan pertama JTC dilaksanakan secara virtual pada 25 November 2020.

- **Irak**

Hubungan diplomatik RI-Irak dibuka pada 1950. KBRI Baghdad dibuka pada 27 Maret 1950. Hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia dengan Irak terjalin baik sejak dibukanya hubungan diplomatik. Kedua negara telah memiliki mekanisme bilateral Sidang Komisi Bersama tingkat Menteri Luar Negeri (SKB). Pertemuan terakhir SKB adalah pertemuan ke-6 yang dilaksanakan di Jakarta pada 10-11 Juni 2011.

- **Libya**

Hubungan diplomatik RI-Libya dibuka pada 17 Oktober 1991. Hubungan bilateral dilaksanakan melalui KBRI Tripoli yang kembali beroperasi dari Tripoli pada 10 Mei 2022. Hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia dengan Libya terjalin baik sejak dibukanya hubungan diplomatik. Kedua negara telah memiliki mekanisme bilateral, yaitu Sidang Komisi Bersama tingkat Menteri Luar Negeri (SKB). Pertemuan terakhir SKB adalah pertemuan pertama yang dilaksanakan di Yogyakarta pada 23-25 Maret 2009.

- **Sudan**

Hubungan diplomatik RI-Sudan dibuka pada 1960. Hubungan bilateral dilaksanakan melalui KBRI Khartoum yang juga dibuka pada 1960. Hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia dengan Sudan terjalin baik sejak dibukanya hubungan diplomatik. Kedua negara telah memiliki dua mekanisme bilateral, yaitu Sidang Komunikasi Bersama tingkat Menteri Luar Negeri (SKB) dan pertemuan

Forum Konsultasi Bilateral tingkat Wakil Menteri Luar Negeri (FKB). Pertemuan terakhir SKB adalah pertemuan pertama yang dilaksanakan di Jakarta pada 22-23 Juli 2002. Pertemuan terakhir FKB adalah pertemuan pertama yang dilaksanakan di Jakarta pada 16 Februari 2015.

- **Australia**

Hubungan diplomatik RI-Australia dimulai pada tahun 1949. Bagi Indonesia, Australia merupakan peluang besar kerja sama ekonomi. Australia melihat Indonesia dan kawasan ASEAN sebagai mitra kerja sama ekonomi (bisnis, perdagangan dan investasi) yang potensial. Volume perdagangan bilateral Indonesia-Australia tahun 2021 sebesar US\$ 12,6 milyar, meningkat 8,347% dari tahun 2020 (US\$ 7,1 milyar). Surplus perdagangan berada di pihak Australia sebesar US\$ 6,2 milyar.

Indonesia dan Australia sudah memiliki *Comprehensive Strategic Partnership* (CSP) sejak 2018 yang memuat 5 pilar yakni: kemitraan ekonomi dan pembangunan, *connecting people*, mengamankan kepentingan Bersama dan kawasan, kerjasama maritime, dan kontribusi keamanan dan kemakmuran Indo-Pasifik.

IA-CEPA telah berlaku sejak 5 Juli 2020, dengan beberapa *highlights* seperti penghapusan dan penurunan tarif, saling meningkatkan investasi, memanfaatkan keunggulan produk kedua negara.

- **Vanuatu**

Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Vanuatu pada tahun 1980. Vanuatu memiliki kesamaan postur geografi dengan Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua negara secara resmi membuka hubungan diplomatik pada tahun 1995.

Vanuatu juga merupakan salah satu mitra dagang Indonesia di Pasifik. Volume perdagangan Indonesia-Vanuatu sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 berangsur membaik bahkan meningkat hingga US\$ 6,8 juta apabila dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Highlights penting hubungan kedua negara dewasa ini ditandai oleh saling dukung terhadap pencalonan Menlu RI sebagai *co-chair COVAX AMC Engagement Group*, keikutsertaan pada *the 4th Melanesian Spearhead Group Regional Security Strategy Working Group* di Bali pada 6-10 Juni 2022 dan pertemuan bilateral di sela-sela *Indonesia-Pacific Forum for Development* pada 6 Desember 2022.

- **Selandia Baru**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Selandia Baru dimulai pada 28 Juni 1958 (64 tahun). Indonesia membuka Kedutaan Besar di Wellington sedangkan Kedutaan Besar Selandia Baru berada di Jakarta.

Secara umum, hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru berjalan baik dan memiliki hubungan kemitraan komprehensif sejak 2018. Pada tahun 2022, volume perdagangan kedua

negara USD 1,85 miliar dengan surplus di pihak Selandia Baru senilai USD 579,2 juta. Trend perdagangan dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan peningkatan 6,62%.

Kedua negara memiliki mekanisme pertemuan tingkat Menlu yaitu *Joint Ministerial Commission* yang dilakukan setiap tahun. Kedua negara juga memiliki forum diskusi pertahanan dan keamanan tahunan yaitu *Bilateral Defence Talk*.

Indonesia merupakan mitra kerja sama Selandia Baru dalam program pembangunan bilateral terbesar di wilayah Pasifik.

- **Kepulauan Cook**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Kepulauan Cook dimulai pada 12 Juli 2019 (3 tahun) melalui penandatanganan *Joint Communique* antara PM sekaligus Menlu Kep. Cook, Henry Puna, dan Menlu RI di sela-sela *Pacific Exposition 2019* di Selandia Baru.

Rencana pembukaan hubungan diplomatik ini telah dirintis sejak 12 Agustus 2013 ketika PM Kep. Cook bertemu dengan Dubes RI Wellington di Selandia Baru. Dubes RI di Wellington saat ini juga merangkap sebagai Dubes RI untuk Kep. Cook.

Indonesia dan Kep. Cook memiliki beberapa kerja sama prioritas khususnya di bidang kerja sama teknik, pengembangan kapasitas, serta kerja sama di organisasi regional seperti *Pacific Islands Forum* (PIF).

- **Samoa**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Samoa dimulai pada 17 Maret 1980 di mana Duta Besar RI di Wellington juga merangkap Samoa dan Duta Besar Samoa untuk Indonesia berkedudukan di Canberra.

Indonesia dan Samoa memiliki beberapa kerja sama prioritas khususnya di bidang kelautan, perikanan, dan pertanian serta peningkatan *people-to-people contact* melalui pemberian beasiswa, pengembangan kapasitas, serta kerja sama di organisasi regional seperti PIF dan PIDF. Total perdagangan Indonesia-Samoa mencapai USD 33,7 juta (2022), meningkat 13,7% dari tahun 2021. Perdagangan Indonesia tercatat surplus USD 14,343 juta (2022).

- **Niue**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Niue dimulai pada 12 Juli 2019 melalui penandatanganan *Joint Communique* antara PM sekaligus Menlu Niue, Toke Talagi, dan Menlu RI di sela-sela *Pacific Exposition 2019* di Selandia Baru. Dubes RI di Wellington saat ini juga merangkap sebagai Dubes RI untuk Niue.

Indonesia dan Niue memiliki beberapa kerja sama prioritas khususnya di bidang kerja sama teknik, pengembangan kapasitas, serta kerja sama di organisasi regional.

- **Fiji**

Hubungan diplomatik RI-Fiji diawali tahun 1974 dengan status rangkapan dari KBRI Wellington. Hubungan makin erat dengan dibukanya Kedutaan Besar RI di Suva pada 22 Agustus 2002 dan Kedutaan Besar Fiji di Jakarta pada 6 April 2011 yang diresmikan langsung oleh PM Fiji saat itu, Fiji Josaia Voreqe Bainimarama.

Hubungan semakin meningkat dengan ditandatanganinya perjanjian *Development Cooperation Agreement* (DCA) RI-Fiji pada 27 Mei 2011.

Tren perdagangan kedua negara selama periode 2017-2021 sebesar 2,00%.

Indonesia merupakan salah satu mitra pembangunan bagi Fiji melalui program hibah dan pengembangan kapasitas.

Indonesia mendapat kehormatan sebagai salah satu *Co-Leaders* Multinational Observer Group (MOG) Pemilu Fiji bersama Australia dan India pada Pemilu Fiji berturut-turut yaitu pada tahun 2014, 2018 dan 2022.

- **Tuvalu**

Hubungan diplomatik RI-Tuvalu resmi dibuka melalui penandatanganan Komunique Bersama antara Menlu RI Dr. R.M. Marty M. Natalegawa dan Menteri Luar Negeri, Perdagangan, Tenaga Kerja, dan Pariwisata Tuvalu Apisai Lelemi di sela-sela SMU ke-67 PBB di New York, 1 Oktober 2012. Perwakilan RI Suva merangkap untuk Tuvalu dan Komisi Tinggi Tuvalu di Suva terakreditasi untuk Indonesia.

Nilai perdagangan kedua negara cenderung masih kecil. Tercatat total perdagangan kedua negara tahun 2021 sebesar 0,1%, jauh menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 1,7% dan 2019 sebesar 1,7%

Selama periode Maret 2019 – Desember 2022 pemerintah Tuvalu telah memposisikan Indonesia sebagai mitra pembangunan dan sebagai negara sahabat yang penting di Pasifik. Hal ini ditunjukkan dengan posisi Tuvalu yang mendukung integritas wilayah Indonesia serta dukungan terhadap pencalonan Indonesia untuk berbagai posisi di organisasi-organisasi internasional.

- **Kiribati**

Hubungan diplomatik RI-Kiribati resmi dibuka sejak 8 Mei 2013 melalui penandatanganan Komunique Bersama di Natadola, Fiji di sela-sela G-77 High-Level Panel of Eminent Persons. Perwakilan RI Suva merangkap untuk Kiribati dan Komisi Tinggi Kiribati di Suva terakreditasi untuk Indonesia.

Nilai perdagangan dengan Kiribati pada tahun 2021 tercatat sebesar 16,1% dengan tren perdagangan dalam 5 tahun (2017-2021) sebesar 49,43%.

Pemerintah Kiribati secara konsisten mendukung integritas wilayah Indonesia dan juga pencalonan Indonesia di badan-badan PBB dan organisasi internasional lainnya.

- **Nauru**

Hubungan diplomatik RI-Nauru resmi dibuka dengan penandatanganan Komunike Bersama oleh Wakil Tetap RI New York (PBB), Desra Percaya, dan Wakil Tetap Nauru, Marlene Moses, di New York, 21 Desember 2012. Hal itu dilanjutkan dengan persetujuan Nauru bahwa KBRI Suva merangkap untuk Nauru pada 7 Januari 2013.

Nilai perdagangan antara Indonesia-Nauru pada prinsipnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2021 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Tren perdagangan tahun 2017-2021 sebesar 8,39%.

Pemerintah Nauru mendukung kedaulatan RI. Nauru juga tercatat telah memberikan dukungannya terhadap beberapa pencalonan Indonesia di PBB dan organisasi internasional lainnya.

Sebagai bentuk dukungan kepada Nauru, pada 2019, Pemri memberikan hibah kepada Nauru untuk pengadaan *tug boat* dan tongkang (yang kemudian berubah menjadi pengadaan kapal kontainer) dengan nilai sebesar Rp. 35.652.500.000 equivalent AUD 3.681.967,41.

- **Papua New Guinea**

Hubungan diplomatik kedua negara dimulai sejak 16 September 1975 (47 tahun). Kedua negara telah meningkatkan kerja samanya melalui kemitraan komprehensif sejak 2013.

Selama periode 25 tahun, ekspor Indonesia ke PNG meningkat pada angka rata-rata tahunan sebesar 7,38% dari AS\$23,4 juta pada 1995 menjadi AS\$139 juta pada 2020.

Fokus kerja sama bilateral antara lain:

- a. Pengelolaan perbatasan
- b. Penanganan kejahatan lintas-negara
- c. Pengembangan sumber energi mineral dan minyak
- d. Promosi kerja sama perdagangan dan investasi (khususnya infrastruktur)
- e. Promosi *people-to-people contacts* (*capacity building*, kepemudaan dan olahraga)

- **Kepulauan Solomon**

Hubungan diplomatik kedua negara dimulai sejak 28 Juli 1983. Kepulauan Solomon membuka perwakilannya di Jakarta sejak Agustus 2014 sementara KBRI di Port Moresby masih merangkap akreditasi untuk Kepulauan Solomon.

Pada tahun 2021, ekspor Indonesia ke Kepulauan Solomon mencapai nilai AS\$14,9 juta. Ekspor Indonesia juga meningkat sebesar 18,8% per tahun sejak tahun 1997 hingga 2020.

Sementara nilai ekspor Kepulauan Solomon ke Indonesia pada tahun 2021 tercatat senilai AS\$ 1,5 juta. Dengan demikian Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar AS\$13,5 juta.

- **Palau**

Hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 6 Juli 2007. Hubungan bilateral Indonesia-Palau belum intensif namun kerja sama kedua negara terus menunjukkan trend yang positif. Posisi Palau sebagai anggota *Pacific Island Forum* (PIF) mendukung integritas teritorial RI. Palau juga sering memberikan dukungan dalam berbagai pencalonan Pemri di organisasi internasional.

Pemri memberikan hibah ke Pemerintah Palau pada tahun 2021 untuk memfasilitasi penyelenggaraan *Our Ocean Conference* (OOC) ke-7 sebesar Rp 10 Milyar. Hibah tersebut untuk pengadaan 10 unit kendaraan patrol dan 4 unit kendaraan protokol dari Indonesia serta penyelenggaraan pelatihan keprotokolan.

- **Tonga**

Hubungan diplomatik Indonesia dan Kerajaan Tonga telah terjalin sejak 27 Mei 1994.

Total perdagangan Indonesia-Tonga mencapai USD 6,0 juta (2021) dengan surplus di pihak Indonesia yang merupakan *net-exporter* (tidak terdapat impor dari Tonga).

Tonga tercatat sebagai salah satu negara persinggahan WNI yang bekerja sebagai ABK.

- **Federasi Mikronesia**

Hubungan diplomatik Indonesia-Mikronesia secara resmi dibuka pada 16 Juli 1991 dan semenjak itu hubungan bilateral kedua negara berjalan dengan baik, utamanya di bidang politik yang diwujudkan antara lain melalui saling dukung dalam forum multilateral.

Mikronesia tercatat secara konsisten mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.

Tren nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2017-2021 sebesar 0,24%. Sedangkan perbandingan nilai perdagangan tahun Oktober 2022 dengan 2021 mengalami penurunan sebesar -18,22%.

- **Kepulauan Marshall**

Hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 21 Mei 1993.

Neraca perdagangan Indonesia dengan Kepulauan Marshall cenderung fluktuatif. Secara riil Indonesia sebenarnya belum mengimpor produk asli Kepulauan Marshall, tetapi negara tersebut tercatat sebagai tempat registrasi sejumlah perusahaan kapal internasional, termasuk kapal yang diimpor Indonesia.

Perdagangan kedua negara didominasi oleh produk non migas dari Kepulauan Marshall. Sejak 2016, posisi Kepulauan Marshall selalu surplus pada neraca perdagangannya dengan Indonesia. Faktor pandemi covid dengan segala pembatasan di perbatasan juga mempengaruhi nilai perdagangan kedua negara dengan adanya penurunan sebesar 76% di tahun 2021 dibandingkan dengan 2020.

- **Kaledonia Baru**

Status Kaledonia Baru (New Caledonia/Nouvelle-Calédonie (NC) adalah salah satu dari 12 (dua belas) Wilayah Seberang Lautan Prancis. Hingga kini masalah-masalah kewenangan hubungan luar negeri NC dan juga kewenangan di bidang moneter dan fiskal, pertahanan serta peradilan ditangani oleh Pemerintah Prancis.

Kepentingan pemberian pelayanan kekonsuleran dan perlindungan WNI merupakan alasan utama dibukanya Perwakilan RI di Noumea. KJRI Noumea resmi dibuka pada tingkat Konsulat (15 Mei 1951) dan kemudian ditingkatkan menjadi Konsulat Jenderal (Keppres RI No. 45 Tahun 1993 tanggal 17 Agustus 1993)

Hubungan RI dengan NC saat ini berada dalam kerangka hubungan bilateral RI-Prancis. Wilayah NC memiliki nilai strategis bagi visi Pasific Elevation, khususnya untuk memperkuat hubungan atas dasar ikatan kultural dengan Indonesia yang memiliki penduduk etnis Melanesia terbesar.

Tren nilai perdagangan kedua negara selama periode 2017-2021 menunjukkan peningkatan senilai 3,73%, sedangkan persentase perubahan perdagangan Oktober 2022 dengan Desember 2021 mengalami peningkatan yang cenderung tinggi, sebesar 151,40%.

- **Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dimulai pada 13 April 1950. Pada 30 Oktober 1967, hubungan kedua negara sempat dibekukan dan dinormalisasikan kembali melalui penandatanganan *MoU on the Resumption of Diplomatic Relations* RI-RRT di Jakarta pada 8 Agustus 1990.

Sejak normalisasi hubungan, kerja sama antara Indonesia dan RRT berkembang secara pesat. Pada tahun 2005, kedua negara menandatangani *Joint Declaration on Strategic Partnership* yang pada tahun 2013 ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif.

Pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan, Indonesia dan Tiongkok memiliki komunikasi yang sangat intens. Pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan ke Beijing, RRT pada bulan Juli, dan sebaliknya Presiden Xi Jinping juga telah melakukan kunjungan ke Bali, Indonesia pada bulan November.

Pada tingkat pejabat tinggi, RI dan RRT telah membentuk mekanisme dialog tingkat tinggi pada tahun 2021 yang diketuai secara bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan *State Councilor*/Menteri Luar Negeri RRT.

Kerja sama di berbagai bidang telah dikembangkan oleh kedua negara, antara lain dalam bidang perdagangan RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2021 mencapai USD 110 miliar dan pada periode Januari-Oktober 2022, nilai perdagangan RI-RRT telah mencapai USD 109,22 miliar. Pada bidang investasi, RRT merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, pada tahun 2021 realisasi investasi RRT (di luar Hong Kong) di Indonesia mencapai USD 3,2 miliar.

Dalam bidang infrastruktur, Indonesia dan RRT telah menyepakati kerja sama sinergi Poros Maritim Dunia dan *Belt and Road Initiative*. Melalui kesepakatan ini kedua negara telah menyepakati kerja sama dalam pembangunan infrastruktur strategis, antara lain proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Bidang kerja sama strategis lain yang telah disepakati antara kedua negara meliputi, kerja sama vaksin dan genomika, pembangunan hijau, pengembangan ekonomi digital, dan penguatan perdagangan bilateral.

Sebagai catatan tambahan, tahun 2024 NKRI menjalin kerjasama militer bidang tertentu.

- **Jepang**

Hubungan diplomatik RI-Jepang dimulai pada 20 Januari 1958 dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian RI-Jepang, yang kemudian diratifikasi pada April 1958.

Intensitas hubungan bilateral kedua negara semakin meningkat dengan ditandatanganinya Kemitraan Strategis RI-Jepang (*Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future*) pada 28 November 2006.

Dalam perkembangannya, peningkatan hubungan bilateral juga ditandai dengan penguatan mekanisme bilateral melalui:

- *Forum 2+2 Meeting* (Menhan dan Menlu RI-Jepang)
- *Strategic Dialogue* (Menlu RI-Jepang)
- *Indonesia-Japan Joint Economic Forum/IJ-JEF* (Menko Perekonomian RI dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang/METI)
- *Indonesia-Japan Energy Forum/IJEF* (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang/METI)
- *Indonesia-Japan Maritime Forum/IJMF* (Menko Marves RI dan Menlu Jepang)
- *Indonesia-Japan Cooperation Dialogue/IJCD* (Wamenlu RI-Jepang)

Jepang merupakan mitra penting dan strategis bagi Indonesia, terutama dalam bidang perdagangan, investasi dan pembangunan infrastruktur.

Volume **perdagangan** RI-Jepang pada tahun 2021 sebesar USD 32,5 miliar. Jepang merupakan mitra dagang ke-3 terbesar di Indonesia.

Total **investasi** Jepang ke RI tahun 2021 sebesar USD 2,26 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 3.623 proyek. Jepang adalah sumber investor asing terbesar ke-5 bagi Indonesia.

Di bidang **perdagangan**, salah satu isu yang masih bergulir adalah penyelesaian perundingan Protokol Perubahan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). IJEPA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara serta pasar regional melalui 3 (tiga) pilar utama yaitu liberalisasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas. Indonesia juga mendorong perluasan akses pasar buah tropis RI ke Jepang. Salah satu komoditas yang sedang diperjuangkan adalah ekspor mangga.

Di bidang **infrastruktur**, Indonesia dan Jepang memiliki kerja sama di bidang transportasi, otomotif, dan pembangunan pelabuhan. Proyek infrastruktur strategis yang menjadi *flagship* kemitraan RI-Jepang di antaranya adalah Pelabuhan Patimban, MRT Jakarta, dan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Di bidang **energi**, Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio menyepakati komitmen Indonesia – Jepang untuk mewujudkan *Asia Zero Emission Community* (AZEC) pada 14 November 2022 di Bali, di sela-sela KTT G20. Jepang akan mendukung transisi energi RI dengan memobilisasi sumber daya dan pendanaan.

Di bidang **pertahanan dan keamanan**, kerja sama erat terjalin mengenai pengalihan alat dan teknologi pertahanan maupun dukungan kapasitas pada program polisi masyarakat.

Adapun di bidang **maritim**, kemitraan keduanya tercermin pada hibah kapal patroli, pengembangan sentra perikanan, dan kerja sama antara Bakamla dan *Japan Coast Guard (JCG)*.

Kemitraan yang kuat juga nampak di bidang **kesehatan**. Jepang memberikan bantuan lebih dari 2 (dua) juta dosis vaksin Covid-19, 300 *vaccine refrigerators* dan alat kesehatan lainnya. Penguatan kerja sama kesehatan saat ini diarahkan untuk melampaui pandemi melalui riset, peningkatan kapasitas SDM, serta pembangunan ketahanan kesehatan nasional dan global.

Seiring dengan meningkatnya kemitraan strategis kedua negara, maka *people-to-people contact* juga semakin menguat. Hal ini terlihat dari penguatan kerja sama **pendidikan, pariwisata, ketenagakerjaan**, dan *sister city/province*.

Jepang menjadi negara tujuan pengembangan SDM khususnya di bidang **pendidikan**. Per Desember 2021, tercatat sekitar lima ribu pelajar Indonesia di Jepang.

Di bidang **ketenagakerjaan**, kedua negara memiliki mekanisme pengiriman PMI melalui *Specified Skilled Workers (SSW)* maupun perawat melalui skema IJEPA. Ini di luar program pemagangan *Technical Intern Training Program (TITP)* yang saat ini mencapai 25 ribu orang.

Tahun 2023, Indonesia dan Jepang akan merayakan 65 tahun hubungan diplomatik. Perayaan ini diharapkan dapat menjadi momentum tepat untuk semakin menguatkan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang.

- **Republik Korea (ROK)**

Hubungan RI-Republik Korea (ROK) atau Korea Selatan diawali tahun 1968 dengan pendirian Konsulat Jenderal RI di Seoul. Hubungan ini ditingkatkan statusnya menjadi Kedutaan Besar pada September 1973.

Hubungan kedua negara meningkat sejak ditandatanganinya *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* pada 4 Desember 2006. Pada tahun 2017, hubungan kedua negara ditingkatkan menjadi *Special Strategic Partnership*.

Pada 25 Juni 2021, Menteri Luar Negeri kedua negara telah menyepakati *Plan of Action (PoA)* Kemitraan Strategis Khusus yang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan hubungan bilateral pada 2021-2025. Implementasi PoA dipantau secara berkala setiap tahun.

Di tahun 2022 ROK merupakan mitra dagang terbesar ke-7 Indonesia. Total nilai perdagangan pada tahun 2022 hingga materi ini disusun adalah USD 20,5 miliar, naik 40.36% dari tahun 2021.

Kedua negara memiliki perjanjian *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* yang telah ditandatangani pada 18 Desember 2020, dan telah diratifikasi kedua negara untuk berlaku mulai 1 Januari 2023.

Bagi Indonesia, ROK adalah mitra penting dalam investasi, sosial budaya, perdagangan, industrialisasi dan transfer teknologi, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan kesehatan.

- **Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK)**

Hubungan bilateral RI–Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK) atau Korea Utara memiliki aspek historis yang bermula dari kedekatan para Pemimpin dan Pendiri kedua negara. Sejak dekade 1960-an Indonesia telah membuka kantor urusan kekonsuleran di Pyongyang, yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Kedutaan Besar.

Kedua negara terus melakukan kerja sama bilateral dengan prinsip saling menghormati. Salah satu aspek yang mengemuka adalah di bidang sosial budaya, yang ditandai antara lain dengan pendirian sekolah persahabatan Indonesia-Korea Utara (Sekolah Menengah Ryulgok) di Pyongyang pada tahun 1966 dan prasasti bunga Kimilsungia di Kebun Raya Bogor yang setelah pemugaran diresmikan oleh Presiden RI ke-5 pada November 2021.

Indonesia menilai penting mempertahankan hubungan dengan RRDK dan mendorong stabilitas dan penyelesaian secara damai isu Semenanjung Korea.

- **Mongolia**

Hubungan diplomatik RI-Mongolia dimulai dengan kunjungan Presiden Soekarno ke Ulaanbataar pada tahun 1956. Hubungan kerja sama antar kedua negara berjalan baik. Pada 57 September 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Mongolia dan menyepakati komitmen untuk memajukan kerja sama di bidang pemajuan HAM, demokrasi, pemerintahan yang baik dan penegakan hukum; bidang pertahanan; perdagangan dan investasi; pertambangan dan pertanian; sosial budaya; dan kerja sama di fora internasional/regional. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah melakukan kunjungan ke Mongolia pada bulan Juli 2016 dalam rangka menghadiri KTT ASEM.

Dalam pengembangan kerja-sama bilateral, Indonesia dan Mongolia telah membentuk Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral. Pada bulan Januari 2022, Kementerian Luar Negeri kedua negara telah menyelenggarakan pertemuan tingkat pejabat Senior. Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama di bidang perdagangan, kebudayaan, pertanian serta pelatihan personil pasukan perdamaian.

18. PENUTUP

Pameo dunia politik “ Tak ada lawan-kawan abadi, yang ada adalah kepentingan-diri abadi” dan “ Pada saat anda memilih aliansi, anda berkonsekuensi memilih negara-negara dengan aliansi-berlawanan” menjadi dasar-utama ber-politik bebas-aktif NKRI di muka-bumi , sambil mengingat pepatah-petitih “ Pandai pandai meniti buih, selamat badan keseberang” dan upaya resolusi konflik antar-negara dalam pepatah ” Seperti menarik rambut dalam tepung , rambut tertarik, tepung jangan berserak”. Pada tatanan dunia baru, tiap negara membutuhkan pimpinan-negara nan-piawai memposisikan/mempromosikan negaranya di antara negara-negara lain di muka-bumi. Penulis menengarai bahwa berbagai aliansi, pakta , asosiasi , dan forum internasional bersikap ramah terhadap NKRI yang berpolitik netral , bebas-aktif demi perdamaian & kebaikan dunia , dan non-blok. G7 makin terbuka mengundang negara-bukan anggota dalam berbagai perhelatan. Seperti biasa , PBB menghindari konflik terbuka dengan suatu negara, memilih berperan mengakrabkan semua negara anggota PBB, mengatasi/meresolusi berbagai konflik antar negara anggota PBB , sepanjang mampu.

Peran Departemen LN NKRI amat penting untuk membentuk pergaulan global terpilih Kabinet sambil memelihara citra negara non-blok bebas-aktif.

Terdapat strategi operasional atau strategi diplomasi politik bebas-aktif “ Pandai-pandai meniti buih “, antara lain mengingat pameo ” Pada saat anda memilih kawan-baru, anda memilih lawan-baru berupa lawan abadi dan lawan tidak abadi dari kawan-baru tersebut”

Makalah amat dangkal, segala kekurangan dan kekeliruan dalam makalah mohon di maafkan.

Jakarta, 17 Agustus 2023.